



LAPORAN PENELITIAN SMERU NO. 1/2024

ASESMEN PENDAHULUAN: KONDISI SOSIOEKONOMI KOMUNITAS LINGKAR TAMBANG DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Veto Tyas Indrio, Ana Rosidha Tamyis, Wandira Larasati, Sylvia Andriyani Kusumandari

LAPORAN PENELITIAN SMERU NO. 1/2024

ASESMEN PENDAHULUAN: KONDISI SOSIOEKONOMI KOMUNITAS LINGKAR TAMBANG DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Veto Tyas Indrio

Ana Rosidha Tamyis

Wandira Larasati

Sylvia Andriyani Kusumandari

Editor

Gunardi Handoko

Wiwin Purbaningrum

The SMERU Research Institute

Februari 2024

Asesmen Pendahuluan: Kondisi Sosioekonomi Komunitas Lingkar Tambang di Kabupaten Sumbawa Barat

Penulis: Veto Tyas Indrio, Ana Rosidha Tamyis, Wandira Larasati, Sylvia Andriyani Kusumandari

Editor: Gunardi Handoko, Wiwin Purbaningrum

Foto Sampul: SMERU

Diterbitkan oleh:

The SMERU Research Institute

Jl. Cikini Raya No. 10A

Jakarta 10330

Indonesia

Saran sitasi

Indrio, Veto Tyas, Ana Rosidha Tamyis, Wandira Larasati, dan Sylvia Andriyani Kusumandari (2024) 'Asesmen Pendahuluan: Kondisi Sosioekonomi Komunitas Lingkar Tambang di Kabupaten Sumbawa Barat.' Laporan Penelitian No. 1/2024. Jakarta: The SMERU Research Institute <URL> [tanggal akses].



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial 4.0 Internasional.

Konten SMERU dapat disalin atau disebarluaskan untuk tujuan nonkomersial sejauh dilakukan dengan menyebutkan The SMERU Research Institute sebagai sumbernya. Jika tidak ada kesepakatan secara kelembagaan, format PDF publikasi SMERU tidak boleh diunggah dalam jaringan (daring) dan konten daring hanya bisa dipublikasikan melalui tautan ke situs web SMERU.

Temuan, pandangan, dan interpretasi dalam laporan ini merupakan tanggung jawab penulis dan tidak berhubungan dengan atau mewakili lembaga-lembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan The SMERU Research Institute.

Studi dalam publikasi ini sebagian besar menggunakan survei dan wawancara mendalam. Semua informasi terkait direkam dan disimpan di kantor SMERU.

Untuk mendapatkan informasi mengenai publikasi SMERU, hubungi kami melalui nomor telepon 62-21-31936336, nomor faks 62-21-31930850, atau alamat surel smeru@smeru.or.id; atau kunjungi situs web www.smeru.or.id.

Tim Peneliti

Peneliti SMERU

Veto Tyas Indrio

Ana Rosidha Tamyis

Wandira Larasati

Sylvia Andriyani Kusumandari

Peneliti Daerah

Rahmayati, Dedy Hermansyah, Anna Akhrina Nurnaning, Fahrunnisa

Koordinator Lapangan

Febi Setiawan, Fitri Rahmawati, Lutfi Ali, Mawan Erlangga, Muhamad Lin Abdul Azis Akbar, Muhammad Ilham, Siti Yuli Surya Komalasari

Enumerator

Abdul Hafiz, Berlinna Indrawati, Dwi Syafitri, Dyah Ayu Suryani Setya Puspitaningrum, Endriani, Eva Susanti, Evie Shoffiah Aprilia, Fitriati Amalia, Hasri Ratna Utari, I Made Arimbawa, Kartawan, Imam Agus Santoso, Januar Kurniawan, Minawati Anggraini, Mohamad Baihaqi, Muhaz Dzan, Murniati, Musmuliadi Yowry, Pratama Restu Adjie, Rawan Suryal Ghani, Ria Fitri Rahmawati, Ronal Perdian, Russi Rusyanti, Rustamaji, Sri Riana, Umi Uzli Aulia, Unggul Satriadi, Yuanita Anggraeni, Yulia Maethasurrofa, Ziyad Nauvan Zarkasi, Zul Fajjah

Penasihat

Athia Yumna

Widjajanti Isdijoso

Ucapan Terima Kasih

Laporan ini dapat diselesaikan berkat dukungan berbagai pihak. Untuk itu, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Bapak/Ibu dari Departemen Social Impact PT Amman Mineral Nusa Tenggara (Amman) yang telah memfasilitasi dan memberikan informasi penting selama pelaksanaan penelitian ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra Program Pengembangan Masyarakat Amman atas informasi berharga terkait kegiatan yang dilakukan dan gambaran umum kondisi wilayah penelitian.

Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada pemerintah daerah wilayah penelitian, terutama pihak dinas, camat, kepala desa, puskesmas, dan sekolah, yang telah memperlancar dan memberikan informasi berharga sehingga penelitian ini terlaksana dengan baik. Kami juga berterima kasih kepada para informan kunci lainnya di tingkat kabupaten, kecamatan, desa, maupun masyarakat atas segala informasi berharga untuk penelitian ini. Penghargaan dan terima kasih kami sampaikan juga kepada semua rumah tangga responden yang telah bersedia diwawancarai dan meluangkan waktu mereka yang berharga. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada penasihat studi atas masukannya untuk penelitian ini. Terakhir, kami berterima kasih kepada peneliti daerah, koordinator lapangan, dan enumerator di wilayah penelitian yang telah membantu tim peneliti The SMERU Research Institute mengumpulkan data di lapangan.

Abstrak

Asesmen Pendahuluan: Kondisi Sosioekonomi Komunitas Lingkar Tambang di Kabupaten Sumbawa Barat

Veto Tyas Indrio, Ana Rosidha Tamyis, Wandira Larasati, Sylvia Andriyani Kusumandari

Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) adalah salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan proporsi sektor pertambangan dan penggalian yang sangat besar. Pada 2021, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa kontribusi sektor ini setidaknya mencapai 81,89% dari nilai total produk domestik regional bruto. Hal tersebut menyebabkan ketergantungan KSB pada sektor pertambangan dan penggalian—fluktuasi pertumbuhan ekonominya mengikuti fluktuasi pertumbuhan sektor ini. Di sisi lain, tingkat kemiskinan dan ketimpangan KSB masih berada di atas rerata nasional. Berkaitan dengan fenomena tersebut, studi ini bertujuan memberikan gambaran data awal berupa pemetaan kondisi serta isu sosial dan ekonomi komunitas di sekitar lingkaran tambang di KSB. Studi ini diharapkan dapat menjadi basis masukan bagi program pengembangan masyarakat yang akan atau sedang dikembangkan di wilayah tersebut sesuai dengan hasil pemetaan kondisi sosial dan ekonominya. Studi ini dilakukan di sembilan kecamatan yang tersebar di dua kabupaten, yaitu KSB (perlakuan) dan Kabupaten Sumbawa (pembanding). Secara kuantitatif, studi ini melakukan survei terhadap 1.000 rumah tangga dan, secara kualitatif, melakukan wawancara mendalam dengan mitra program pengembangan masyarakat serta sejumlah pemangku kepentingan di tingkat rumah tangga, desa, kecamatan, dan kabupaten. Studi ini menganalisis sejumlah indikator sosial dan ekonomi yang mengadaptasi indikator serta standar tingkat nasional dan internasional. Indikator tersebut dikelompokkan ke dalam tujuh aspek analisis, yaitu pendidikan, ketenagakerjaan, perekonomian nontambang, infrastruktur ekonomi, infrastruktur dasar, kesehatan, serta kerentanan sosial dan lingkungan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa beberapa indikator memiliki capaian yang sudah cukup baik. Namun, masih ada beberapa isu yang menjadi tantangan dan beberapa indikator yang perlu diprioritaskan untuk menjadi fokus utama program pengembangan masyarakat oleh para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan komunitas lingkaran tambang di KSB. Diperlukan perhatian khusus dalam menyusun strategi, persiapan langkah, serta sasaran program yang harus diupayakan para pemangku kepentingan untuk menghadapi tantangan tersebut. Strategi, langkah, dan sasaran tersebut dapat difokuskan pada penguatan sistem layanan kesehatan, pendidikan formal, kualitas sumber daya manusia, pengembangan potensi industri pariwisata, serta dukungan bagi pengembangan usaha mikro dan kecil.

Kata kunci: pengembangan masyarakat, pembangunan daerah, sosioekonomi

Daftar Isi

Ucapan Terima Kasih	I
Abstrak	II
Daftar Isi	III
Daftar Tabel	IV
Daftar Gambar	IV
Daftar Kotak	VI
Daftar Singkatan dan Akronim	VII
Rangkuman Eksekutif	X
I. Tentang Studi ini	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Studi	1
1.3 Landasan Konseptual	2
1.4 Metodologi	4
1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Studi	11
II. Kondisi Umum Wilayah Studi	13
2.1 PDRB dan Kemiskinan	13
2.2 Profil Penduduk Hasil Survei	14
2.3 Profil Rumah Tangga Hasil Survei	18
III. Analisis Sosioekonomi Komunitas Lingkar Tambang	21
3.1 Aspek Pendidikan	21
3.2 Aspek Ketenagakerjaan	25
3.3 Aspek Ekonomi Nontambang	35
3.4 Aspek Infrastruktur Ekonomi	48
3.5 Aspek Infrastruktur Dasar	58
3.6 Aspek Kesehatan	62
3.7 Aspek Kerentanan Sosial dan Lingkungan	74
IV. Penutup	90
4.1 Rekomendasi	90
4.2 Masukan bagi Studi Selanjutnya	92
Daftar Acuan	94
Lampiran	98

Daftar Tabel

- Tabel 1. Aspek, Subaspek, dan Indikator | 4
- Tabel 2. Kerangka Kuesioner Survei Kuantitatif | 7
- Tabel 3. Pemilihan Kecamatan dan Desa Wilayah Studi Kualitatif | 9
- Tabel 4. Informan Kualitatif dan Tujuan Wawancara | 10
- Tabel 5. Jumlah dan Persentase Rumah Tangga dan Penduduk Hasil Survei | 14
- Tabel 6. Rasio Ketergantungan Penduduk | 15
- Tabel 7. Profil Rumah Tangga | 18
- Tabel 8. Alasan Tidak Melanjutkan Pendidikan | 23
- Tabel 9. APK SMA/Sederajat | 25
- Tabel 10. APK Perguruan Tinggi | 25
- Tabel 11. Rerata Upah per Jam dan Jumlah Tenaga Kerja Berstatus Pegawai/Buruh Berdasarkan Sektor Pekerjaan dan Jenis Kelamin (Rupiah) | 29
- Tabel 12. Hasil Uji Signifikansi Statistik (t-statistik) Antara Upah dan Berbagai Variabel | 32
- Tabel 13. Keberadaan Lembaga Keuangan | 54
- Tabel 14. Hasil Uji Signifikansi Statistik Aspek Partisipasi Sosial (T-Statistik) | 82
- Tabel 15. Langkah Praktis dan Sasaran Rekomendasi | 91
- Tabel 16. Masukan Substantif | 92

Daftar Gambar

- Gambar 1. Wilayah Studi | 5
- Gambar 2. PDRB dan Tingkat Kemiskinan KSB, 2017–2021 | 13
- Gambar 3. PDRB dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sumbawa, 2017–2021 | 14
- Gambar 4. Piramida Penduduk Wilayah Perlakuan dan Pemandangan | 15
- Gambar 5. Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Administrasi | 16
- Gambar 6. Persentase Penduduk yang Memiliki Akta Kelahiran Berdasarkan Kelompok Usia | 16
- Gambar 7. Persentase Penduduk Usia 24 Tahun ke Atas Berdasarkan Ijazah Tertinggi | 17
- Gambar 8. Status Sekolah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia | 17
- Gambar 9. Profil Rumah Tangga | 18
- Gambar 10. Pengeluaran Rata-Rata per Bulan Rumah Tangga Berdasarkan Tingkat Pendidikan KRT | 19
- Gambar 11. Pengeluaran Rata-Rata Rumah Tangga per Bulan Berdasarkan Sektor Pekerjaan KRT | 20
- Gambar 12. Tingkat Pendidikan Terakhir Penduduk Berusia di Atas 24 Tahun | 21
- Gambar 13. APM TK/PAUD, SD/Sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat, dan Perguruan Tinggi | 23
- Gambar 14. Persentase Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin | 26
- Gambar 15. Persentase Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor Pekerjaan dan Tingkat Pendidikan | 26

- Gambar 16. Sektor Pekerjaan Berdasarkan Jenis Kelamin | 28
- Gambar 17. Rerata Upah Pekerja per Jam Berdasarkan Jenis Kelamin | 29
- Gambar 18. Persentase Tenaga Kerja yang Memanfaatkan Internet dan Mengikuti Pelatihan | 31
- Gambar 19. Setengah Pengangguran dan Jumlah Jam Kerja Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin | 33
- Gambar 20. Persentase Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin | 35
- Gambar 21. Upah Pekerja Industri Pariwisata dan Nonpariwisata | 36
- Gambar 22. Sektor Pekerjaan di Industri Pariwisata | 37
- Gambar 23. Status Pekerjaan pada Industri Pariwisata | 38
- Gambar 24. Persentase Penduduk yang Memahami Konsep Ekowisata | 39
- Gambar 25. Penduduk Berusia di Atas 17 Tahun yang Mengikuti Kegiatan Pokdarwis | 39
- Gambar 26. Penduduk Usia di Atas 17 Tahun yang Terlibat dalam–dan Menikmati–
Pertunjukan Seni pada Tiga Bulan Terakhir | 40
- Gambar 27. Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Status Usaha | 43
- Gambar 28. Profil UMKM Wilayah Studi | 43
- Gambar 29. UMK menurut Sektor Pekerjaan | 44
- Gambar 30. UMK dan UMK Pemuda menurut Jenis Kelamin | 45
- Gambar 31. Pelatihan yang Diikuti UMK dalam Setahun Terakhir | 47
- Gambar 32. Kondisi Permukaan Jalan Menuju/di Sekitar Rumah Responden | 48
- Gambar 33. Kondisi Kualitas Jalan Menuju/di Sekitar Rumah Responden | 49
- Gambar 34. Sumber Listrik | 50
- Gambar 35. Frekuensi Pemadaman Listrik | 50
- Gambar 36. Penduduk Berusia di Atas 15 Tahun yang Menggunakan Internet dalam 3
Bulan Terakhir | 51
- Gambar 37. Kualitas Internet menurut Penduduk Berusia di Atas 15 Tahun yang
Menggunakan Internet dalam 3 Bulan Terakhir | 51
- Gambar 38. Jumlah BTS | 52
- Gambar 39. Jumlah Pasar dan Minimarket/Supermarket | 52
- Gambar 40. Kepemilikan Rekening Tabungan di Bank | 54
- Gambar 41. Lembaga Keuangan Tempat Memiliki Rekening atau Menjadi Anggota | 55
- Gambar 42. Sumber Pinjaman untuk Keperluan Usaha | 55
- Gambar 43. Alasan Pelaku Usaha Tidak Mengakses Kredit Usaha | 56
- Gambar 44. Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Layak dan Sanitasi | 58
- Gambar 45. Sumber Air Utama Rumah Tangga | 59
- Gambar 46. Kondisi Air dari Sumber Air yang Digunakan Rumah Tangga | 60
- Gambar 47. Kepemilikan Fasilitas Toilet Rumah Tangga | 60
- Gambar 48. Jenis Fasilitas Kesehatan yang Diakses Penduduk Saat Sakit | 63
- Gambar 49. Alasan Tidak Berkunjung ke Fasilitas Kesehatan Saat Sakit | 66
- Gambar 50. Akses terhadap Fasilitas Kesehatan dan Pemanfaatan Jaminan Kesehatan oleh
Penyandang Disabilitas | 67
- Gambar 51. Persentase Persalinan Aman | 68
- Gambar 52. Persentase Pemberian ASI dan ASI Eksklusif | 69
- Gambar 53. Persentase Balita yang Dibawa ke Posyandu | 69
- Gambar 54. Persentase Perokok Berdasarkan Usia | 71

- Gambar 55. Persentase Penduduk yang Merokok Berdasarkan Partisipasi Angkatan Kerja | 72
- Gambar 56. Persentase Penduduk yang Merokok Berdasarkan Sektor Pekerjaan | 72
- Gambar 57. Pengetahuan mengenai Bahaya Merkuri Berdasarkan Tingkat Pendidikan | 73
- Gambar 58. Sumber Informasi mengenai Bahaya Merkuri yang Didapatkan Penduduk | 74
- Gambar 59. Persentase Perempuan yang Menikah pada Usia Dini dan Persentase Pernikahan Dini | 75
- Gambar 60. Usia Pernikahan Pertama Perempuan | 75
- Gambar 61. Median Usia Menikah Perempuan | 76
- Gambar 62. Persentase Perempuan yang Memiliki Otoritas atas Kesehatan dan Urusan Reproduksi | 78
- Gambar 63. Persentase Perempuan yang Memiliki Otoritas Berdasarkan Tingkat Pendidikan | 79
- Gambar 64. Otoritas Perempuan Berdasarkan Keikutsertaannya dalam Organisasi | 80
- Gambar 65. Partisipasi Sosial dan Kegiatan Masyarakat Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin | 81
- Gambar 66. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Toleransi menurut Jenis Toleransi | 84
- Gambar 67. Tingkat Toleransi menurut Tingkat Pendidikan KRT | 85
- Gambar 68. Kepemilikan Tempat Sampah Rumah Tangga | 87
- Gambar 69. Praktik Pengelolaan Sampah oleh Rumah Tangga menurut Tingkat Pendidikan KRT | 88
- Gambar 70. Persentase Penduduk yang Melakukan Pemilahan Sampah dan Mendapatkan Pelatihan Pengelolaan Sampah | 89
- Gambar 71. Struktur Rekomendasi | 90

Daftar Kotak

- Kotak 1. Koperasi *Syariah* sebagai Lembaga Keuangan Alternatif bagi Masyarakat | 57
- Kotak 2. Keteringgalan dalam Pemenuhan Infrastruktur Dasar Sanitasi dan Air Bersih | 61
- Kotak 3. Kurangnya Fasilitas Penunjang Kesehatan di Desa | 64
- Kotak 4. Penanganan Kasus *Stunting* Menjadi Prioritas Pemerintah KSB | 70

Daftar Singkatan dan Akronim

APK	angka partisipasi kasar
APM	angka partisipasi murni
ASI	air susu ibu
ASN	aparatur sipil negara
ATS	anak tidak sekolah
baduta	(anak) bawah dua tahun
balita	(anak) bawah lima tahun
Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Baznas	Badan Amil Zakat Nasional
BMT	<i>baitul maal wa tamwil</i>
BP	bukan pekerja
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPR	bank perkreditan rakyat
BPS	Badan Pusat Statistik
BTS	<i>base transceiver station</i> (menara stasiun pemancar)
BUMDes	Badan Usaha Milik Desa
COVID-19	penyakit koronavirus 2019
Diskoperindag	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan perdagangan
Disnakertrans	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
e-PPBGM	pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat secara elektronik
ESG	Environmental, Social, and Governance
ICMM	International Council on Mining and Metals
IMS	infeksi menular seksual
IPM	indeks pembangunan manusia
ISO	International Organization for Standardization
JKN	Jaminan Kesehatan Nasional
KIA	kesehatan ibu dan anak
KRT	kepala rumah tangga
KSB	Kabupaten Sumbawa Barat
KTP	kartu tanda penduduk
KUR	kredit usaha rakyat

LSM	lembaga swadaya masyarakat
luring	luar jaringan
NIK	nomor induk kependudukan
NTB	Nusa Tenggara Barat
Pamsimas	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
PAUD	pendidikan anak usia dini
PBI	penerima bantuan iuran
PBPU	pekerja bukan penerima upah
PDAM	Perusahaan Daerah Air Minum
PDRB	produk domestik regional bruto
pemda	pemerintah daerah
perbup	peraturan bupati
perda	peraturan daerah
PHBS	perilaku hidup bersih dan sehat
PLN	Perusahaan Listrik Negara
Podes	Pendataan Potensi Desa
POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
pokdarwis	kelompok sadar wisata
posyandu	pos pelayanan terpadu
PROPER	Program for Pollution Control, Evaluation, and Rating
puskesmas	pusat kesehatan masyarakat
pustu	puskesmas pembantu
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
SAE	<i>small area estimation</i> (estimasi wilayah kecil)
SD	sekolah dasar
SDM	sumber daya manusia
SMA	sekolah menengah atas
SMK	sekolah menengah kejuruan
SMP	sekolah menengah pertama
THT	telinga, hidung, dan tenggorokan
ToC	Theory of Change
TPAK	tingkat partisipasi angkatan kerja
TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

UD	unit dagang
UMK	usaha mikro dan kecil
UMKM	usaha mikro, kecil, dan menengah
UU	undang-undang

Rangkuman Eksekutif

Latar Belakang dan Tujuan Studi

Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Daerah ini memiliki proporsi sektor pertambangan dan penggalian terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) yang sangat tinggi. Pada 2021, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa 81,89% perekonomian KSB didominasi sektor pertambangan dan penggalian. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa fluktuasi pertumbuhan ekonomi kabupaten ini mengikuti pola yang sama dengan pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan dan penggalian. Di sisi lain, BPS juga mencatat bahwa, pada beberapa indikator makro penting, seperti tingkat kemiskinan dan ketimpangan, angka untuk KSB masih berada di atas rerata nasional. Hal ini menimbulkan pertanyaan lebih dalam bagaimana potret sosial dan ekonomi komunitas lingkaran tambang di KSB saat ini.

Berangkat dari uraian di atas, studi ini berupaya menyajikan gambaran data awal yang dapat digunakan untuk memetakan kondisi serta isu sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar lingkaran tambang saat ini. Selain itu, laporan studi ini dapat menjadi basis masukan bagi program pengembangan masyarakat yang akan atau sedang dikembangkan di wilayah sekitar lingkaran tambang. Selanjutnya, data awal (*baseline*) ini nantinya dapat digunakan sebagai pembandingan untuk melihat perubahan sejumlah indikator kesejahteraan dan mengukur dampak sejumlah program pada studi akhir (*endline*) pada masa yang akan datang.

Landasan Konseptual

Berbicara mengenai kondisi sosioekonomi masyarakat berarti meninjau kesejahteraan sosial dan kesejahteraan ekonominya. Dua konsep kesejahteraan ini merupakan bentuk paling dasar untuk melihat tingkat kesejahteraan secara umum. Pada skala rumah tangga, kondisi kesejahteraan ekonomi dapat diukur melalui indikator pendapatan, penghasilan, ataupun status pekerjaan karena rumah tangga dengan pendapatan lebih tinggi atau pekerjaan yang layak lebih mungkin mendapatkan taraf kehidupan, seperti taraf kesehatan dan tingkat pendidikan, yang lebih baik. Sementara itu, kondisi kesejahteraan sosial dapat dirangkum sebagai kondisi ketika seorang individu terpenuhi kebutuhan dasarnya, dapat menjalankan peranan sosialnya (melalui partisipasi aktif dalam aktivitas sosial di tengah masyarakat), dan mampu mengatasi permasalahan hidupnya. Selain itu, kesejahteraan masyarakat perlu didukung dengan kondisi lingkungan yang memadai. Masyarakat yang sejahtera harus disertai dengan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Dalam studi ini, kondisi kesejahteraan sosioekonomi dikelompokkan menjadi beberapa aspek yang berasal dari konsep teoretis kesejahteraan sosial dan ekonomi. Tidak hanya itu, beberapa nilai dan prinsip dalam dokumen-dokumen terkait program pengembangan masyarakat juga kami jadikan pertimbangan untuk penentuan indikator kesejahteraan. Pada kerangka kerja Theory of Change (ToC) Amman, terdapat tiga pilar utama dalam pelaksanaan program pengembangan masyarakat, yaitu (i) peningkatan sumber daya

manusia (SDM), (ii) pemberdayaan ekonomi, dan (iii) pariwisata berkelanjutan. Tiga pilar tersebut menjadi landasan untuk mencapai tujuan besar program pengembangan masyarakat, yakni menyiapkan ekosistem bagi komunitas di sekitar lingkaran tambang agar tangguh menghadapi masa depan. Perlu dicatat bahwa mayoritas indikator yang disusun merupakan hasil/capaian (*outcomes*) atau setidaknya keluaran (*output*).

Berdasarkan penjelasan tersebut, kondisi sosioekonomi dalam studi ini terbagi ke dalam 7 aspek kesejahteraan dan 70 indikator. Pada bagian akhir laporan, rekomendasi mengenai program pengembangan masyarakat juga akan mengacu kepada konsep kesejahteraan sosial dan ekonomi yang sesuai dengan kerangka pikir studi ini. Dalam laporan ini, semua aspek akan dibahas dan dianalisis kondisinya, tetapi indikator yang dimasukkan ke dalam analisis adalah beberapa indikator pilihan yang dinamikanya menarik untuk ditelusuri lebih jauh.

Metodologi dan Ruang Lingkup

Metodologi

Dalam prosesnya, studi ini menggunakan dua jenis pendekatan (kuantitatif dan kualitatif) pada dua jenis wilayah yang berbeda, yaitu wilayah perlakuan (KSB) dan wilayah pembanding (Kabupaten Sumbawa). Dua jenis wilayah ini sangat penting sebagai alat yang akan digunakan untuk mengukur dampak ke depannya. Adapun pendekatan kuantitatif dan kualitatif, keduanya digunakan untuk memperkuat serta mempertajam hasil analisis satu sama lain atas data sosial dan ekonomi yang telah dikumpulkan pada November 2022 yang lalu.

Pengumpulan data kuantitatif dilakukan melalui survei tatap muka dengan metode *random sampling* terhadap 1.000 rumah tangga yang tersebar di 9 kecamatan pada 2 kabupaten studi. Pemilihan kabupaten dan kecamatan didasarkan pada beberapa kriteria dan penentuannya telah melalui proses diskusi bersama Tim Social Impact Amman. Sebelum turun ke lapangan, tim peneliti (dalam hal ini, peneliti daerah) melakukan verifikasi data secara langsung untuk memastikan bahwa wilayah studi terpilih sudah sesuai dengan kriteria wilayah studi perlakuan dan pembanding. Selain itu, dipastikan bahwa rumah tangga terpilih di kedua wilayah studi memiliki dua dari tiga kriteria: (i) memiliki anak usia sekolah (5–17 tahun), (ii) memiliki anggota rumah tangga usia muda (16–30 tahun), dan (iii) memiliki anggota rumah tangga perempuan (usia 6–49 tahun) yang pernah menikah/melahirkan.

Dari semua kecamatan dan desa studi kuantitatif, tim kualitatif memilih dua kecamatan dan dua desa pada wilayah perlakuan serta satu desa pada wilayah pembanding sebagai wilayah studi kualitatif. Pemilihan kecamatan dan desa tersebut dilakukan secara *purposive* dengan pertimbangan tertentu. Pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam. Tim kualitatif memulai pengumpulan data primer dengan melakukan wawancara daring terhadap tiga mitra program Amman yang mewakili tiga pilar kegiatan program pengembangan masyarakat. Selanjutnya, dilakukan pengumpulan data primer kualitatif secara tatap muka di lokasi studi. Pada wilayah perlakuan, pengumpulan data dilakukan di tingkat kabupaten, kecamatan, desa, dan rumah tangga. Pada wilayah pembanding, pengumpulan data dilakukan di tingkat desa dan rumah tangga. Secara

keseluruhan, terdapat 47 informan (lembaga dan individu) yang diwawancarai tim kualitatif. Informan di setiap wilayah dan tingkat dipilih berdasarkan kebutuhan data. Wawancara dilakukan dengan panduan wawancara dan bertujuan mengumpulkan informasi mengenai aspek tertentu. Triangulasi data dilakukan dengan memeriksa informasi atau data pada aspek yang sama dengan hasil wawancara informan yang berbeda-beda. Setelah dianalisis, data kualitatif akan ditampilkan dalam bentuk narasi, kutipan hasil wawancara, dan kotak cerita. Analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif akan saling melengkapi.

Ruang Lingkup

Dalam analisisnya, studi ini memiliki beberapa keterbatasan dalam ruang lingkup, di antaranya terkait wilayah studi. Pertama, meski pengumpulan data dilakukan di dua kabupaten, data yang terkumpul tidak serta-merta memberikan gambaran utuh di tingkat kabupaten, melainkan hanya dapat digunakan untuk mewakili kelompok wilayah perlakuan dan pembanding. Kedua, dalam merumuskan sejumlah indikator sosial dan ekonomi, tim peneliti secara keseluruhan telah mengumpulkan 70 indikator yang mengadaptasi indikator serta standar nasional dan internasional. Namun, dalam proses analisisnya, hanya beberapa indikator yang digunakan, mengingat banyaknya isu dan topik menarik yang harus diangkat. Ketiga, tim peneliti kuantitatif tidak melakukan pendataan terhadap anggota rumah tangga yang kini menetap di luar wilayah studi sehingga beberapa indikator tidak bisa memberikan gambaran mengenai penduduk dengan kriteria tersebut. Terakhir, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, studi ini mempertimbangkan beberapa aspek teoretis dan kerangka kerja, di antaranya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB); International Council on Mining and Metals (ICMM); International Organization for Standardization (ISO) 26000; Environmental, Social, and Governance (ESG); Program for Pollution Control, Evaluation, and Rating (PROPER); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KSB; serta visi dan misi—termasuk ToC—Amman. Oleh karena itu, fokus pembahasan dan analisis studi ini mengacu kepada dokumen-dokumen tersebut, misalnya pembahasan terkait aspek nontambang yang berfokus pada industri pariwisata serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kondisi Umum Wilayah Studi

Wilayah KSB berada di bagian barat Pulau Sumbawa yang merupakan bagian dari Provinsi NTB. KSB terdiri atas 8 kecamatan (Sekongkang, Jereweh, Maluk, Taliwang, Brang Ene, Brang Rea, Seteluk, dan Poto Tano) yang terbagi ke dalam 64 desa/kelurahan. Volume PDRB KSB mencapai 110,58 juta rupiah pada 2021 dan merupakan volume PDRB tertinggi di NTB. Pertumbuhan ekonominya berfluktuasi cukup tajam dan sangat bergantung pada sektor pertambangan dan penggalian. Porsi sektor ini mencapai 81,89% dari keseluruhan PDRB KSB. Sementara itu, Kabupaten Sumbawa (dengan luas wilayah 6.643 km²) didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat, kecuali pada 2020 saat terjadi pandemi penyakit koronavirus 2019 (COVID-19). Meski tingkat pertumbuhan kedua daerah cukup tinggi, tingkat kemiskinannya juga masih tinggi, yaitu sekitar 13,5% di KSB dan 13,9% di Kabupaten Sumbawa pada 2021.

Dari 1.000 rumah tangga yang kami data, 5 rumah tangga kami keluarkan dari sampel analisis saat proses pembersihan data (*data cleaning*). Dengan demikian, kami mendapatkan responden sejumlah 995 rumah tangga dari survei kuantitatif, yakni 597 rumah tangga di wilayah perlakuan dan 398 rumah tangga di wilayah pembanding, dengan jumlah total individu 3.828 orang. Komposisi penduduk didominasi kelompok penduduk usia anak (5–17 tahun) dan kelompok penduduk dewasa (di atas 30 tahun). Cukup sulit menemukan kelompok pemuda atau usia muda karena, sepertinya, banyak pemuda pergi ke luar daerah (ke luar kabupaten atau bahkan ke luar provinsi) untuk bekerja ataupun bersekolah. Karena jumlah pemuda di kedua wilayah studi relatif kecil, penduduk usia produktifnya juga tidak banyak, yakni berkisar 32%–37%. Hal ini menyebabkan tingginya rasio ketergantungan penduduk di kedua wilayah studi.

Berdasarkan jenis tempat tinggal, mayoritas rumah tangga tinggal di bangunan milik sendiri. Di kedua wilayah studi, mayoritas rumah tangga tinggal di rumah beratap seng dan berinding tembok. Di wilayah pembanding, lantai rumah paling banyak (57%) terbuat dari marmer/keramik/granit, tetapi, di wilayah perlakuan, hanya ada 33,7% rumah tangga yang lantai rumahnya terbuat dari marmer/keramik/granit. Sementara itu, rata-rata lama sekolah kepala rumah tangga (KRT) di kedua wilayah studi adalah 9,4 tahun atau kurang lebih tamat sekolah menengah pertama (SMP).

Terdapat perbedaan pengeluaran rata-rata rumah tangga berdasarkan sektor pekerjaan KRT. Di wilayah perlakuan, rumah tangga dengan KRT yang bekerja di sektor pertambangan memiliki pengeluaran rata-rata 3,6 juta rupiah per bulan, lebih tinggi daripada rumah tangga dengan KRT yang bekerja di sektor-sektor lain. Termasuk dalam rumah tangga dengan pengeluaran paling rendah, yakni sekitar 1,6–1,7 juta rupiah per bulan, adalah rumah tangga yang KRT-nya bekerja di sektor industri pengolahan dan sektor pertanian. Sektor industri pengolahan yang dimaksud dalam studi ini adalah kelompok-kelompok industri rumah tangga skala mikro atau kecil. Sementara itu, pengeluaran rumah tangga paling tinggi (2,1 juta rupiah) di wilayah pembanding berasal dari rumah tangga yang KRT-nya bekerja di sektor transportasi, pergudangan, dan informasi dan komunikasi, sedangkan pengeluaran paling rendah (1,2 juta rupiah) berasal dari rumah tangga yang KRT-nya bekerja di sektor restoran dan akomodasi. Kemudian, jika dilihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), kedua wilayah memiliki TPAK laki-laki yang lebih tinggi daripada TPAK perempuan. Lebih-lebih jika penduduk tersebut berpendidikan sekolah menengah atas (SMA) ke atas.

Analisis Sosioekonomi Komunitas Lingkar Tambang

Aspek Pendidikan

Mayoritas penduduk berusia di atas 24 tahun berpendidikan rendah (SMP ke bawah) dan rata-rata lama sekolahnya sekitar sembilan tahun. Pemerintah telah menetapkan sejumlah kebijakan untuk mendorong wajib belajar, bahkan hingga tingkat SMA/ sederajat. Namun, dari capaian pendidikan penduduk, terlihat masih perlunya upaya untuk memastikan akses penduduk terhadap pendidikan. Pada sisi institusi pendidikan, sejumlah sekolah dihadapkan pada ketersediaan sarana pembelajaran serta jumlah dan kualifikasi tenaga pendidik yang belum memadai. Pada kelompok anak usia sekolah, capaian angka

partisipasi murni (APM) menunjukkan hasil yang bagus, meski tidak semua indikator APM mencapai 100%. Dengan demikian, tidak mengherankan bahwa masih terdapat anak tidak sekolah (ATS), termasuk pada kelompok disabilitas. Hambatan ekonomi menjadi alasan sebagian besar anak yang tidak melanjutkan pendidikan. Jika dilihat dari aspek gender, tampak bahwa minat bersekolah laki-laki lebih rendah daripada perempuan, terutama untuk tingkat perguruan tinggi. Pada wilayah perlakuan, situasi ini tidak lepas dari ketertarikan kelompok laki-laki untuk masuk bekerja di sektor pertambangan daripada melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Aspek Ketenagakerjaan

Jumlah tenaga kerja berpendidikan tinggi (SMA ke atas) di wilayah perlakuan cukup seimbang dengan jumlah tenaga kerja berpendidikan rendah. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh adanya sektor pertambangan dan sektor jasa di wilayah perlakuan yang memerlukan tenaga kerja terdidik. Pertambangan menjadi favorit di wilayah perlakuan karena sektor ini memberikan status sosial dan imbal balik upah yang lebih baik daripada sektor-sektor lain. Sayangnya, masih ada ketaksesuaian antara kebutuhan sektor pertambangan dan kompetensi tenaga kerja. Situasi ini dapat menimbulkan pengangguran karena keengganan tenaga kerja untuk masuk ke sektor nontambang.

Meskipun sektor pertambangan memberikan imbal balik upah yang cenderung tinggi, jumlah tenaga kerja perempuan yang terlibat di sektor ini jauh lebih kecil daripada laki-laki. Selain itu, tenaga kerja perempuan dihadapkan pada beban ganda, yaitu bekerja sekaligus menunaikan tanggung jawab domestik. Akibatnya, jam kerja mereka menjadi tidak optimal, dan cukup banyak perempuan termasuk dalam kelompok setengah pengangguran (bekerja kurang dari 35 jam per minggu). Imbal balik upah yang diterima perempuan juga cenderung lebih rendah daripada laki-laki. Tidak hanya itu, di wilayah perlakuan, tingkat pengangguran pada perempuan juga lebih tinggi daripada laki-laki, terutama di kalangan perempuan berpendidikan tinggi. Selain itu, jumlah perempuan yang masuk ke dalam angkatan kerja memang sedikit. Lapangan kerja yang memerlukan tenaga berpendidikan tinggi juga cenderung mengutamakan laki-laki. Persoalan imbal balik upah ternyata juga berhubungan dengan tingkat pendidikan, pemanfaatan internet, dan keikutsertaan pekerja dalam pelatihan bersertifikat. Berdasarkan hasil survei, pekerja yang memanfaatkan internet dalam pekerjaannya dan pekerja yang mendapatkan pelatihan bersertifikat masih sedikit.

Aspek Ekonomi Nontambang

Keterlibatan masyarakat dalam pekerjaan pada industri pariwisata masih kecil. Hal ini terlihat dari temuan kuantitatif yang menunjukkan bahwa hanya sekitar 8,24% masyarakat di wilayah perlakuan dan 4,59% di wilayah pembandingan bekerja dalam industri pariwisata. Rendahnya keterlibatan masyarakat setempat disebabkan dua alasan utama, yakni (i) minat masyarakat yang masih rendah terhadap bidang pariwisata dan (ii) kondisi industri pariwisata yang belum memadai (pendapatan/upah rendah). Berkaitan dengan minat, mayoritas masyarakat masih memiliki *mining mindset*, yakni bahwa pekerjaan di sektor pertambangan dianggap lebih menarik dari sisi upah dan kebanggaan diri sehingga mereka kurang tertarik untuk bekerja di sektor pariwisata. Temuan kuantitatif mencatat bahwa, di wilayah perlakuan, pendapatan/upah pekerja industri pariwisata lebih kecil

daripada industri nonpariwisata. Secara keseluruhan, studi ini menemukan bahwa faktor penghambat pengembangan industri pariwisata masih dominan jika dibandingkan dengan faktor pendukungnya. Termasuk dalam faktor penghambat tersebut adalah (i) belum terbentuknya kesadaran kolektif berbagai pihak tentang pentingnya pengembangan pariwisata di KSB; (ii) masalah kelembagaan, seperti belum optimalnya peran dan fungsi kelompok sadar wisata (pokdarwis); (iii) masih rendahnya SDM sektor pariwisata; (iv) masih kuatnya *mining mindset*; dan (v) belum maksimalnya pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata. Di sisi lain, ada sejumlah faktor pendukung yang bisa diartikan sebagai sinyal positif dalam pengembangan pariwisata di KSB. Faktor pendukung tersebut adalah, antara lain, (i) iktikad baik pemerintah daerah (pemda) untuk mendorong pengembangan pariwisata yang termanifestasi dalam berbagai peraturan tertulis, (ii) makin mudahnya pengurusan izin usaha bidang *hospitality*, dan (iii) adanya konsolidasi antarpelaku usaha perhotelan di wilayah perlakuan.

Selain industri pariwisata, aspek ekonomi nontambang yang dibahas pada studi ini adalah sektor UMKM. Berdasarkan data kuantitatif, terdapat setidaknya 32,6% penduduk yang bekerja sebagai pengusaha di wilayah perlakuan dan 44,4% di wilayah pembandingan. Namun, beberapa data hasil survei menunjukkan bahwa kondisi UMKM di wilayah studi masih kurang optimal. Kondisi ini dapat dilihat dari beberapa hal berikut. Pertama, mayoritas UMKM pada data kuantitatif berskala mikro dan kecil. Selain itu, pekerja pada usaha yang memiliki minimal satu pekerja dibayar sangat rendah. Kedua, tingkat pendidikan pengusaha masih relatif rendah; sebagian besar berpendidikan SMP ke bawah. Ketiga, usaha yang memiliki izin usaha masih sedikit—hanya 13,04% di wilayah pembandingan dan 21,9% di wilayah perlakuan. Keempat, pengusaha yang pernah mengikuti pelatihan masih sedikit, yakni hanya 7% di wilayah perlakuan dalam setahun terakhir. Pelatihan penggunaan teknologi digital juga masih sangat jarang, padahal beberapa studi menunjukkan adanya pengaruh positif penggunaan teknologi digital terhadap pengembangan usaha. Terakhir, jumlah pemuda yang menjadi pengusaha terlihat sangat rendah, yaitu di bawah 10% pada kedua wilayah studi. Meskipun demikian, kami menemukan tingginya proporsi perempuan, dibandingkan dengan laki-laki, pada kalangan pengusaha muda, khususnya di wilayah perlakuan. Tantangan-tantangan tersebut menyebabkan kondisi UMKM di wilayah studi sulit berkembang. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi-strategi khusus untuk mengembangkan potensi UMKM sebagai salah satu alternatif sumber ekonomi nontambang di wilayah studi.

Aspek Infrastruktur Ekonomi

Infrastruktur ekonomi terdiri atas infrastruktur fisik dan nonfisik. Infrastruktur fisik penunjang kegiatan ekonomi berupa jalan, listrik, internet, dan pasar telah tersedia secara memadai baik di wilayah perlakuan maupun wilayah pembandingan. Sebagian besar jalan menuju—atau yang berada di sekitar—rumah responden di wilayah perlakuan sudah berupa jalan beraspal/beton. Secara umum, mayoritas jalan di sekitar rumah responden di wilayah studi sudah cukup baik. Kalaupun ada sebagian jalan yang rusak, kondisinya hanya rusak ringan. Situasi ini lebih baik daripada situasi di wilayah pembandingan. Dalam hal infrastruktur listrik, sebagian besar responden di kedua wilayah telah mendapatkan akses listrik dengan kualitas baik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Capaian akses yang baik juga didapati pada penggunaan internet. Sebagian besar responden di kedua wilayah telah mengakses internet dengan kualitas baik. Dalam hal infrastruktur fisik berupa pasar,

masih ada persoalan keterbatasan fasilitas pasar serta persaingan usaha antara toko kelontong tradisional dan supermarket/minimarket. Situasi infrastruktur nonfisik berupa lembaga keuangan menunjukkan adanya persoalan literasi dan inklusi keuangan. Meskipun berbagai lembaga keuangan telah tersedia di sebagian besar kecamatan di wilayah studi, lebih dari 50% penduduk tidak memiliki rekening tabungan. Di samping itu, masih ada penduduk yang memanfaatkan sumber pinjaman dengan bunga dari perseorangan ataupun berutang untuk tujuan jangka pendek berupa gaya hidup, dan ada pula pelaku usaha yang tidak/belum memanfaatkan kredit usaha kendati mungkin memerlukannya.

Aspek Infrastruktur Dasar

Pada aspek infrastruktur dasar, kita akan melihatnya berdasarkan dua indikator, yaitu akses rumah tangga terhadap air minum layak dan sanitasi layak. Di kedua wilayah studi, akses rumah tangga terhadap dua hal tersebut terbilang sudah cukup baik, yakni lebih dari 75% rumah tangga sudah memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi layak. Di kedua wilayah studi, lebih dari 90% rumah tangga memiliki toilet sendiri dan sebagian besar masyarakat memiliki air yang bersumber dari air isi ulang, sumur bor/pompa, dan sumur terlindung.

Meskipun kondisi infrastruktur dasar di kedua wilayah studi sudah cukup baik, masih ada ruang untuk perbaikan. Salah satunya adalah kualitas air. Sekitar 10% rumah tangga menyebutkan bahwa air yang mereka gunakan untuk minum, mandi, maupun mencuci memiliki rasa, dan sekitar 5% rumah tangga memiliki air yang berwarna atau berbau. Di wilayah perbandingan khususnya, sekitar 7% rumah tangga melaporkan bahwa air yang mereka gunakan keruh. Selain itu, air sumur yang digunakan berkapur dan keruh pada musim hujan dan debit air sumur menurun pada musim kemarau. Sementara itu, air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) keruh pada musim hujan. Kualitas air dari Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dinilai baik, tetapi distribusi pipa Pamsimas belum merata ke seluruh wilayah desa.

Aspek Kesehatan

Pada aspek kesehatan, ada beberapa isu yang akan diangkat, yaitu cakupan jaminan dan fasilitas kesehatan, kesehatan ibu dan anak (KIA), serta kesadaran mengenai bahaya merkuri.

Pertama, dalam hal cakupan jaminan dan fasilitas kesehatan, delapan dari sepuluh orang di wilayah perlakuan memiliki jaminan kesehatan. Tingginya cakupan jaminan kesehatan ini merupakan hasil dari dorongan Pemda KSB untuk meningkatkan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Kartu Indonesia Sehat (KIS) sehingga, pada 2017, angkanya mencapai 96,3%. Namun, tampaknya ada ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap institusi kesehatan di wilayah perlakuan. Hal ini tecermin dari fakta bahwa hanya sekitar 25% penduduk yang mengakses fasilitas kesehatan pada saat sakit, terutama karena mereka merasa masih bisa mengobati penyakitnya sendiri dan merasa tidak perlu pergi ke fasilitas kesehatan. Fenomena ini terjadi pada setiap kelompok masyarakat terlepas dari tingkat pendidikan, gender, usia, ataupun status pekerjaannya. Berdasarkan temuan kualitatif, ada ketakutan di tengah masyarakat mengenai bahan kimia yang terkandung dalam obat-obatan yang diberikan tenaga kesehatan dan adanya

ketidakpercayaan terhadap diagnosis dokter sehingga mereka lebih memilih pengobatan herbal.

Meskipun demikian, fasilitas kesehatan tingkat pertama berperan sangat penting dalam meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat. Dari sejumlah fasilitas kesehatan yang ada, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan dokter/bidan/perawat mandiri masih menjadi fasilitas kesehatan utama yang diakses penduduk pada saat sakit, meskipun keterbatasan dokter spesialis di puskesmas masih menjadi tantangan utama bagi fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Isu kedua adalah KIA. Kondisi KIA sudah baik berkat peran fasilitas kesehatan tingkat pertama. Data kuantitatif menunjukkan bahwa mayoritas perempuan sudah mengikuti praktik persalinan aman, baik di wilayah perlakuan maupun wilayah pembanding. Proses persalinan ibu di wilayah perlakuan dilakukan di fasilitas kesehatan, seperti puskesmas, pondok bersalin desa (polindes), puskesmas pembantu (pustu), ataupun bidan praktik. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan tingkat pertama di wilayah perlakuan sudah cukup baik sehingga dapat melayani pasien bersalin dan aksesnya pun cukup mudah. Terkait kesehatan anak, capaian pemberian air susu ibu (ASI) hingga bayi berusia dua tahun sebenarnya sudah cukup tinggi, yakni 91,4% di wilayah perlakuan dan 84,4% di wilayah pembanding. Namun, capaian pemberian ASI eksklusif tergolong masih rendah; hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran ibu tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif. Di sisi lain, persentase anak usia di bawah lima tahun (balita) yang rutin dibawa ke pos pelayanan terpadu (posyandu) sangat tinggi, yakni 95,6% di wilayah perlakuan dan 97,5% di wilayah pembanding. Rutinnya kegiatan ibu membawa balitanya ke posyandu dapat berkontribusi pada peningkatan pengetahuan ibu tentang gizi dan pencegahan *stunting*¹ yang kasusnya saat ini masih ditemukan di KSB.

Isu ketiga tentang kesadaran masyarakat akan bahaya merkuri tampaknya masih menjadi tantangan bagi wilayah perlakuan dan pembanding. Hanya sekitar 48% penduduk di wilayah perlakuan dan 28% penduduk di wilayah pembanding mengaku mengetahui bahaya merkuri. Dengan angka itu pun sesungguhnya masyarakat lebih banyak mengetahui bahaya merkuri yang bersumber dari penggunaan kosmetik, bukan akibat tambang ilegal. Penyuluhan tentang bahaya merkuri tampaknya juga sangat terbatas. Hanya terdapat sekitar 5% masyarakat di wilayah pembanding dan 8% masyarakat di wilayah perlakuan yang mendapatkan penyuluhan ataupun informasi tentang bahaya merkuri. Sumber informasinya lebih banyak berasal dari internet, teman/keluarga, dan lembaga-lembaga yang tidak secara khusus melakukan penyuluhan tentang bahaya merkuri.

¹*Stunting* atau kondisi pendek ditandai dengan kurangnya tinggi/panjang badan menurut umur anak. Kondisi *stunting* disebabkan masalah gizi yang berlangsung lama atau masalah gizi kronis (Kementerian Kesehatan, 2019). Nilai ukurannya biasanya dinyatakan dalam bentuk *z-score* tinggi badan per umur (*height-for-age z-score*, HAZ). Seorang anak disebut mengalami *stunting* jika standar deviasi HAZ-nya kurang dari -2 (WHO, 2006).

Aspek Kerentanan Sosial dan Lingkungan

Pada aspek kerentanan sosial dan lingkungan, ada beberapa isu yang akan diangkat, yaitu kelompok perempuan yang masih dapat dikategorikan rentan secara sosial, partisipasi sosial seluruh penduduk, dan proses pengelolaan sampah rumah tangga.

Pada isu pertama, studi ini menemukan bahwa masih ada sekitar 10% perempuan yang menikah dini, yakni perempuan usia 20–24 tahun yang telah menikah sebelum berusia 18 tahun, baik di wilayah perlakuan maupun pembanding. Secara umum, perempuan paling banyak menikah pada usia 18–26 tahun, tetapi masih ada juga perempuan yang bahkan menikah pada usia 12 tahun. Praktik pernikahan dini ini lebih besar proporsinya pada perempuan yang berpendidikan relatif rendah. Oleh karena itu, kunci untuk menghapuskan praktik pernikahan dini adalah peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan tinggi. Berdasarkan temuan kualitatif, sebagian besar anak yang duduk di bangku SMP dan SMA dinikahkan karena adanya kehamilan yang tidak terduga, padahal unit keluarga penduduk yang menikah pada usia terlalu dini akan lebih rentan secara sosial dan ekonomi.

Isu kedua berkaitan dengan kesetaraan gender. Pada bagian ini, pembahasan hanya memasukkan indikator proporsi perempuan yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan.

Berdasarkan survei rumah tangga, otoritas yang dimiliki perempuan dalam menentukan hal-hal pribadi yang berhubungan dengan dirinya masih cukup rendah, yakni 46% di wilayah perlakuan dan 52% di wilayah pembanding. Perempuan dinyatakan memiliki otoritas jika memenuhi tiga indikator: (i) mampu mengatakan tidak kepada pasangan pada saat tidak ingin berhubungan seksual, (ii) memutuskan penggunaan alat kontrasepsi oleh diri sendiri atau bersama pasangan, dan (iii) memutuskan sendiri—atau bersama pasangan/kerabat—layanan kesehatan untuk diri sendiri. Dari tiga indikator tersebut, mayoritas perempuan berandil dalam memutuskan penggunaan alat kontrasepsi dan layanan kesehatan yang diinginkan (seperti proses melahirkan dan penggunaan obat-obatan). Namun, masih ada cukup banyak perempuan yang tidak mampu mengatakan tidak kepada pasangannya pada saat tidak ingin berhubungan seksual.

Isu ketiga adalah partisipasi sosial penduduk yang merupakan salah satu cerminan terlaksananya peranan sosial sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Tingkat partisipasi sosial di wilayah studi terbilang rendah. Namun, tingkat partisipasi dalam menyuarakan pendapat secara aktif sudah cukup baik. Dalam hal keikutsertaan dalam rapat warga, keterlibatan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan baik di wilayah perlakuan maupun wilayah pembanding. Hal yang sama terjadi pada partisipasi sosial dalam hal kemampuan mengeluarkan pendapat dalam rapat; proporsi laki-laki yang berani menyuarakan pendapatnya lebih tinggi daripada perempuan. Namun, dalam hal aktivitas sosial, seperti kegiatan keagamaan, gotong royong, arisan, atau upacara kematian, keterlibatan perempuan lebih tinggi daripada laki-laki, khususnya di wilayah perlakuan. Selain berdasarkan gender, partisipasi sosial masyarakat juga berbeda antartingkat pendidikan dan antarkelompok usia.

Isu keempat mengenai pengelolaan sampah rumah tangga adalah cerminan kerentanan lingkungan yang dialami rumah tangga. Hasil studi kami menunjukkan bahwa praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan masih belum banyak dilakukan rumah tangga di kedua wilayah studi. Temuan studi memperlihatkan bahwa rumah tangga yang melakukan pemilahan sampah organik dan nonorganik dan rumah tangga yang mendapatkan penyuluhan tentang praktik pemilahan/daur ulang sampah masih sedikit. Di sisi lain, masih ditemukan praktik pembakaran sampah yang membahayakan lingkungan dan berpotensi membahayakan rumah tangga itu sendiri. Berdasarkan temuan kualitatif, kesadaran pengelolaan sampah bergantung pada faktor-faktor, antara lain, tingkat pendidikan KRT dan pernah/tidaknya rumah tangga mendapatkan pelatihan pengelolaan sampah. Sebagai contoh, rumah tangga yang telah mendapatkan informasi mengenai pengelolaan sampah akan melakukan pemilahan dan membuat sampah tersebut menjadi pupuk organik. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan pengelolaan sampah yang berkelanjutan perlu ditingkatkan dan diperluas jangkauan penerima manfaatnya sehingga masyarakat dapat memahami dan mempraktikkan pengelolaan sampah dengan benar.

Penutup

Rekomendasi

Rekomendasi studi ini disusun dengan target untuk pencapaian tujuan kesejahteraan komunitas lingkaran tangkas baik secara sosial maupun ekonomi. Dengan melihat hasil analisis sosioekonomi masyarakat dan mempertimbangkan peran tanggung jawab sosial Amman, kami menyusun sejumlah strategi. Ada tiga strategi dalam upaya pencapaian kesejahteraan sosial, yakni (i) menguatkan sistem layanan kesehatan, (ii) menguatkan sistem layanan pendidikan formal, dan (iii) meningkatkan kualitas SDM. Sementara itu, dalam upaya pencapaian kesejahteraan ekonomi, ada dua strategi, yaitu (i) mengembangkan potensi industri pariwisata dan (ii) menyediakan dukungan bagi usaha mikro dan kecil (UMK). Selanjutnya, setiap strategi dilengkapi dengan langkah-langkah dan pihak-pihak yang hendak disasar.

Masukan untuk Studi Selanjutnya

Studi selanjutnya perlu memperhatikan aspek teknis dan substantif. Aspek teknis berkaitan erat dengan pelaksanaan studi yang perlu mempertimbangkan waktu-waktu tertentu agar tidak mengganggu proses pengumpulan data di lapangan. November dan Desember perlu dihindari karena bertepatan dengan ulang tahun KSB dan masa libur akhir tahun. Waktu pelaksanaan studi juga perlu memperhitungkan lini masa studi lainnya agar pelaksanaannya tidak bentrok. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kejenuhan masyarakat yang menjadi responden/informan; kejenuhan mereka dapat berimplikasi pada kualitas data di lapangan.

Sementara itu, aspek substantif berhubungan dengan isu-isu strategis yang bisa dijadikan fokus dalam pelaksanaan studi selanjutnya. Aspek substantif disusun untuk pendalaman terkait temuan-temuan isu dalam studi ini yang menimbulkan keprihatinan cukup besar. Ada enam isu yang bisa menjadi fokus Amman untuk studi selanjutnya, yaitu:

- a) pengembangan industri pariwisata,
- b) pengembangan UMK,

- c) kualitas pembelajaran,
- d) pemetaan status gizi balita tingkat desa dan kecamatan,
- e) pembangunan sosial dan ekonomi daerah, dan
- f) pentingnya melakukan studi *endline* dengan menggunakan responden dan instrumen yang sama/serupa agar kondisi sosioekonomi masyarakat bisa dibandingkan dan dampak berbagai program pengembangan masyarakat bisa diukur.

I. Tentang Studi ini

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sangat fluktuatif, setidaknya dalam lima tahun terakhir. Produk domestik regional bruto (PDRB) KSB pada 2016 mencapai 7,02%, tetapi turun drastis ke angka -34,6% pada 2018. Kemudian, angka pertumbuhan ekonominya pada 2021 adalah -0,33%. Fluktuasi yang tinggi pada pertumbuhan ekonomi KSB terutama disebabkan oleh fluktuasi pertumbuhan pada sektor pertambangan. Dalam lima tahun terakhir, pertambangan menjadi sektor kunci pertumbuhan ekonomi KSB dengan proporsi 76%–87% dari keseluruhan PDRB. Hal ini menimbulkan pertanyaan lebih dalam bagaimana potret sosial dan ekonomi komunitas lingkaran tambang di KSB saat ini.

Selanjutnya, data BPS juga menunjukkan tingginya tingkat kemiskinan KSB yang berada di atas rerata nasional. Dalam 5 tahun terakhir, angka kemiskinan memang mengalami penurunan, tetapi pada 2019 angkanya masih sebesar 13,9%; hal ini berarti bahwa lebih dari 20.000 orang di KSB hidup dalam kemiskinan. Kendati demikian, aspek pembangunan manusia di KSB sebenarnya relatif lebih baik daripada Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), meski masih berada di bawah angka nasional. Indeks pembangunan manusia (IPM) KSB meningkat secara konsisten sejak 2016 dan pada 2019 mencapai 71,52. Diduga relatif tingginya IPM tersebut disebabkan oleh tingkat pendidikan dan standar kelayakan hidup di KSB yang juga tinggi.

Berkaitan dengan uraian dan data di atas, dapat kita simpulkan bahwa KSB memiliki dinamika kesejahteraan yang bervariasi dan sangat menarik untuk didalami. Ditambah dengan tingginya kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB kabupaten ini, maka The SMERU Research Institute (SMERU) bekerja sama dengan Departemen Social Impact Amman tertarik untuk melaksanakan studi yang mengangkat topik “Asesmen Pendahuluan: Kondisi Sosioekonomi Komunitas Lingkaran Tambang di Kabupaten Sumbawa Barat”.

Asesmen ini diharapkan akan dapat menghasilkan pemetaan kondisi sosioekonomi masyarakat lingkaran tambang. Selain itu, asesmen ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi program pengembangan masyarakat yang akan dilaksanakan di wilayah lingkaran tambang dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan warga KSB pada umumnya dan masyarakat lingkaran tambang pada khususnya.

1.2 Tujuan Studi

Studi ini berupaya menyajikan gambaran data awal (*baseline*) untuk memetakan kondisi dan isu sosioekonomi masyarakat di sekitar lingkaran tambang. Selain itu, laporan studi ini dapat menjadi basis masukan bagi program pengembangan masyarakat yang akan atau sedang dikembangkan di wilayah sekitar lingkaran tambang. Data *baseline* ini nantinya dapat digunakan sebagai pembandingan untuk melihat perubahan sejumlah indikator

kesejahteraan dan mengukur dampak sejumlah program pada studi akhir (*endline*) pada masa yang akan datang. Sebagai catatan, studi ini belum melihat dampak industri pertambangan secara keseluruhan terhadap penghidupan masyarakat di KSB. Namun, studi ini secara khusus memiliki tujuan berikut.

- a) Mengumpulkan serta menganalisis data *baseline* untuk menelaah kondisi sosioekonomi masyarakat lingkaran tambang dengan menggunakan beberapa indikator kesejahteraan yang diadaptasi dari standar nasional dan internasional
- b) Menyusun rekomendasi masukan bagi program pengembangan masyarakat yang sedang dan akan dilaksanakan di wilayah sekitar lingkaran tambang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.3 Landasan Konseptual

Kondisi sosioekonomi masyarakat tidak lepas dari konsep kesejahteraan sosial dan kesejahteraan ekonomi. Kesejahteraan ekonomi sendiri sebenarnya berkaitan erat dengan konsep kesejahteraan sosial; pada akhirnya, keduanya dapat digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan secara umum. Pada tingkat makro, kedua konsep dapat digunakan untuk melihat sejauh mana sebuah pembangunan ekonomi dan sosial berjalan di suatu wilayah. Konsep kesejahteraan ekonomi yang mempertimbangkan aspek sosial ini dipelopori oleh Amartya Sen (1983) yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi yang diukur melalui pendapatan atau keseluruhan produksi barang dan jasa harus mempertimbangkan aspek kemampuan individu (*human capabilities*) dan kesejahteraan (*entitlements*) yang didapatkan dari kemampuan tersebut. Kesejahteraan yang dimaksud di sini adalah hal-hal, seperti kesehatan, pendidikan, dan juga kondisi terbebas dari kemiskinan.

Kondisi ekonomi biasanya diukur melalui pendapatan dan hal-hal yang berkaitan dengan indikator ekonomi, seperti pengeluaran, pekerjaan, aset, dan hal-hal lain yang bersifat material. Pada skala makro, makin baik kondisi ekonomi sebuah negara (diukur melalui produk domestik bruto/PDB), makin memungkinkan bagi negara tersebut untuk memiliki taraf kesehatan, tingkat pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lain yang lebih baik (Mankiw, 2016). Prinsip yang sama berlaku pada skala rumah tangga. Rumah tangga dengan pendapatan lebih tinggi atau pekerjaan lebih layak lebih mungkin memiliki taraf kesehatan, tingkat pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan dasar yang lebih baik.

Dalam Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai “kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Sementara itu, fungsi sosial—atau lebih dikenal dengan istilah keberfungsian sosial—didefinisikan sebagai “suatu kondisi yang memungkinkan individu, kelompok, dan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya, melaksanakan tugas dan peranan sosialnya, serta mampu mengatasi masalah dalam kehidupannya” (Pasal 1 UU No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial). Berdasarkan definisi tersebut, konsep kesejahteraan sosial dapat disederhanakan menjadi pemenuhan kebutuhan dasar, terlaksananya peranan sosial, dan teratasinya permasalahan hidup seorang individu ataupun sebuah keluarga.

Pemenuhan kebutuhan dasar lekat dengan pemenuhan materi yang dapat diukur melalui kondisi ekonomi. Sementara itu, terlaksananya peranan sosial dapat diterjemahkan sebagai partisipasi aktif individu dalam aktivitas masyarakat—sosial, ekonomi, maupun politik—sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan sosialnya (Narayan, 2002). Kemampuan mengatasi permasalahan sosial, seperti kemiskinan, dapat dipengaruhi oleh, antara lain, kemampuan ekonomi seseorang yang dalam konteks ini sering disebut keberdayaan. Berdaya atau tidaknya seorang individu dapat dilihat dari aksesnya terhadap peluang ekonomi serta kemampuannya untuk keluar dari situasi kerentanan. Di sisi lain, aspek lingkungan hidup perlu diperhitungkan dalam pengukuran kondisi sosioekonomi masyarakat, sebagaimana tercatat sebagai salah satu pilar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), karena kesejahteraan masyarakat tidak lepas dari kondisi lingkungan. Lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan akan mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dalam studi ini, kondisi kesejahteraan sosioekonomi akan dianalisis dari berbagai macam aspek turunan dari konsep kesejahteraan sosial dan ekonomi. Selain mempertimbangkan landasan teoretis, aspek-aspek tersebut juga mempertimbangkan kerangka kerja, termasuk Theory of Change (ToC) dari Departemen Social Impact Amman sebagai dasar implementasi program pengembangan masyarakat yang dilaksanakan Amman. Pada kerangka kerja tersebut, terdapat tiga pilar utama dalam pelaksanaan program pengembangan masyarakat, yaitu (i) peningkatan sumber daya manusia (SDM), (ii) pemberdayaan ekonomi, dan (iii) pariwisata berkelanjutan. Tiga pilar tersebut menjadi landasan untuk mencapai tujuan besar program pengembangan masyarakat, yakni menyiapkan ekosistem bagi komunitas di sekitar lingkaran tambang agar tangguh menghadapi masa depan. Tak hanya kerangka kerja program pengembangan masyarakat, nilai atau prinsip dalam beberapa dokumen terkait program pengembangan masyarakat, seperti TPB; International Council on Mining and Metals (ICMM); International Organization for Standardization (ISO) 26000; Environmental, Social, and Governance (ESG); Program for Pollution Control, Evaluation, and Rating (PROPER); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) KSB; serta visi dan misi—termasuk ToC—Amman juga dijadikan pertimbangan untuk penentuan indikator kesejahteraan dalam studi ini. Perlu dicatat bahwa daftar indikator yang disusun didominasi oleh indikator yang bersifat hasil/capaian (*outcome*) atau setidaknya merupakan keluaran (*output*).

Berdasarkan latar belakang tersebut, kondisi sosioekonomi dalam studi ini digambarkan dalam 7 aspek kesejahteraan dan 70 indikator yang mengacu kepada dokumen-dokumen yang disebutkan pada paragraf sebelumnya. Oleh karena itu, rekomendasi untuk program pengembangan masyarakat di bagian akhir laporan juga akan mengacu kepada konsep kesejahteraan sosial dan ekonomi yang sesuai dengan kerangka pikir studi ini. Dalam laporan ini, indikator yang dimasukkan ke dalam analisis adalah beberapa indikator pilihan yang dinamikanya di wilayah studi menarik untuk ditelusuri lebih jauh, sementara tabel-tabel data setiap indikator akan disajikan di bagian Lampiran. Ringkasan aspek dan subaspek yang dimasukkan ke dalam laporan ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Aspek, Subaspek, dan Indikator

No.	Aspek	Subaspek/Indikator
1	Kesehatan	Cakupan jaminan kesehatan
		Akses terhadap fasilitas kesehatan saat sakit
		Pemanfaatan jaminan kesehatan saat sakit
		Persalinan aman
		Pemberian air susu ibu (ASI) dan kegiatan pos pelayanan terpadu (posyandu)
		Kebiasaan merokok
		Pengetahuan penduduk mengenai bahaya merkuri
2	Pendidikan	Rata-rata lama sekolah
		Angka partisipasi murni (APM) tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan perguruan tinggi
3	Infrastruktur dasar	Akses terhadap air minum layak
		Akses terhadap sanitasi layak
4	Ketenagakerjaan	Persentase tenaga kerja
		Rata-rata upah
		Persentase pengangguran
5	Infrastruktur ekonomi	Akses terhadap internet
		Akses terhadap lembaga perbankan
6	Pengembangan ekonomi sektor nontambang	Persentase pekerja sektor pariwisata
		Persentase pekerja sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
7	Kerentanan sosial dan lingkungan	Pernikahan dini
		Suara perempuan dalam pengambilan keputusan bidang kesehatan
		Partisipasi sosial
		Toleransi
		Pengelolaan sampah rumah tangga

1.4 Metodologi²

Studi ini dilakukan di KSB sebagai wilayah perlakuan (*treatment*) yang menjadi fokus utama penelitian dan Kabupaten Sumbawa sebagai wilayah pembanding (*control*). Dua tipologi wilayah studi ini sangat penting karena, ke depannya, data *baseline* ini akan

²Perincian metodologi yang lebih lengkap dapat dilihat pada laporan persiapan awal (*inception report*).

digunakan juga sebagai alat untuk mengukur dampak program pengembangan masyarakat. Wilayah perlakuan merupakan wilayah studi di sekitar lingkaran tambang tempat program pengembangan masyarakat nantinya akan dilaksanakan, sedangkan wilayah pembanding adalah wilayah studi dengan karakteristik yang mirip dengan wilayah perlakuan, tetapi bukan wilayah utama yang akan menerima manfaat program .

Gambar 1. Wilayah Studi



Catatan: Tidak semua desa dan kecamatan di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat dijadikan fokus utama wilayah studi, melainkan hanya beberapa kecamatan dan desa saja.

Nama kecamatan studi dalam laporan ini disamarkan dengan menggunakan alfabet A, B, C, dan seterusnya (misalnya, Kecamatan A dan Kecamatan B). Adapun desa studi, penyebutan namanya disamarkan dengan menggunakan alfabet dan angka Arab (misalnya, Desa A1, Desa A2, Desa B1, dan Desa B2).

Studi ini menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kedua pendekatan bersifat saling melengkapi sehingga diharapkan dapat menghasilkan analisis data sosioekonomi yang lebih komprehensif. Pengumpulan data dengan dua pendekatan tersebut dilakukan pada November 2022. Setelah pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif, tim peneliti menganalisis hasilnya dan memanfaatkan sumber data sekunder yang relevan, seperti data dari BPS dan lembaga/institusi lainnya.

1.4.1 Pendekatan Kuantitatif

a) Wilayah Studi Kuantitatif

Khusus untuk wilayah studi kuantitatif di wilayah perlakuan, tim peneliti berfokus pada kecamatan sekitar lingkaran tambang Amman, ditambah dengan beberapa kecamatan lain di KSB yang memiliki potensi besar untuk menerima program pengembangan masyarakat. Sementara itu, untuk wilayah pembanding, tim peneliti memilih Kabupaten Sumbawa

setelah sebelumnya melihat beberapa indikator makroekonomi yang tersedia (dari BPS), ditambah dengan pertimbangan berdasarkan hasil diskusi dengan Tim Social Impact Amman. Untuk wilayah pembanding ini, pemilihan kecamatan memperhatikan kriteria-kriteria:

- (1) kecamatan tersebut belum menjadi kecamatan prioritas program pengembangan masyarakat Tim Social Impact Amman,
- (2) kecamatan tersebut tidak sedang menerima program pengembangan masyarakat dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) ataupun perusahaan lain, dan
- (3) kecamatan tersebut memiliki karakteristik wilayah yang serupa dengan kelompok/kecamatan perlakuan.

Berdasarkan kriteria di atas, terpilihlah sembilan kecamatan studi yang terbagi atas enam kecamatan perlakuan (Kecamatan A, B, C, D, E, dan F) dan tiga kecamatan pembanding (Kecamatan G, H, dan I). Pemilihan akhir kecamatan studi juga sudah melalui tahapan verifikasi data secara langsung (kunjungan lapangan) oleh peneliti daerah guna memastikan bahwa kecamatan terpilih sudah sesuai dengan kriteria wilayah perlakuan dan wilayah pembanding tim kuantitatif.

b) Pemilihan Responden dan Instrumen Kuantitatif

Tim kuantitatif melakukan pengumpulan data melalui survei tatap muka pada tingkat rumah tangga dengan metode *random sampling*. Dengan metode ini, rumah tangga dipilih secara acak; artinya, setiap rumah tangga di wilayah studi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel/responden.

Jumlah responden ditentukan berdasarkan jumlah populasi rumah tangga di KSB, yakni 36.932 rumah tangga, dan jumlah rumah tangga di 6 kecamatan terpilih, yakni 28.183 rumah tangga (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat, 2022). Kemudian, merujuk kepada rumus Slovin (Adanza, 1962) dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau batas galat 5%, diperlukan minimum sampel sebanyak 395 rumah tangga untuk merepresentasikan 6 kecamatan di KSB yang menerima manfaat program. Guna memperkuat keterwakilan pada kecamatan perlakuan, tim peneliti menetapkan secara keseluruhan 600 responden di wilayah tersebut. Untuk jumlah sampel per kecamatan, tim peneliti mengutamakan Kecamatan A, B, dan C yang berbatasan langsung dengan lingkaran tambang, sedangkan sisanya ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah rumah tangga di Kecamatan D, E, dan F.

Rumus dengan batas galat serupa diterapkan untuk menghitung kebutuhan jumlah responden di wilayah pembanding. Tim peneliti memutuskan untuk menetapkan secara keseluruhan 400 responden dengan pembagian secara proporsional per kecamatan menurut jumlah rumah tangga di Kecamatan G, H, dan I. Diharapkan bahwa dengan melakukan strategi ini, tim peneliti nantinya akan lebih mudah melihat perubahan *output/outcome* antara kelompok perlakuan dan kelompok pembanding pada studi *endline*.

Selain itu, rumah tangga terpilih di kedua wilayah studi harus dipastikan memiliki dua dari tiga kriteria: (i) memiliki anak usia sekolah (5–17 tahun), (ii) memiliki anggota rumah

tangga usia muda (16–30 tahun), dan (iii) memiliki anggota rumah tangga perempuan berusia 6–49 tahun yang pernah menikah/melahirkan. Ketiga kriteria ditetapkan berdasarkan kriteria program pengembangan masyarakat yang sering digunakan Amman.

Selanjutnya, dalam proses pengumpulan data melalui survei, tim kuantitatif menggunakan kuesioner khusus yang dapat mengumpulkan sejumlah informasi penting dan relevan pada studi *baseline* ini. Informasi penting tersebut dikelompokkan dalam beberapa modul penelitian; setiap modul terdiri atas beberapa pertanyaan. Modul-modul tersebut dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Kerangka Kuesioner Survei Kuantitatif

Modul	Keterangan	Deskripsi	Tingkat
E	Kelayakan rumah tangga	Berisi informasi tentang kelayakan rumah tangga. Modul ini berisikan beberapa set pertanyaan untuk memastikan bahwa rumah tangga yang akan didata sesuai dengan kriteria responden yang dibutuhkan.	Rumah tangga
S	Lokasi rumah tangga	Berisi informasi tentang lokasi rumah tangga. Modul ini berisikan beberapa set pertanyaan mengenai alamat lengkap responden serta keterangan tentang responden utama. Selain itu, modul ini akan mencantumkan koordinat lokasi rumah tangga responden guna mempermudah proses pencarian rumah tangga pada survei berikutnya.	Rumah tangga
A	Kelayakan anggota rumah tangga	Berisi informasi tentang kelayakan anggota rumah tangga. Modul ini berisikan beberapa set pertanyaan untuk memastikan siapa saja anggota rumah tangga yang relevan untuk pendataan. Untuk menjadi responden, anggota rumah tangga harus memenuhi kriteria tertentu.	Individu
R	Anggota rumah tangga	Berisi informasi umum tentang anggota rumah tangga, seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, status pernikahan, dsb. Apabila anggota rumah tangga yang bersangkutan tidak dapat ditemui, penyampaian informasi jawabannya dapat diwakilkan.	Individu
W	Pekerjaan	Berisi informasi mengenai anggota rumah tangga berusia lima tahun ke atas dalam hal aktivitas, pekerjaan, dan kegiatan mereka mencari pekerjaan. Apabila anggota rumah tangga yang bersangkutan tidak dapat ditemui, penyampaian informasi jawabannya dapat diwakilkan.	Individu
P	Pariwisata	Berisi informasi mengenai aktivitas anggota rumah tangga berusia lima tahun ke atas yang terlibat dalam kegiatan ekonomi pariwisata. Penyampaian informasi jawabannya tidak dapat diwakilkan.	Individu
U	UMKM	Berisi informasi mengenai aktivitas anggota rumah tangga berusia lima tahun ke atas yang memiliki	Individu

Modul	Keterangan	Deskripsi	Tingkat
		usaha. Penyampaian informasi jawabannya tidak dapat diwakilkan.	
B	Sosial-budaya	Berisi informasi mengenai aktivitas anggota rumah tangga berusia lima tahun ke atas dalam kegiatan sosial dan budaya di tengah masyarakat. Penyampaian informasi jawabannya tidak dapat diwakilkan.	Individu
K	Kesehatan	Berisi informasi mengenai riwayat kesehatan sederhana anggota rumah tangga. Apabila anggota rumah tangga yang bersangkutan tidak dapat ditemui, penyampaian informasi jawabannya tidak dapat diwakilkan.	Individu
I	Ibu, anak, dan reproduksi	Berisi informasi mengenai kesehatan ibu, anak, dan reproduksi. Penyampaian informasi jawaban untuk modul ini tidak dapat diwakilkan, tetapi informasi tentang anak bawah lima tahun (balita) perlu dijawab oleh orang dewasa yang mengasuh balita tersebut.	Individu
H	Rumah tangga	Berisi keterangan tentang kondisi tempat tinggal dan penghidupan keluarga.	Rumah tangga

c) Analisis Data Kuantitatif

Tim kuantitatif melakukan analisis atas sejumlah indikator sosial dan ekonomi yang telah dihitung sebelumnya dengan menggunakan data primer hasil survei kuantitatif. Perhitungan tersebut kemudian digabungkan dengan beberapa data sekunder serta data yang telah dikumpulkan tim kualitatif. Termasuk dalam penggabungan ini adalah melakukan analisis deskriptif dengan menggunakan data-data tersebut. Selain itu, tim kuantitatif juga melakukan beberapa uji statistik sederhana untuk melihat hubungan ataupun perbedaan antara satu indikator dan indikator lainnya. Diharapkan bahwa, dengan melakukan hal ini, hasil analisis laporan tim kuantitatif bisa melihat isu dan gambaran sosioekonomi di wilayah studi secara lebih mendalam.

1.4.2 Metode Kualitatif

a) Wilayah Studi Kualitatif

Pengumpulan data kualitatif dilakukan di wilayah perlakuan dan pembanding. Dari semua kecamatan perlakuan kuantitatif, dipilih dua kecamatan sebagai wilayah studi perlakuan kualitatif. Kemudian, pada setiap kecamatan terpilih, dipilih satu desa. Dengan demikian, wilayah perlakuan studi kualitatif terdiri atas dua kecamatan dan dua desa di KSB. Sementara itu, pengumpulan data kualitatif pada wilayah pembanding dilakukan hanya pada salah satu desa di wilayah pembanding kuantitatif. Pemilihan kecamatan dan desa pada wilayah perlakuan maupun pembanding dilakukan secara *purposive* dengan pertimbangan tertentu (Tabel 3).

Tabel 3. Pemilihan Kecamatan dan Desa Wilayah Studi Kualitatif

Wilayah	Kecamatan	Desa	Keterangan
Perlakuan	A	A3	Wilayah dengan karakteristik rural
			Sektor penghidupan masyarakat terutama adalah pertanian. Desa dengan potensi wisata
Perlakuan	C	C2	Wilayah dengan karakteristik urban
			Sektor penghidupan masyarakat terutama adalah perdagangan, UMKM, dan jasa. Masyarakatnya beragam, termasuk pendatang yang bekerja/menjalankan usaha pada sektor tambang/sektor pendukungnya.
Pembanding	H	H4	Kecamatan yang kondisi penunjang penghidupannya paling mirip dengan kecamatan perlakuan berdasarkan data Pendataan Potensi Desa (Podes) dari BPS
			Desa dengan karakteristik sektor penghidupan yang mirip dengan desa perlakuan, yaitu pertanian, perdagangan, UMKM, dan jasa

b) Informan Studi Kualitatif

Tim kualitatif memulai pengumpulan data primer kualitatif dengan melakukan wawancara secara daring terhadap tiga mitra program Amman yang mewakili tiga pilar kegiatan program pengembangan masyarakat. Selanjutnya, dilakukan pengumpulan data primer kualitatif secara tatap muka di lokasi studi. Pada wilayah perlakuan, pengumpulan data primer kualitatif dilakukan pada informan tingkat rumah tangga, desa, kecamatan, dan kabupaten. Sementara itu, pada wilayah pembandingan, pengumpulan data kualitatif dilakukan pada informan tingkat rumah tangga dan desa. Pengumpulan data dimulai dari wilayah perlakuan, yaitu mewawancarai informan tingkat rumah tangga, desa, dan kecamatan baik di Kecamatan A maupun Kecamatan C. Sesudah itu, dilakukan pengumpulan data pada tingkat kabupaten. Selanjutnya, dilakukan pengumpulan data pada wilayah pembandingan Desa H4. Secara keseluruhan, terdapat 47 informan (lembaga dan individu) yang diwawancarai tim kualitatif.

Informan di setiap wilayah dan tingkat dipilih berdasarkan kebutuhan data. Dengan menggunakan panduan wawancara yang telah disiapkan sebelumnya, dilakukan wawancara mendalam terhadap setiap informan terpilih; tujuannya adalah mengumpulkan informasi mengenai aspek tertentu. Pengumpulan data primer ini disertai pengumpulan data sekunder yang relevan. Tabel 4 memperlihatkan informan kualitatif beserta aspek yang dialami pada wawancara pengumpulan data.

Tabel 4. Informan Kualitatif dan Tujuan Wawancara

Tingkat	Kategori	Informan	Aspek yang Didalami pada Saat Wawancara
	Mitra program Amman	Bije Jari United Tractors (UT) School Narasa	Mengetahui dinamika program pengembangan masyarakat dan potensi ekonomi daerah
Kabupaten	Dinas	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)	Pengembangan ekonomi sektor nontambang
		Dinas Pendidikan	Pendidikan
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)	Ketenagakerjaan
		Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga	Pengembangan ekonomi sektor nontambang
		Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag)	Pengembangan ekonomi sektor nontambang
	Dinas Kesehatan	Kesehatan	
	Asosiasi pelaku usaha	Forum Komunikasi UMKM (FK-UMKM)	Pengembangan ekonomi sektor nontambang
	Lembaga pendidikan	Sekolah—sekolah menengah kejuruan (SMK)	Pendidikan
	Lembaga pengelola donasi untuk kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat ^a	Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)	Infrastruktur ekonomi
Kecamatan	Lembaga pendidikan	Sekolah—SMP	Pendidikan
	Layanan kesehatan	Pusat kesehatan masyarakat (puskesmas)	Kesehatan, kerentanan sosial dan lingkungan, infrastruktur dasar
	Layanan keuangan	Koperasi dengan layanan keuangan untuk UMKM	Infrastruktur ekonomi
Desa	Pemerintah desa	Pemerintah desa	Pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kerentanan sosial dan lingkungan, pengembangan ekonomi sektor nontambang

Tingkat	Kategori	Informan	Aspek yang Didalami pada Saat Wawancara
	Tokoh masyarakat	Tokoh Masyarakat (laki-laki)	Kesehatan, infrastruktur dasar, ketenagakerjaan, kerentanan sosial dan lingkungan
		Tokoh Masyarakat (perempuan)	
	Tokoh pemuda	Pemuda (laki-laki)	Ketenagakerjaan, infrastruktur ekonomi, pengembangan ekonomi sektor nontambang
		Pemuda (perempuan)	
Rumah tangga	Rumah tangga	Rumah tangga dengan anak usia sekolah (5–18 tahun) yang sedang bersekolah	Pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, infrastruktur ekonomi, ketenagakerjaan, pengembangan ekonomi sektor nontambang, kerentanan sosial dan lingkungan
		Rumah tangga dengan balita	
		Rumah tangga yang bekerja dan atau berusaha di sektor pariwisata	
		Rumah tangga yang merupakan pemilik usaha	
		Rumah tangga yang bekerja sebagai tenaga kerja formal	

^aTidak tersedia layanan keuangan yang sesuai dengan kriteria informan pada kecamatan perlakuan C sehingga diganti dengan lembaga lain (Baznas) pada tingkat kabupaten.

c) Analisis Data Kualitatif

Triangulasi data dilakukan dengan memeriksa informasi atau data pada aspek yang sama dengan hasil wawancara informan yang berbeda-beda. Triangulasi ditujukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai aspek studi yang dialami dan keabsahan data yang dikumpulkan. Selanjutnya, dilakukan langkah analisis, yaitu memeriksa dan menafsirkan data kualitatif untuk memahami apa yang direpresentasikan data tersebut. Pada studi ini, analisis data kualitatif akan saling melengkapi dengan analisis data kuantitatif. Data kualitatif akan ditampilkan dalam bentuk narasi, kutipan hasil wawancara, dan kotak cerita.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Studi

Pada subbab ini akan dijelaskan ruang lingkup dan batasan studi agar pembaca lebih mudah memahami batas-batas yang digunakan peneliti dalam melakukan analisis. Pertama, terkait wilayah studi, meski tim peneliti melakukan pengambilan data di dua kabupaten (KSB dan Kabupaten Sumbawa), data yang dikumpulkan tidak serta-merta mewakili gambaran di tingkat kabupaten. Data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk

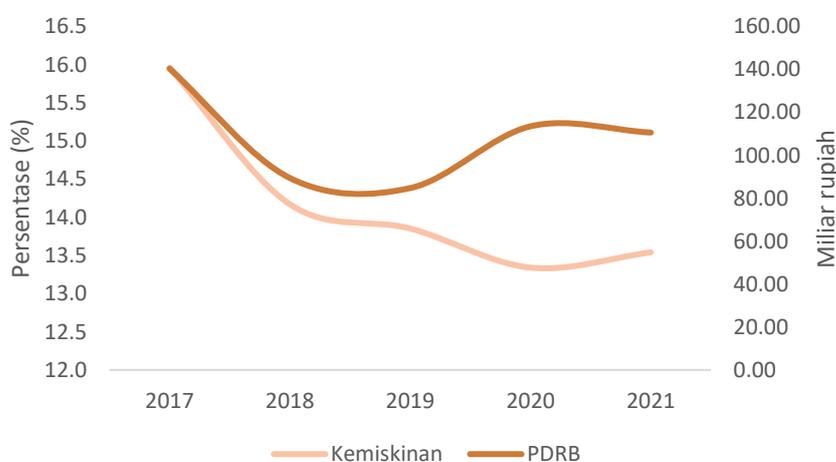
mewakili kelompok penerima manfaat program (perlakuan) dan kelompok bukan penerima manfaat (pembanding). Kedua, dalam memformulasikan sejumlah indikator sosial dan ekonomi untuk keperluan studi secara keseluruhan, tim peneliti mengumpulkan 70 indikator yang sesuai dengan standar nasional dan internasional. Namun, khusus dalam laporan ini, hanya beberapa indikator yang akan dianalisis sesuai dengan pembahasan pada Subbab 1.3. Ketiga, tim peneliti kuantitatif tidak melakukan pendataan pada anggota rumah tangga yang sudah menetap di luar wilayah studi. Dengan demikian, beberapa indikator tidak bisa memberikan gambaran mengenai penduduk dengan kriteria tersebut. Terakhir, sebagaimana disebutkan sebelumnya, studi ini mempertimbangkan beberapa aspek teoretis dan kerangka kerja, termasuk ToC dari Departemen Social Impact Amman sebagai dasar pelaksanaan program perusahaan untuk pengembangan masyarakat, TPB, ICMM, ISO26000, ESG, PROPER, serta RPJMD KSB. Oleh karena itu, pemilihan fokus analisis pada studi ini mengacu kepada dokumen-dokumen tersebut, misalnya pembahasan terkait aspek nontambang yang berfokus pada industri pariwisata dan UMKM.

II. Kondisi Umum Wilayah Studi

2.1 PDRB dan Kemiskinan

Wilayah KSB berada di bagian barat Pulau Sumbawa dan ia merupakan bagian dari Provinsi NTB. Kabupaten ini terdiri atas 8 kecamatan (Sekongkang, Jereweh, Maluk, Taliwang, Brang Ene, Brang Rea, Seteluk, dan Poto Tano) yang terbagi ke dalam 64 desa/kelurahan. Secara makroekonomi, volume PDRB KSB mencapai 110,58 juta rupiah pada 2021 dan merupakan volume PDRB tertinggi di NTB. Pertumbuhan ekonominya sendiri berfluktuasi cukup tajam. Sebagai contoh, pada 2018, pertumbuhan PDRB kabupaten ini pernah menyentuh angka -34,6%, lalu meningkat pesat pada 2020 menjadi hampir 29%. Tingginya volume PDRB ini tidak lepas dari kontribusi sektor pertambangan yang mencapai 82%, dibandingkan dengan seluruh sektor yang ada di KSB (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat, 2022). Meski pertumbuhan ekonomi dan volume PDRB KSB sudah tinggi, tingkat kemiskinannya masih cukup tinggi, yakni 13,5% pada 2021 jika dibandingkan dengan rata-rata nasional (10,14%) meski masih lebih baik apabila dibandingkan dengan tingkat provinsi di angka 14,14%. Dengan kata lain, sekitar 21.500 jiwa penduduk KSB tergolong miskin (Gambar 2).

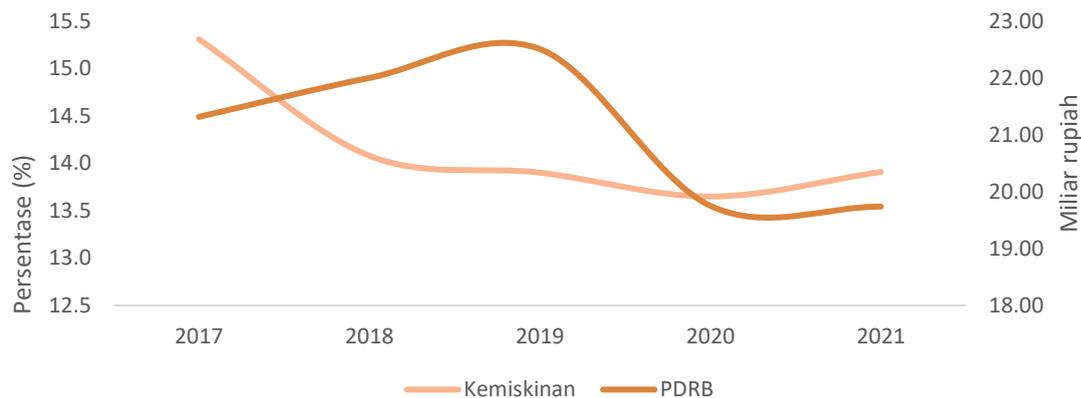
Gambar 2. PDRB dan Tingkat Kemiskinan KSB, 2017–2021



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022; Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat, 2022

Adapun Kabupaten Sumbawa, luas wilayahnya adalah sekitar 6.643 km². Kabupaten ini terdiri atas 24 kecamatan, 157 desa, 8 kelurahan, dan 636 dusun. Perekonomian Sumbawa didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mencapai 39,5% dari keseluruhan PDRB Sumbawa (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa, 2022). Laju pertumbuhan ekonomi Sumbawa memiliki tren yang meningkat, kecuali pada 2020 saat terjadinya pandemi penyakit koronavirus 2019 (COVID-19). Sementara itu, tingkat kemiskinan Sumbawa masih cukup tinggi, meskipun trennya menurun, kecuali situasinya pascapandemi yang terlihat meningkat lagi pada 2021 ke angka 13,9% dengan jumlah warga miskin mencapai 66.000 jiwa (Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2022).

Gambar 3. PDRB dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sumbawa, 2017–2021



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022; Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2022

2.2 Profil Penduduk Hasil Survei

Berdasarkan survei kuantitatif yang kami lakukan, didapatkan 597 rumah tangga di wilayah perlakuan dan 398 rumah tangga di wilayah pembanding dengan jumlah total individu 3.828 orang. Hasil survei kuantitatif kami didominasi rumah tangga di wilayah perlakuan, sebagaimana dijelaskan pada Subbab 1.4.1.

Tabel 5. Jumlah dan Persentase Rumah Tangga dan Penduduk Hasil Survei

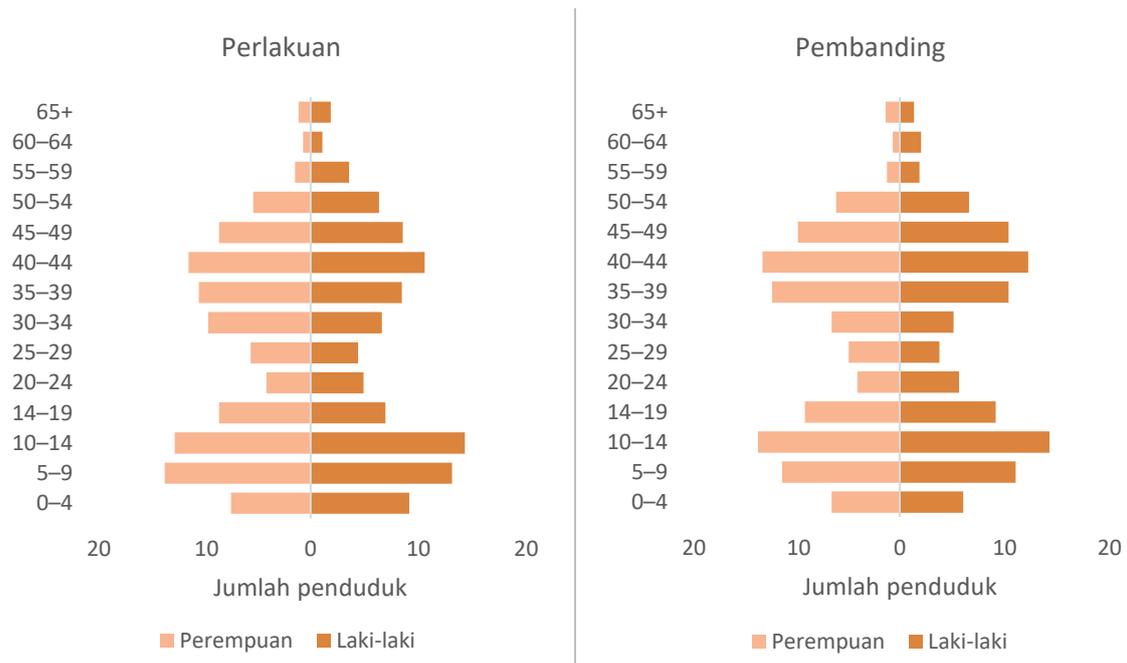
Jenis Kelamin	Perlakuan	Pembanding	Jumlah
Rumah tangga	597	398	995 ^a
(%)	60	40	
Penduduk (jiwa)	2.346	1.482	3.828
(%)	61,29	38,71	
Laki-laki (jiwa)	1.180	742	1.922
(%)	50,30	50,07	50,21
Perempuan (jiwa)	1.166	740	1.906
(%)	49,70	49,93	49,79

Sumber: survei SMERU, 2022

^aJumlah responden rumah tangga yang didapatkan sebenarnya 1.000 rumah tangga. Namun, pada saat pembersihan data, 5 unit observasi tidak bisa diverifikasi dan divalidasi datanya sehingga data yang siap hanya 995 rumah tangga.

Dilihat dari jumlah penduduk, wilayah perlakuan dan pembanding didominasi kelompok penduduk usia anak (5–17 tahun) dan kelompok penduduk dewasa (di atas 30 tahun) (Gambar 4). Di kedua wilayah studi, kelompok pemuda atau usia muda (18–30 tahun) sulit ditemukan.

Gambar 4. Piramida Penduduk Wilayah Perlakuan dan Pemandang



Sumber: survei SMERU, 2022

Tampaknya lebih banyak penduduk kelompok usia muda atau pemuda yang bekerja atau bersekolah di luar daerahnya, misalnya merantau ke luar kabupaten atau bahkan ke luar pulau. Dengan jumlah pemuda yang relatif sedikit di kedua wilayah studi, tidak mengherankan bahwa penduduk usia produktifnya hanya berkisar 32%–37% (Tabel 6). Hal ini menyebabkan cukup tingginya rasio ketergantungan penduduk di kedua wilayah studi. Angka rasio ketergantungan yang tinggi menunjukkan makin tingginya beban penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk usia nonproduktif, seperti anak-anak dan orang lansia.

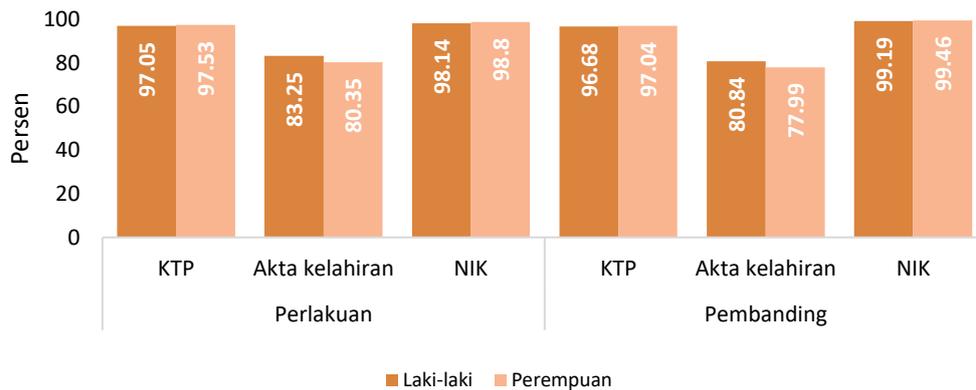
Tabel 6. Rasio Ketergantungan Penduduk

Indikator	Perlakuan	Pemandang
Penduduk usia nonproduktif (jiwa)	1.488 (63,43%)	998 (67,34%)
Penduduk usia produktif (jiwa)	858 (36,57%)	484 (32,66%)
Rasio ketergantungan	173,43	206,20

Sumber: survei SMERU, 2022

Mayoritas penduduk di kedua wilayah sudah memiliki dokumen kependudukan, seperti kartu tanda penduduk (KTP) ataupun nomor induk kependudukan (NIK) (Gambar 5). Hal ini menunjukkan bahwa ketertiban administrasi penduduk di kedua wilayah studi sudah cukup baik. Kepemilikan dokumen administrasi yang tertib akan memudahkan implementasi program pembangunan ataupun program bantuan. Meskipun demikian, masih ada sekitar 20% penduduk yang tidak memiliki akta kelahiran.

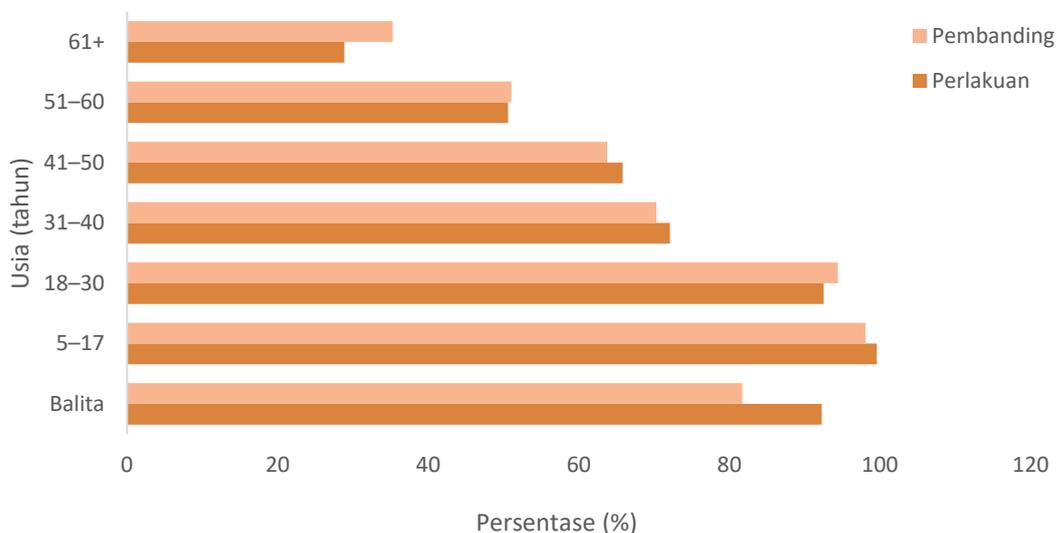
Gambar 5. Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Administrasi



Sumber: survei SMERU, 2022

Kabar baiknya, kepemilikan akta kelahiran pada kelompok anak sudah mencapai 99% (Gambar 6). Persentase kelompok usia balita yang memiliki akta kelahiran juga di atas 90%. Sebagian besar ketiadaan akta kelahiran terjadi pada kelompok usia tua. Hal ini cukup wajar, mengingat pada masa yang lampau, kepemilikan akta kelahiran bukan merupakan hal yang dianggap penting oleh banyak orang.

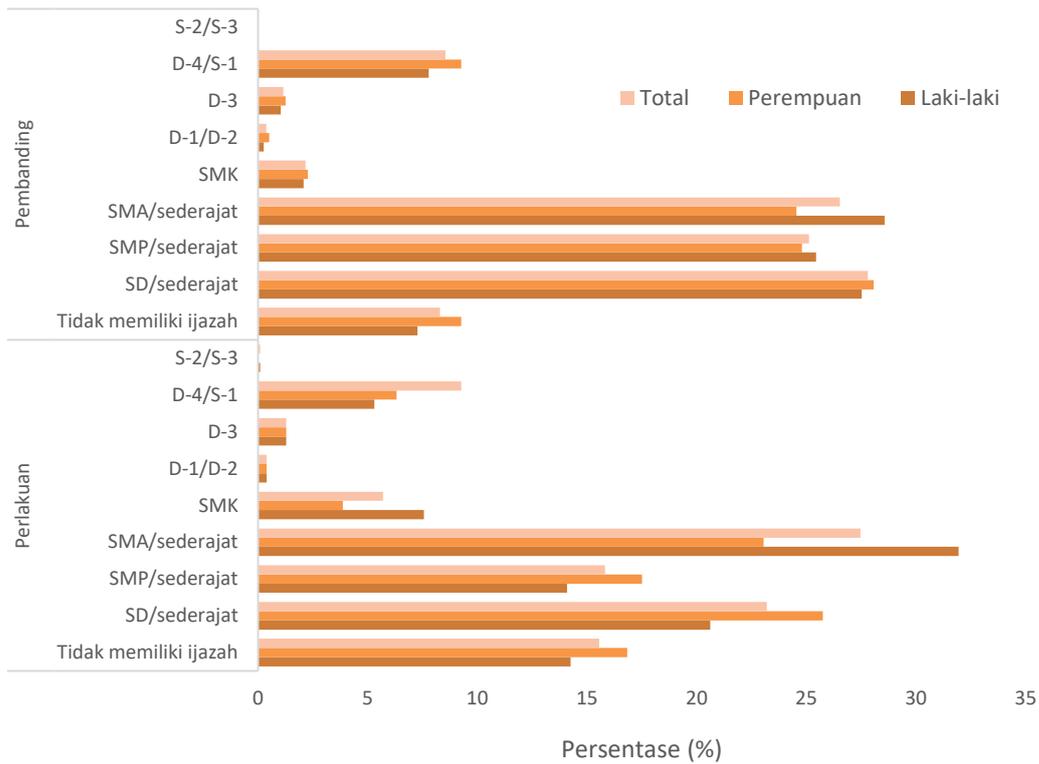
Gambar 6. Persentase Penduduk yang Memiliki Akta Kelahiran Berdasarkan Kelompok Usia



Sumber: survei SMERU, 2022

Sebanyak 55% penduduk di wilayah perlakuan yang sudah bukan tergolong usia sekolah memiliki tingkat pendidikan paling tinggi SMP atau kurang dari SMP, sementara di wilayah pembanding angkanya mencapai 61% (Gambar 7). Tidak ada penduduk yang berpendidikan pascasarjana (S2/S3) di wilayah pembanding, tetapi ada setidaknya satu orang responden (0,17%) di wilayah perlakuan berpendidikan pascasarjana. Tingkat pendidikan yang relatif rendah ini juga menunjukkan bahwa generasi sebelumnya mungkin belum mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

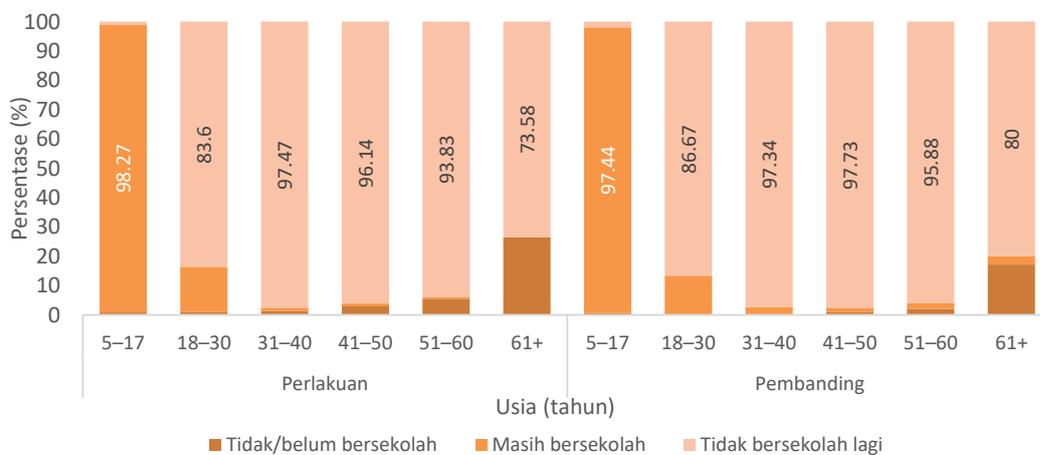
Gambar 7. Persentase Penduduk Usia 24 Tahun ke Atas Berdasarkan Ijazah Tertinggi



Sumber: survei SMERU, 2022

Sebanyak lebih dari sepertiga penduduk di kedua wilayah studi adalah mereka yang masih bersekolah, dan sedikitnya ada 1%–2% penduduk yang tidak atau belum bersekolah. Kelompok yang tidak pernah atau belum bersekolah ini didominasi mereka yang berusia di atas 40 tahun. Namun, terdapat setidaknya sembilan anak (0,74%) dari kedua wilayah studi yang masih tergolong usia sekolah, tetapi tidak bersekolah.

Gambar 8. Status Sekolah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia



Sumber: survei SMERU, 2022

2.3 Profil Rumah Tangga Hasil Survei

Berdasarkan survei yang kami lakukan, rata-rata rumah tangga di kedua wilayah terdiri atas empat orang anggota rumah tangga. Adapun kepala rumah tangga (KRT), rata-rata usianya adalah sekitar 43 tahun, dan mayoritas mereka laki-laki. Rata-rata pendidikan KRT adalah 9,4 tahun atau sekitar tamat SMP.

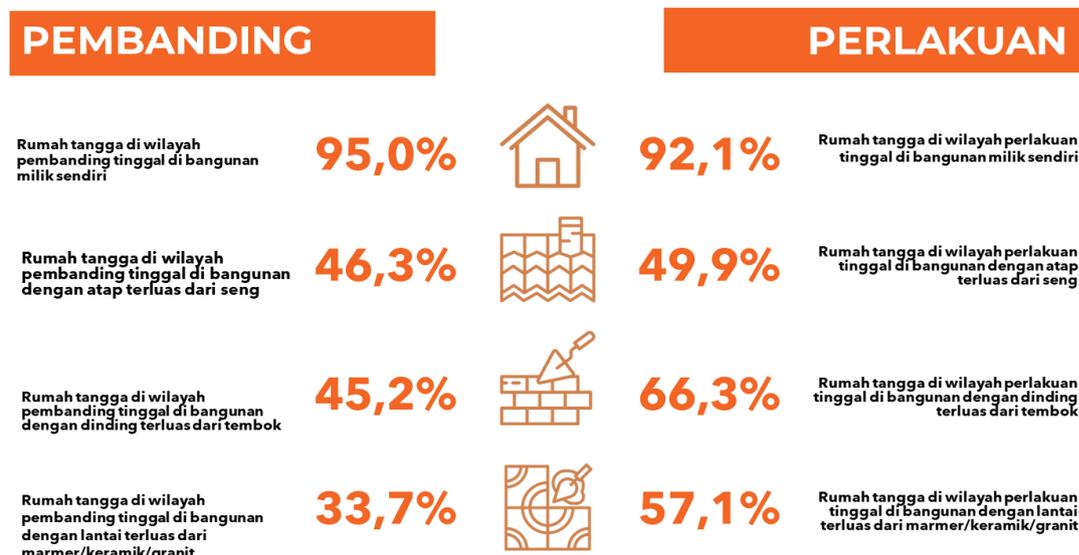
Tabel 7. Profil Rumah Tangga

Keterangan	Perlakuan	Pembanding
Jumlah anggota rumah tangga	4,2 orang	3,9 orang
Lama sekolah KRT	9,4 tahun	9,4 tahun
Usia KRT	43,6 tahun	43,7 tahun
Persentase KRT perempuan	6,5%	5,5%
Persentase KRT laki-laki	93,5%	94,5%

Sumber: survei SMERU, 2022

Berdasarkan status kepemilikan rumah, sebagian besar adalah milik sendiri dan sebagian kecil adalah rumah yang dikontrak, rumah bebas sewa (milik orang lain maupun milik orang tua/kerabat), ataupun rumah dinas. Proporsi rumah tangga dengan rumah milik sendiri sedikit lebih tinggi di wilayah pembanding (95%) daripada proporsi di wilayah perlakuan (92%).

Gambar 9. Profil Rumah Tangga



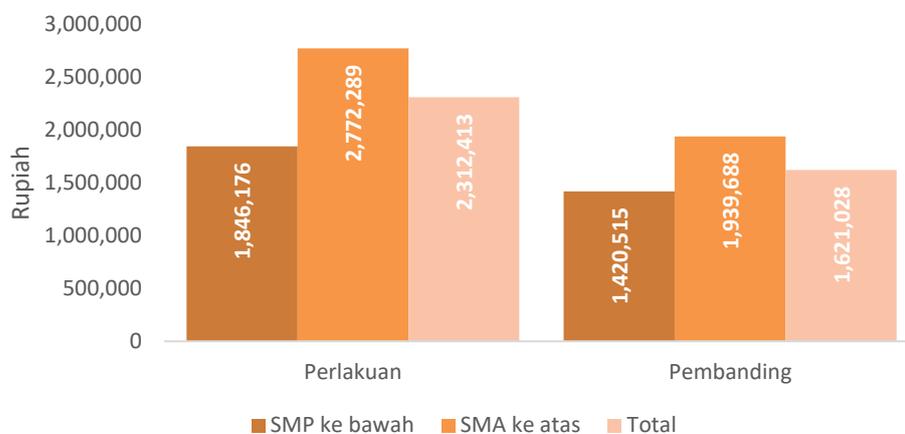
Sumber: survei SMERU, 2022

Dari jenis bahan, sebagian besar atap rumah, terutama di wilayah perlakuan, masih berbahan seng, dan sebagian lainnya berbahan genting. Pada sekitar 66% rumah di wilayah perlakuan, dindingnya adalah tembok. Sementara itu, dinding rumah di wilayah

pembanding didominasi tembok (45%) dan bata tak berplester (26%). Pada sekitar 12% rumah di wilayah perlakuan dan 18% rumah di wilayah pembanding, atapnya berbahan kayu.

Jika dilihat dari bahan lantai, sebagian besar rumah di wilayah perlakuan berlantai keramik atau granit, sementara di wilayah pembanding masih berlantai semen atau bata merah. Hasil survei menunjukkan bahwa, di wilayah perlakuan dan pembanding, sudah sedikit rumah warga yang atapnya terbuat dari jerami, ijuk, ataupun dedaunan. Hal tersebut memperlihatkan adanya sebagian karakteristik rumah (bahan bangunan atap, lantai, dan dinding) yang sudah layak.³

Gambar 10. Pengeluaran Rata-Rata per Bulan Rumah Tangga Berdasarkan Tingkat Pendidikan KRT



Sumber: survei SMERU, 2022

Pengeluaran rata-rata rumah tangga pada masing-masing wilayah adalah 2,3 juta rupiah di wilayah perlakuan dan 1,6 juta rupiah di wilayah pembanding (Gambar 10). Rumah tangga dengan KRT berpendidikan SMA ke atas memiliki pengeluaran rata-rata yang lebih tinggi daripada KRT berpendidikan SMP ke bawah. Hal tersebut terlihat di kedua wilayah studi.

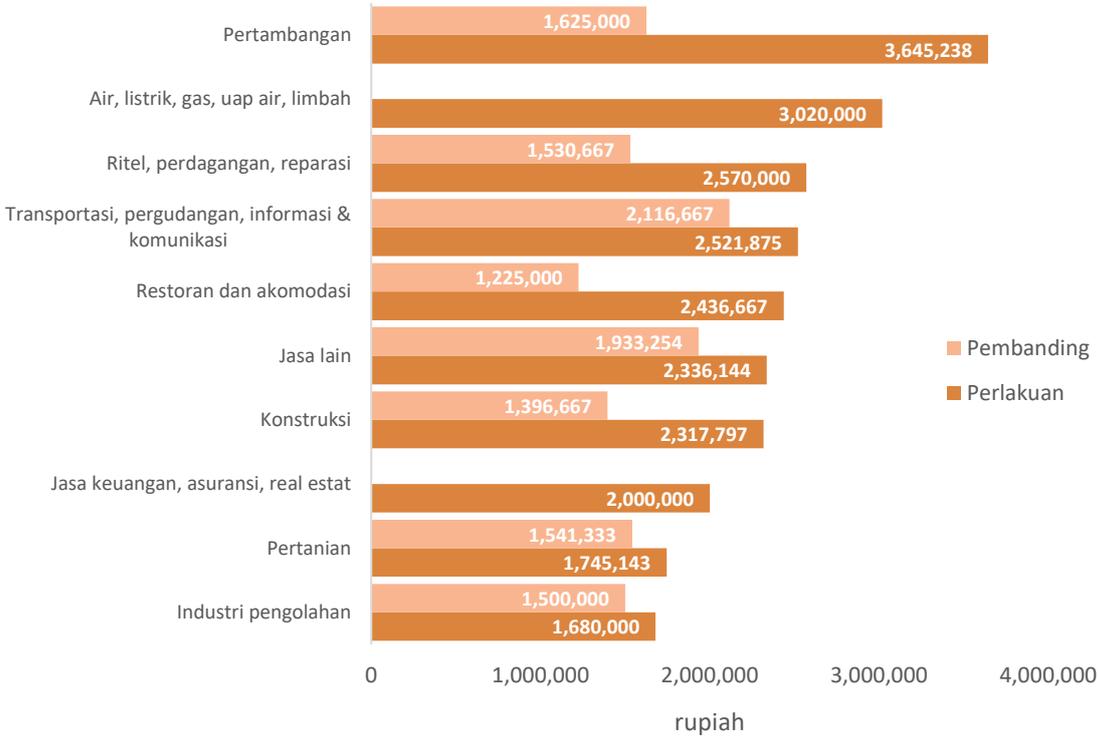
Perbedaan rata-rata pengeluaran rumah tangga juga terlihat di antara sektor-sektor pekerjaan KRT (Gambar 11). Di wilayah perlakuan, rumah tangga dengan KRT yang bekerja di sektor pertambangan memiliki pengeluaran rata-rata lebih tinggi daripada rumah tangga dengan KRT yang bekerja di sektor-sektor lainnya, yakni mencapai 3,6 juta rupiah per bulan. Di antara rumah tangga dengan pengeluaran paling rendah, yakni sekitar 1,6–1,7 juta rupiah per bulan, adalah rumah tangga yang KRT-nya bekerja di sektor industri pengolahan dan sektor pertanian. Sektor industri pengolahan yang dimaksud dalam studi ini adalah kelompok-kelompok industri rumah tangga skala mikro atau kecil. Sementara itu, pengeluaran rumah tangga paling tinggi (2,1 juta rupiah) di wilayah pembanding berasal dari rumah tangga yang KRT-nya bekerja di sektor transportasi, pergudangan, dan

³Bahan bangunan rumah hanyalah tiga dari tujuh karakteristik rumah layak huni, yaitu bahan atap, bahan lantai, bahan dinding, luas lantai per anggota rumah tangga, akses air minum, akses sanitasi layak, dan akses listrik.

informasi dan komunikasi, sedangkan pengeluaran paling rendah (1,2 juta rupiah) berasal dari rumah tangga yang KRT-nya bekerja di sektor restoran dan akomodasi.

Jika dilihat tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), kedua wilayah memiliki TPAK laki-laki yang lebih tinggi daripada perempuan. Lebih-lebih jika penduduk tersebut berpendidikan SMA ke atas. TPAK laki-laki berpendidikan SMA ke atas di wilayah perlakuan mencapai 93% dan di wilayah pembanding mencapai 89,7%. Sementara itu, TPAK perempuan di kedua kelompok wilayah studi berkisar 24%–30% pada mereka yang berpendidikan SMP ke bawah dan 55%–64% pada mereka yang berpendidikan SMA ke atas.

Gambar 11. Pengeluaran Rata-Rata Rumah Tangga per Bulan Berdasarkan Sektor Pekerjaan KRT⁴



Sumber: survei SMERU, 2022

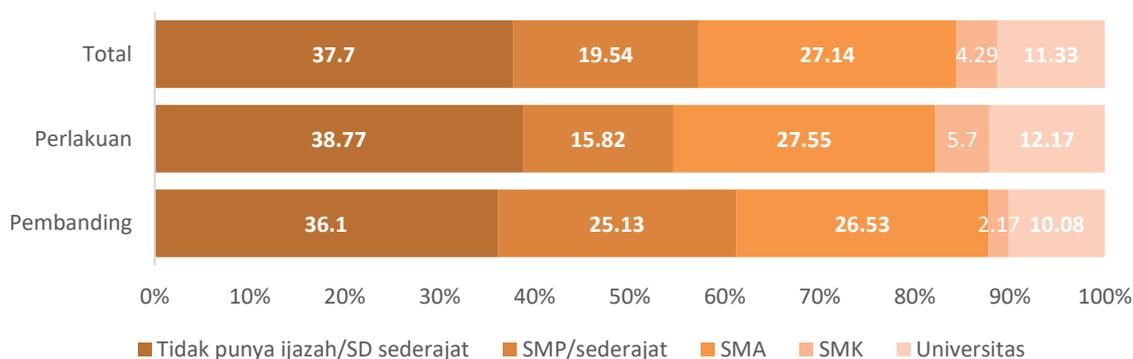
⁴Jasa lain/jasa lainnya yang dimaksud dalam laporan ini adalah kategori jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan, jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa sosial, dan jasa kegiatan dari lembaga perwakilan negara asing (Bank Dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dsb.).

III. Analisis Sosioekonomi Komunitas Lingkar Tambang

3.1 Aspek Pendidikan

Terdapat beberapa temuan menarik pada aspek pendidikan. Temuan pertama adalah bahwa mayoritas penduduk bukan usia sekolah di wilayah studi berpendidikan rendah. Gambar 12 memperlihatkan bahwa mayoritas penduduk berusia di atas 24 tahun tidak memiliki ijazah atau merupakan lulusan SD/ sederajat. Hal ini menunjukkan tingginya angka penduduk yang memiliki tingkat pendidikan rendah (SMP ke bawah) di wilayah perlakuan (54,59%) dan wilayah perbandingan (61,22%). Indikator tingkat pendidikan lain, seperti rata-rata lama sekolah, juga menunjukkan kesimpulan senada. Rata-rata lama sekolah adalah 9,3 tahun di wilayah perlakuan dan 9,4 tahun di wilayah perbandingan. Lama waktu ini setara dengan tingkat SMP/ sederajat.

Gambar 12. Tingkat Pendidikan Terakhir Penduduk Berusia di Atas 24 Tahun



Sumber: Survei SMERU, 2022

Temuan ini bukanlah hal yang menggembirakan. Pada tingkat nasional, pemerintah telah mencanangkan penyelenggaraan pendidikan menengah universal, yaitu memberikan layanan kepada masyarakat untuk mengikuti pendidikan menengah (SMA/ sederajat).⁵ Bahkan, pada Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional Agustus 2022, telah diwacanakan perluasan wajib belajar menjadi 13 tahun, yaitu dengan menambahkan kelas prasekolah (kelas 0). Di wilayah studi, pemerintah daerah (pemda) di wilayah perlakuan telah menetapkan wajib belajar 12 tahun melalui Peraturan Daerah (Perda) KSB No. 23 Tahun 2008 tentang Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun di KSB. Pemda KSB melalui perda tersebut menjamin terselenggaranya Program Wajib Belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah atau pendidikan yang setara tanpa memungut biaya. Lebih jauh, pemda kedua wilayah studi telah menetapkan wajib belajar PAUD selama satu tahun pra-SD. Di wilayah perlakuan, terdapat Peraturan Bupati (Perbup)

⁵berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal

KSB No. 45 Tahun 2020 tentang Wajib PAUD 1 (Satu) Tahun Prasekolah Dasar. Sementara itu, di wilayah perbandingan, terdapat Perbup Sumbawa No. 96 Tahun 2020 yang mengatur hal serupa. Keberadaan regulasi mengenai kewajiban penyelenggaraan pendidikan tersebut dan capaian pendidikan penduduk menunjukkan masih perlunya upaya untuk memastikan akses penduduk terhadap pendidikan.

Temuan kedua adalah rendahnya jumlah lulusan SMK, dibandingkan dengan lulusan SMA. Pada Gambar 12 terlihat bahwa proporsi lulusan SMK relatif lebih kecil daripada lulusan SMA. Terdapat hanya 5,7% tamatan SMK di wilayah perlakuan dan 2,2% di wilayah perbandingan. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya ketersediaan (*supply*) SMK jika dibandingkan dengan SMA di wilayah studi. Pada tahun ajaran 2019/2020, misalnya, terdapat sepuluh SMA dan enam SMK di KSB (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2020).

Temuan ketiga adalah bahwa terdapat persoalan terkait ketersediaan sarana pendidikan serta tenaga pendidik. Pada pendidikan prasekolah, berdasarkan informasi dari Dinas Pendidikan KSB, telah tersedia PAUD negeri di semua kecamatan di wilayah perlakuan (delapan kecamatan). Namun, secara distribusi, masih ada desa yang belum memiliki PAUD negeri. Kekurangan PAUD negeri diatasi dengan keberadaan PAUD swasta sehingga, di setiap desa, tersedia setidaknya satu PAUD. Pada sisi tenaga pendidikan, masih ada guru PAUD yang berpendidikan SMA/ sederajat ataupun sarjana nonpendidikan guru PAUD (PGPAUD).

Pada pendidikan dasar, distribusi SD sudah sampai ke berbagai desa di wilayah perlakuan, walaupun di beberapa lokasi masih terjadi kekurangan ruang kelas seiring peningkatan rombongan belajar. Semua guru SD berpendidikan minimal sarjana, meskipun belum semua guru SD berlatar belakang pendidikan guru SD (PGSD). Sementara itu, wawancara dengan pihak SMP sampel pada wilayah perlakuan di Kecamatan C memperlihatkan bahwa sekolah masih mengalami kendala dalam penyediaan sarana pembelajaran berupa guru untuk mata pelajaran tertentu dan perlengkapan laboratorium bahasa. Adapun SMP sampel di Kecamatan A, mereka mengaku masih terkendala dalam hal pemahaman guru akan kurikulum merdeka belajar.

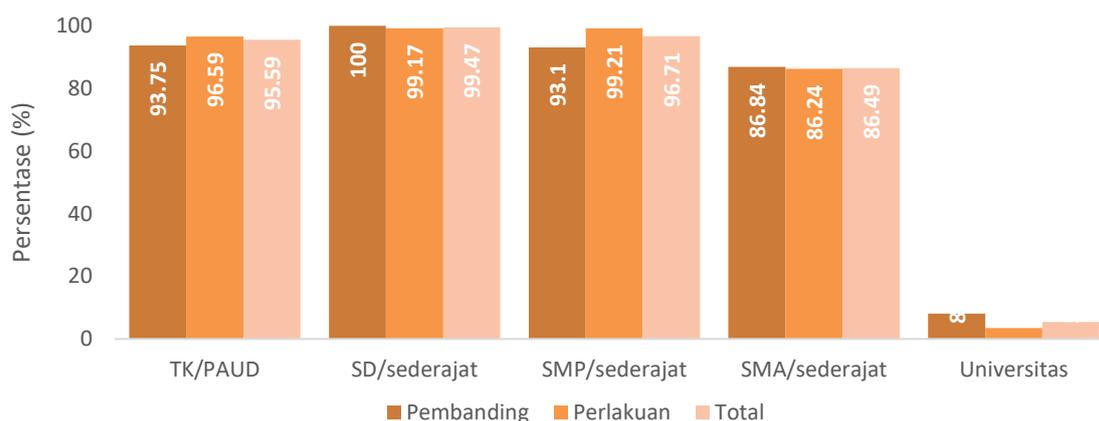
Berdasarkan temuan wawancara tim kualitatif, SMK sampel di Kecamatan C (wilayah perlakuan) dihadapkan pada masalah kekurangan guru produktif⁶ untuk jurusan teknik dan tata boga serta kekurangan sarana pembelajaran untuk jurusan pariwisata. Pihak sekolah berusaha mengatasi masalah ini dengan memfungsikan guru normatif menjadi guru produktif, memanfaatkan guru tamu dari kalangan praktisi sesuai jurusan, dan mengajukan permintaan sarana pembelajaran kepada Dinas Pendidikan setempat.

Pada pendidikan luar sekolah, belum ada lembaga bimbingan belajar (bimbel) yang secara resmi beroperasi di wilayah perlakuan. Namun, sudah ada bimbel perseorangan yang beroperasi dari rumah ke rumah.

⁶Di SMK terdapat guru normatif, guru adaptif, dan guru produktif. Guru normatif adalah guru yang mengajar mata pelajaran (mapel) Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris. Guru adaptif adalah guru yang mengajar mapel Biologi, Fisika, Matematika. Guru produktif adalah guru yang mengajar mapel yang sesuai dengan kejurumannya.

Temuan keempat adalah bahwa masih terdapat anak tidak sekolah (ATS), yaitu putus sekolah–tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Gambar 13 memperlihatkan bahwa, meski capaian APM sudah baik, tidak semua indikator mencapai angka 100%, khususnya pada tingkat SMA/ sederajat yang masih dalam rentang usia wajib belajar 12 tahun.

Gambar 13. APM TK/PAUD, SD/Sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat, dan Perguruan Tinggi⁷



Sumber: survei SMERU, 2022

Tabel 8. Alasan Tidak Melanjutkan Pendidikan

Alasan tidak melanjutkan pendidikan	Perlakuan			Pembanding		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
Masalah uang	40,0%	43,6%	41,4%	53,0%	53,0%	53,0%
Bekerja	16,7%	15,4%	16,2%	27,3%	10,6%	18,9%
Menikah	8,3%	20,5%	13,1%	3,0%	13,6%	8,3%
Mengurus rumah tangga	1,7%	2,6%	2,0%	1,5%	0,0%	0,8%
Merasa cukup	8,3%	5,1%	7,1%	13,6%	9,1%	11,4%
Takut dirundung	1,7%	0,0%	1,0%	0,0%	3,0%	1,5%
Lokasi sekolah terlalu jauh dari tempat tinggal	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,5%	0,0%
Belum cukup usia	0,0%	5,1%	2,0%	0,0%	1,5%	0,8%

Sumber: survei SMERU, 2022

Data yang dihasilkan tim kuantitatif menunjukkan bahwa alasan terbesar anak usia sekolah (7–24 tahun) tidak melanjutkan pendidikannya adalah masalah keuangan, bekerja, dan

⁷Tidak termasuk penduduk yang sedang menempuh pendidikan di luar wilayah studi

menikah, seperti tersaji pada Tabel 8. Temuan survei terkait alasan tidak melanjutkan pendidikan didukung oleh studi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional⁸ (2020) yang menyebutkan bahwa anak tidak melanjutkan studinya bisa jadi karena masalah pada sisi *demand*. Contohnya adalah hambatan ekonomi serta hambatan yang berakar pada faktor sosial-budaya dan persepsi negatif terhadap pentingnya pendidikan. Pandangan keluarga mengenai penting atau tidak pentingnya pendidikan dan berbagai asumsi yang berlandaskan norma sosial (termasuk hal-hal terkait gender) sering kali menjadi penyebab anak tidak bersekolah. Meskipun ATS paling banyak ditemukan pada anak-anak dengan pendidikan SMA/ sederajat, data kuantitatif menunjukkan bahwa, di kedua wilayah studi, terdapat beberapa ATS pada anak-anak dengan tingkat pendidikan SMP/ sederajat (15,1%) dan SD/ sederajat atau tanpa ijazah sama sekali (7,8%).

Ada juga [anak] yang tidak mau sekolah ... keluarganya malas sekolah, anak cucunya tidak mau sekolah. Mungkin otaknya sudah *gak* mau mikir. Orang tua dari anak yang tidak sekolah ini kerja serabutan *gitu*. (Perangkat desa dan petani, laki-laki, Kecamatan A, KSB, 20 November 2022)

Keberadaan ATS juga ditemukan pada anak disabilitas usia sekolah. Berdasarkan temuan tim kualitatif, salah satu penyebabnya adalah keterbatasan ketersediaan sekolah luar biasa dan sekolah inklusif. Akibatnya, anak disabilitas lebih sulit mengakses layanan pendidikan. Meski demikian, berdasarkan hasil survei tim kuantitatif, persentase anak disabilitas yang bersekolah masih terbilang tinggi, yaitu berkisar 85,7% di wilayah perbandingan dan 71,4% di wilayah perlakuan.

Sebenarnya sudah ada beberapa strategi untuk menurunkan tingkat ATS, di antaranya strategi untuk mengatasi hambatan ekonomi dalam menjangkau layanan pendidikan. Di wilayah perbandingan dan perbandingan, terdapat program nasional, seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Di wilayah perbandingan, ada Program Pariri Cerdas, yaitu program bantuan biaya pendidikan untuk siswa tidak mampu pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI⁹ dan SMP/MTS¹⁰) yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah atau pihak lain. Nilai bantuan sebesar Rp500.000/siswa/tahun. Program ini ditetapkan melalui Perbup KSB No. 61 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pariri Cerdas bagi Peserta Didik Tidak Mampu Jenjang Pendidikan Dasar dan mulai dilaksanakan pada 2022. Rencananya, program ini akan disediakan bagi 600 siswa.

Temuan kelima adalah rendahnya minat laki-laki untuk bersekolah, dibandingkan dengan perempuan. Tabel 9 dan Tabel 10 memperlihatkan bahwa perempuan di wilayah studi memiliki rasio angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi yang lebih besar daripada laki-laki. Hal ini terjadi di kedua wilayah studi, khususnya pada tingkat perguruan tinggi.

⁸Bappenas

⁹madrasah ibtidaiah

¹⁰madrasah sanawiah

Tabel 9. APK SMA/Sederajat

APK SMA/ sederajat	Perlakuan	Pembanding
Laki-laki	86,54	87,5
Perempuan	93,88	90,28
Rasio perempuan dan laki-laki	1,08	1,03

Sumber: survei SMERU, 2022

Tabel 10. APK Perguruan Tinggi

APK Universitas	Perlakuan	Pembanding
Laki-laki	7,55	9,68
Perempuan	22,5	12,9
Rasio perempuan dan laki-laki	2,98	1,33

Sumber: survei SMERU, 2022

Temuan kualitatif di wilayah perlakuan memperlihatkan bahwa minat kelompok pemuda laki-laki untuk melanjutkan pendidikan tinggi (dari SMA ke perguruan tinggi) lebih rendah daripada perempuan. Penyebabnya adalah bahwa laki-laki lebih tertarik untuk langsung bekerja di sektor pertambangan, sebagaimana diungkapkan informan berikut.

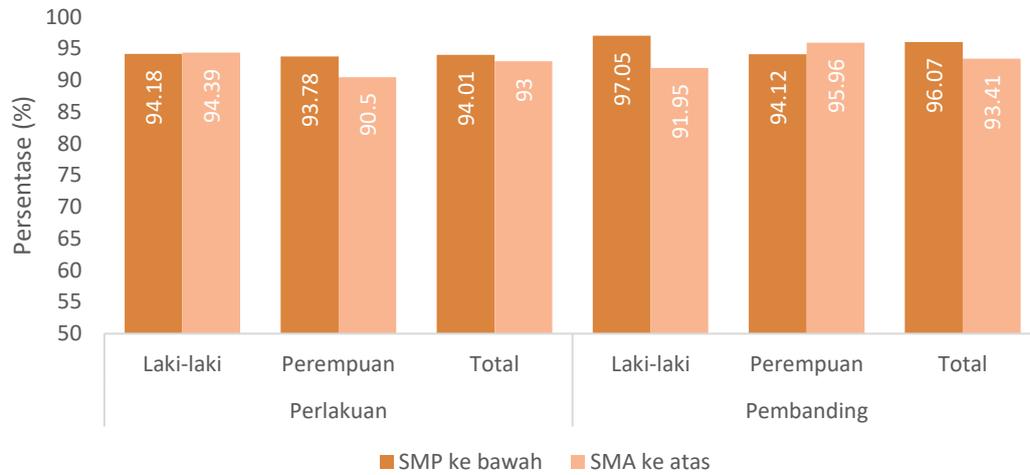
Karena adanya tambang ini, mereka [pemuda laki-laki] ingin bekerja lebih cepat. Pokoknya lulus SMA itu kebanyakan mereka mau bekerja langsung daripada mau kuliah. Padahal orang tuanya itu terbilang mampulah dan [orang tuanya] bekerja, *tapi* kalau [anak] dipaksakan [melanjutkan kuliah] kan juga *nggak* bisa. Setelah ada tambang ini, memang rata-rata *pingin* kerja, lumayan gajinya *gitu*. Daripada kuliah, bahasanya mereka itu *ngabisin duit*. Makanya dalam dua tahun terakhir ini, dalam satu keluarga itu jarang sampai semua anaknya *dikuliahin*; pasti ada salah satu atau salah duanya anaknya yang tidak kuliah. (Tokoh pemuda/tenaga kesehatan, laki-laki, Kecamatan A, KSB, 21 November 2022)

3.2 Aspek Ketenagakerjaan

Secara umum, di wilayah perlakuan, jumlah tenaga kerja berpendidikan tinggi dan jumlah tenaga kerja berpendidikan rendah¹¹ sudah cukup seimbang. Sementara itu, di wilayah pembanding, terdapat lebih banyak tenaga kerja berpendidikan rendah daripada tenaga kerja berpendidikan tinggi (Gambar 14).

¹¹Dalam laporan ini, yang dimaksud dengan “berpendidikan tinggi” adalah penduduk dengan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan berupa SMA ke atas (SMA/ sederajat, D-1, D-3, S-1, S-2, dan S-3), sedangkan “berpendidikan rendah” adalah penduduk dengan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan berupa SMP ke bawah (SMP/ sederajat, SD/ sederajat, dan tidak pernah bersekolah).

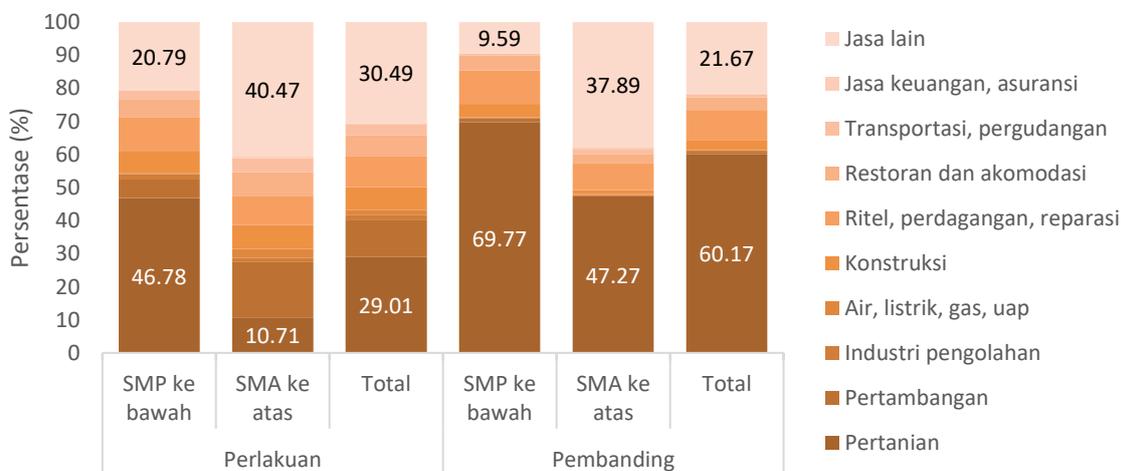
Gambar 14. Persentase Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin



Sumber: survei SMERU, 2022

Penyebabnya bisa jadi adalah bahwa keberadaan sektor pertambangan dan sektor jasa di wilayah perlakuan memerlukan tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang memiliki tingkat pendidikan relatif tinggi dan/atau sertifikasi keahlian tertentu. Sebaliknya, sektor-sektor lain, seperti pertanian (termasuk juga kehutanan, kelautan, dan perikanan), ritel, perdagangan, dan reparasi cenderung tidak memerlukan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan tinggi. Analisis ini diperkuat dengan data pada Gambar 15. Di wilayah perlakuan, terdapat sekitar 11,1% tenaga kerja di sektor pertambangan dan 30,5% tenaga kerja di sektor jasa yang didominasi pekerja berpendidikan tinggi. Meskipun sektor pertanian masih cukup dominan, keberadaan sektor pertambangan memengaruhi gambaran umum ketenagakerjaan di wilayah perlakuan. Di sisi lain, sektor pertanian sangat dominan di wilayah pembandingan; hal ini menjelaskan rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja di wilayah tersebut.

Gambar 15. Persentase Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor Pekerjaan dan Tingkat Pendidikan



Sumber: survei SMERU, 2022

Temuan survei tersebut diperkuat dengan temuan kualitatif yang memperlihatkan bahwa pertambangan merupakan sektor yang paling diminati angkatan kerja, termasuk pemuda dan kelompok berpendidikan tinggi. Sektor pertambangan dinilai memberikan pendapatan dan status sosial yang lebih baik daripada sektor-sektor lain. Beberapa informan yang diwawancarai mengungkapkan:

Klo di sini, minat masyarakat rata-rata ke tambang. Klo kayak minimarket dan hotel, ini justru diminati oleh [orang] luar, seperti dari Kecamatan D, [dari] Lombok ... minat orang kesini [kerja] ke tambang, bisa jadi pendapatannya sama [dengan pekerjaan lain], tapi gengsinya beda ... Guru-guru banyak bukan dari Kecamatan A, [banyak] dari Sumbawa, dari Lombok malahan, yang lulusan sarjana di sini yang dilamar kerja di tambang. (Guru, laki-laki, Kecamatan A, KSB, 20 November 2022)

Biarpun dia sarjana pertanian, tetap akan cenderung ke tambang ... Bahkan, perempuan sendiri minatnya cenderung di tambang. (Tokoh pemuda, perempuan, Kecamatan C, KSB, 22 November 2022)

Selain pertambangan, sektor pekerjaan yang diminati terutama oleh pemuda dan kelompok berpendidikan tinggi adalah sektor jasa, seperti aparatur sipil negara (ASN), tenaga pendidik, dan tenaga kesehatan. Seorang informan mengungkapkan alasannya:

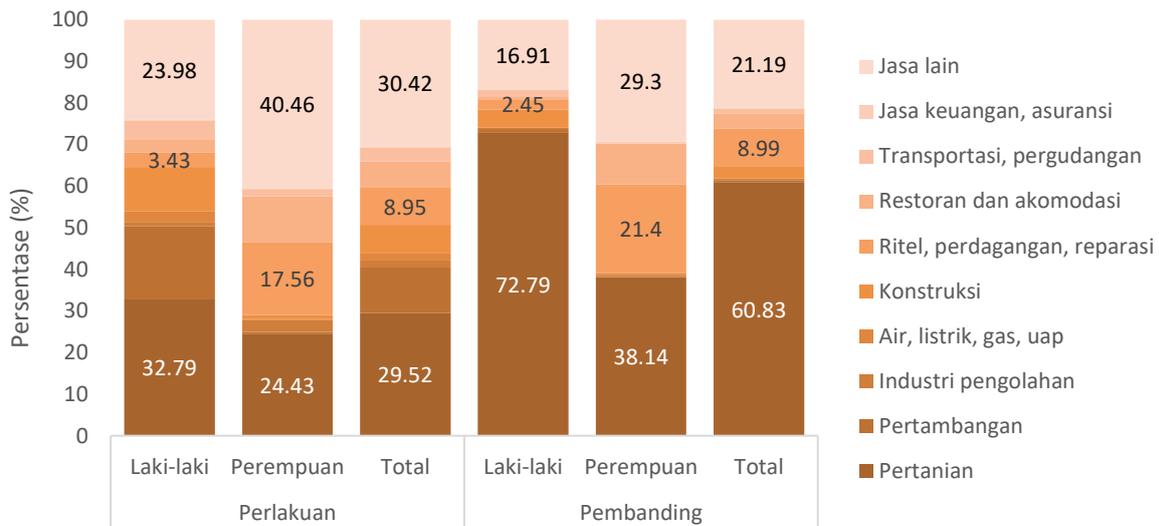
Saya melamar pegawai negeri sipil ... untuk jangka panjang soal terjaminnya pekerjaan. (Tenaga kesehatan dan pemilik usaha, laki-laki, Kecamatan A, KSB, 21 November 2022)

Pekerjaan di sektor pertanian, perdagangan, dan ritel juga dijalani oleh masyarakat di wilayah perlakuan. Namun, pemuda dari keluarga petani mulai berkurang minatnya untuk bekerja di sektor pertanian dan lebih tertarik bekerja di sektor lain. Di samping itu, usaha pertanian di wilayah perlakuan terkadang juga menjadi pekerjaan sampingan rumah tangga. Pekerjaan pengelolaan lahan lebih banyak dikerjakan buruh tani, sementara pemilik lahan menjalankan pekerjaan utamanya di sektor lain.

Pada sisi lain pihak, di wilayah pembanding, sektor pertanian menjadi tumpuan penghidupan masyarakat. Sebagai contoh, di Desa H4 yang menjadi lokasi sampel pembanding kualitatif, kegiatan usaha tani kebanyakan dikelola rumah tangga petani pemilik lahan dengan tenaga bantuan buruh tani pada saat tertentu, misalnya musim tanam dan musim panen. Pertanian yang dijalankan tidak hanya berupa tanaman pangan, tetapi juga peternakan hewan kecil (ayam, bebek) maupun hewan besar (sapi, kerbau) untuk tujuan komersial. Buruh tani terdiri atas laki-laki dan perempuan, termasuk kelompok pemuda. Pengguna jasanya tidak hanya dari dalam desa, tetapi juga dari kecamatan lain di wilayah pembanding.

Jika diperhatikan lebih dalam tenaga kerja per sektor, terlihat adanya ketimpangan gender dalam aspek ketenagakerjaan (Gambar 16). Terdapat lebih banyak tenaga kerja laki-laki yang bekerja di sektor pertanian, baik di wilayah perlakuan maupun pembanding. Di wilayah perlakuan, pekerjaan pada sektor pertambangan lebih banyak dijalani laki-laki daripada perempuan.

Gambar 16. Sektor Pekerjaan Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: survei SMERU, 2022

Temuan kualitatif mengungkap bahwa peluang kerja di sektor pertambangan dinilai lebih terbuka bagi kelompok laki-laki daripada perempuan. Pekerjaan di sektor tambang lekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan fisik yang dinilai lebih bisa dikerjakan oleh laki-laki daripada perempuan. Informan dari Disnakertrans di wilayah perlakuan menjelaskan:

Klo terkait kesempatan kerja di Sumbawa Barat, itu sebenarnya terbuka untuk laki-laki dan perempuan, tapi klo sektor tambang, memang dominannya laki-laki, bukan berarti tidak ada perempuan ... Klo di luar [sektor tambang], sama rata [antara] laki-laki dan perempuan ... malahan klo industri rumah tangga, dominan perempuan. (Staf Disnakertrans KSB, laki-laki, 23 November 2022)

Sementara itu, dalam hal pengupahan (yang dapat dilihat sebagai imbal balik/*return* atas hasil kerja), hasil survei menunjukkan bahwa wilayah pemandang yang didominasi sektor pertanian memiliki upah yang jauh lebih rendah daripada wilayah perlakuan yang memiliki porsi sektor pertambangan cukup tinggi dalam struktur perekonomiannya (Gambar 17).

Jika ditelisik lebih jauh berdasarkan sektor pekerjaan, pertambangan masih merupakan sektor yang memberikan imbal balik upah paling tinggi di antara sektor-sektor yang ada (Tabel 11). Oleh karena itu, wajar bahwa sektor pertambangan masih menjadi primadona di wilayah perlakuan. Sektor pertambangan lebih banyak diisi pekerja laki-laki daripada perempuan. Namun, dari segi pengupahan, perempuan yang bekerja di sektor pertambangan mendapatkan upah yang lebih tinggi daripada laki-laki (Tabel 11). Penyebabnya adalah bahwa perempuan biasanya bekerja pada fungsi administratif atau manajerial. Sebaliknya, fungsi kerja pekerja laki-laki lebih beragam, yakni administratif atau manajerial, operator/teknisi, hingga pekerja kasar.

Gambar 17. Rerata Upah Pekerja per Jam Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: survei SMERU, 2022

Sektor lain yang juga didominasi pekerja laki-laki, seperti pengelolaan air, listrik, gas, uap air, dan limbah; konstruksi; serta transportasi, adalah sektor yang memberikan upah per jam yang tinggi jika dibandingkan dengan sektor-sektor lain. Sektor tersebut sebenarnya juga berkaitan erat dengan sektor pertambangan. Sementara itu, sektor yang didominasi pekerja perempuan, seperti ritel ataupun jasa, masih memberikan imbal balik upah yang lebih rendah daripada sektor-sektor lain. Lebih-lebih, di sektor yang didominasi tenaga kerja perempuan tersebut, upah yang diterima perempuan masih lebih rendah daripada laki-laki. Di sektor jasa, misalnya, upah pekerja perempuan adalah Rp14.000/jam, sedangkan pekerja laki-laki Rp22.500/jam.

Penjelasan-penjelasan hasil survei di atas menunjukkan bahwa potensi perempuan di pasar kerja masih menghadapi tantangan. Salah satunya adalah bahwa jenis pekerjaan dengan upah tinggi ternyata lebih mengutamakan tenaga kerja laki-laki. Selain itu, perempuan sebagai istri, ibu, ataupun anak perempuan sekaligus sebagai pekerja bisa jadi menghadapi jam kerja yang tidak optimal karena adanya beban ganda pengurusan rumah dan pengasuhan anak. Pekerjaan domestik sering kali menjadi beban tanggung jawab anggota rumah tangga perempuan dan tidak distribusikan secara merata kepada anggota laki-laki. Situasi ini terjadi bahkan ketika laki-laki dan perempuan sama-sama bekerja atau, dengan kata lain, berkontribusi terhadap ekonomi rumah tangga. Rendahnya jam kerja perempuan menjadikan imbal balik upah yang diterima perempuan juga cenderung rendah.

Tabel 11. Rerata Upah per Jam dan Jumlah Tenaga Kerja Berstatus Pegawai/Buruh Berdasarkan Sektor Pekerjaan dan Jenis Kelamin (dalam Rupiah)¹²

Wilayah	Sektor	Laki-laki	Perempuan	Total
Perlakuan	Pertanian	11,068 (22)	4,681 (11)	8,939 (33)
	Pertambangan	32,095	39,394	32,254

¹²Data terkait pengupahan berdasarkan sektor pekerjaan perlu ditafsirkan secara lebih hati-hati, mengingat jumlah sampel terkait pengupahan yang kecil jika dibagi berdasarkan sektor pekerjaan. Contohnya, jumlah tenaga kerja berstatus pegawai/buruh di sektor pertambangan adalah 90 orang laki-laki dan hanya 2 orang perempuan.

Wilayah	Sektor	Laki-laki	Perempuan	Total
		(90)	(2)	(92)
	Industri pengolahan		11,905	11,905
			(2)	(2)
	Air, listrik, gas, uap air, limbah	24,423		24,423
		(12)		(12)
	Konstruksi	20,262		20,262
		(38)		(38)
	Ritel, perdagangan, reparasi	36,364	11,185	16,220
		(1)	(4)	(5)
	Restoran dan akomodasi	13,502	10,665	12,178
		(8)	(7)	(15)
	Transportasi, pergudangan, informasi & komunikasi	27,321	22,917	26,172
		(17)	(6)	(23)
	Jasa keuangan, asuransi, real estat	12,500	20,089	16,295
		(1)	(1)	(2)
	Jasa lain	22,502	14,127	18,573
		(112)	(99)	(211)
Pembanding	Pertanian	9,342	11,541	10,222
		(12)	(8)	(20)
	Pertambangan			
	Industri pengolahan			
	Air, listrik, gas, uap air, limbah		13,021	13,021
			(1)	(1)
	Konstruksi	11,079		11,079
		(11)		(11)
	Ritel, perdagangan, reparasi	9,226	5,208	7,619
		(3)	(2)	(5)
	Restoran dan akomodasi	7,143	2,976	5,060
		(1)	(1)	(2)
	Transportasi, pergudangan, informasi & komunikasi	11,911		11,911
		(5)		(5)
	Jasa keuangan, asuransi, real estat		5,952	5,952
			(1)	(1)
	Jasa lain	14,861	10,531	12,972
		(53)	(41)	(94)

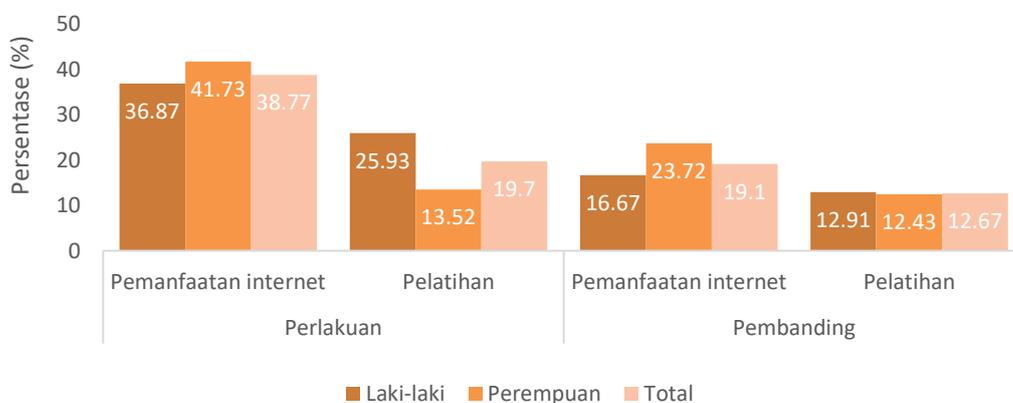
Sumber: survei SMERU, 2022

Imbal balik atau upah atas pekerjaan ini sebenarnya tidak hanya dipengaruhi sektor pekerjaan ataupun gender. Ada faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi perbedaan upah antarkelompok dan antarsektor. Berdasarkan hasil pengujian, ada perbedaan upah yang signifikan secara statistik berdasarkan tingkat pendidikan, pemanfaatan internet, serta keikutsertaan pekerja dalam pelatihan yang bersertifikat (Tabel 12). Hal ini berarti bahwa seorang pekerja bisa mendapatkan upah/*return* lebih tinggi pada pekerjaannya jika ia memiliki tingkat pendidikan minimal SMA, pernah mengikuti pelatihan yang memberikan sertifikat, serta memanfaatkan internet dalam pekerjaannya.

Sayangnya, berdasarkan hasil survei, pekerja yang memanfaatkan internet dalam pekerjaannya dan mendapatkan pelatihan bersertifikat masih sedikit (Gambar 18). Pemanfaatan internet di wilayah pembanding bahkan lebih rendah daripada wilayah perlakuan. Dengan demikian, tidak begitu mengherankan bahwa rata-rata upah pekerja di wilayah pembanding jauh lebih rendah daripada rata-rata upah di wilayah perlakuan. Data yang sama juga memperlihatkan bahwa pekerja perempuan yang pernah mendapatkan pelatihan bersertifikat jauh lebih sedikit daripada laki-laki. Namun, berita baiknya, sudah lebih banyak perempuan memanfaatkan internet dalam pekerjaannya, meskipun angkanya tidak mencapai setengahnya. Pemanfaatan internet dalam pekerjaan banyak dilakukan oleh perempuan, khususnya pada sektor ritel/perdagangan; mereka memanfaatkan internet untuk berjualan secara daring (melalui media sosial).

Di Indonesia, keberadaan pekerja yang tidak memanfaatkan internet dalam pekerjaannya tidak lepas dari lanskap tenaga kerja yang didominasi pekerja dengan tingkat pendidikan rendah dan pekerjaan utama yang tidak membutuhkan internet (SMERU, Digital Pathways, dan ESCAP, 2022). Di wilayah pembanding, tenaga kerja berpendidikan rendah lebih banyak daripada tenaga kerja berpendidikan tinggi. Selain itu, pertanian yang merupakan sektor dominan di wilayah pembanding cenderung tidak memerlukan tenaga kerja berpendidikan tinggi ataupun keterampilan digital tertentu. Sebaliknya, di wilayah perlakuan, terdapat sektor pertambangan dan sektor jasa yang memerlukan tenaga kerja terdidik dengan tingkat pendidikan relatif tinggi dan/atau sertifikasi keahlian tertentu, juga terdapat pekerjaan administratif atau manajerial yang perlu memanfaatkan teknologi digital.

Gambar 18. Persentase Tenaga Kerja yang Memanfaatkan Internet dan Mengikuti Pelatihan



Sumber: survei SMERU, 2022

Tabel 12. Hasil Uji Signifikansi Statistik (T-statistik) antara Upah dan Berbagai Variabel

Variabel	Kelompok	Jumlah Observasi	Mean	Galat Baku	Selisih	Galat Baku	t	Pr (T > t)
Jenis kelamin	Laki-laki	301	24374.4	1562.6	10513.2	2012.6	5.2	0.0000*
	Perempuan	132	13861.2	1268.5				
Pendidikan	SMP ke bawah	109	16005.2	2048.0	-7454.8	2520.1	-3.0	0.0034*
	SMA ke atas	300	23460.0	1468.5				
Mengikuti pelatihan	Tidak	207	16184.6	1398.1	-9550.7	2281.3	-4.2	0.0000*
	Ya	226	25735.2	1802.6				
Pemanfaatan internet	Tidak	173	17334.3	1578.8	-6387.1	2272.9	-2.8	0.0052*
	Ya	260	23721.3	1635.1				

Sumber: survei SMERU, 2022

*Signifikan pada 1%

**Signifikan pada 5%

***Signifikan pada 10%

Terkait pelatihan kerja, masyarakat, baik di wilayah perlakuan maupun pembandingan, umumnya mendapatkan informasi penyelenggaraan pelatihan melalui internet (situs web ataupun media sosial, seperti Facebook dan WhatsApp); buletin informasi; papan pengumuman yang tersedia di kantor desa, kecamatan, ataupun kabupaten; jejaring sosial, seperti keluarga ataupun pertemanan; dan media cetak. Namun, masih ada masyarakat yang terkendala dalam mengakses informasi tersebut, misalnya karena tidak memiliki gawai yang memadai, keterbatasan koneksi internet, hingga keterbatasan jejaring sosial.

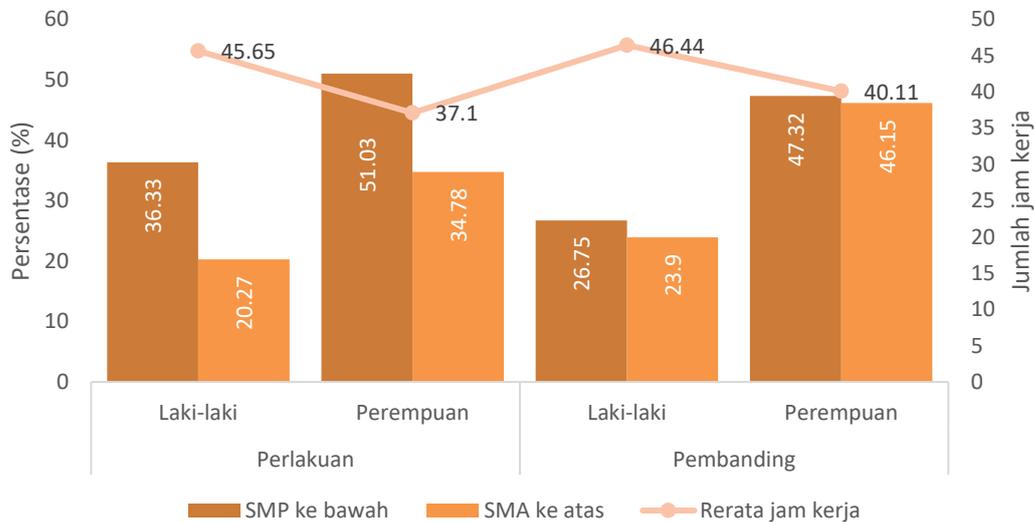
Studi ini juga mengungkap fakta bahwa, pada aspek ketenagakerjaan, selain mereka yang berstatus bekerja, terdapat kelompok masyarakat yang setengah menganggur (*underemployed*) dan menganggur (*unemployed*). Data imbal balik dalam bentuk upah/pendapatan atas pekerjaan (Gambar 17) dan data setengah pengangguran (*underemployment*)¹³ pada Gambar 19 menunjukkan adanya ketimpangan gender. Di wilayah perlakuan maupun pembandingan, rata-rata jumlah jam kerja per minggu pada perempuan adalah 0,8 kali rata-rata jumlah jam kerja laki-laki. Artinya, pada setiap rata-rata 35 jam laki-laki bekerja selama satu minggu, perempuan hanya bekerja selama 28 jam. Perempuan yang bekerja dihadapkan pada beban ganda, yaitu bekerja sekaligus melakukan pekerjaan domestik. Akibatnya, cukup banyak perempuan bekerja secara tidak optimal (tidak purnawaktu/*full time*) dan masuk dalam kategori setengah pengangguran. Hal ini juga yang menyebabkan imbal balik upah/pendapatan¹⁴ kaum perempuan menjadi lebih rendah daripada laki-laki, sebagaimana terlihat pada Gambar 17. Fakta ini dibuktikan

¹³Setengah pengangguran didefinisikan sebagai penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu.

¹⁴Upah yang dimaksud dalam laporan ini adalah upah/pendapatan yang diterima pekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai ataupun pekerja lepas (baik di sektor pertanian maupun nonpertanian).

dengan hasil uji signifikansi statistik yang menunjukkan adanya perbedaan upah yang signifikan antara laki-laki dan perempuan di wilayah perlakuan (Tabel 12).

Gambar 19. Setengah Pengangguran dan Jumlah Jam Kerja Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: survei SMERU, 2022

Di wilayah perlakuan, meskipun minat tenaga kerja terhadap sektor tambang tinggi, tidak semuanya bisa ditampung. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh, antara lain, adanya ketaksesuaian antara kebutuhan sektor pertambangan dan kompetensi pelamar kerja. Kendati memiliki latar belakang pendidikan formal yang memadai, misalnya, pelamar bisa jadi tidak memiliki pengalaman kerja yang relevan, tidak pernah mengikuti pelatihan, ataupun tidak memiliki sertifikasi yang diperlukan. Situasi ini dapat menciptakan adanya kelompok pengangguran (*unemployment*) yang merupakan salah satu tantangan aspek ketenagakerjaan.

Biasanya yang dibutuhkan yang sudah ada *skill* [keterampilan] ... yang sudah ada pengalaman dua tahun pekerjaannya ... Teman-teman [pemuda] yang baru akan mulai bekerja itu kan belum ada pengalaman. Itu *sih* kendalanya. (Tenaga kesehatan dan pemilik usaha, laki-laki, Kecamatan A, KSB, 21 Nov 2022)

Misalnya, *klo* dilihat dari pengalaman kerja, dia [calon pelamar] punya pengalaman di lima perusahaan, sudah keluar masuk dengan jabatan tertentu, *tapi* tidak diimbangi dengan pelatihan, misalnya dia kerja di perusahaan subkontraktor skala kecil [sehingga tidak ada pelatihan]. (Disnakertrans KSB, laki-laki, 23 November 2022)

Permasalahannya di "sertifikasi kompetensi" ... sertifikasi itu diperoleh dari lembaga pelatihan kerja swasta atau balai latihan kerja pemerintah [Disnakertrans] atau program khusus dari kementerian yang akan mensertifikasi profesi tertentu ... Maklum, orang di sini [wilayah perlakuan] rata-rata menempuh karirnya dari *helper*, dari membantu menggeluti bidang tertentu [jadi, tidak mengikuti sertifikasi tertentu]. (Disnakertrans KSB, laki-laki, 23 November 2022)

Tingginya minat masyarakat untuk bekerja di sektor tambang (*mining minded*) merupakan tantangan dalam pengembangan sektor ketenagakerjaan. Situasi ini mengakibatkan keengganan angkatan kerja untuk masuk ke sektor ketenagakerjaan lainnya.

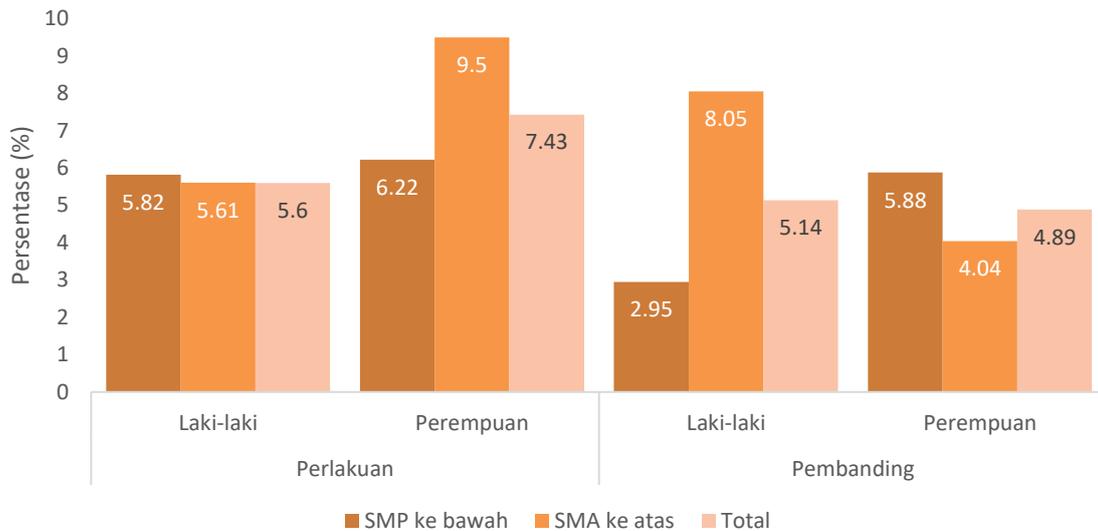
Sebenarnya *klo* dari APBN, itu ada banyak [jenis pelatihan], ada bahasa, perhotelan, itu pelatihannya ada, *tapi* kita pernah buat pelatihan itu waktu tahun 2014, *ga* ada yang mau, *ga* ada yang minat, akhirnya kita fokus ke pertambangan. (Disnakertrans KSB, perempuan, 23 November 2022)

Pada sisi kebijakan, pemda KSB telah memiliki Perbup No. 15 Tahun 2022 tentang Penggunaan Sumber Daya Lokal, termasuk SDM,¹⁵ bagi pemerintah, swasta, dan masyarakat pada setiap sektor pekerjaan. Dari beberapa wawancara, tampak bahwa masyarakat umumnya memahami penggunaan SDM lokal oleh perusahaan swasta sebatas rekrutmen dalam hubungan kerja. Dengan demikian, tidak mengherankan bahwa fokus masyarakat pada peluang kerja di sektor tambang sangat kuat. Sementara itu, menurut perbub tersebut, perusahaan swasta memang diwajibkan menyerap setidaknya 60% SDM dari masyarakat KSB, tetapi pihak swasta juga dapat melakukan perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja dalam bentuk program kewirausahaan.

Apabila persoalan pengangguran digali lebih dalam terkait gender, tampak bahwa angka pengangguran perempuan di wilayah perlakuan jauh lebih tinggi daripada laki-laki, terutama bagi perempuan berpendidikan tinggi (Gambar 20). Di wilayah perlakuan, perempuan yang masuk ke dalam angkatan kerja sebenarnya sudah relatif sedikit (lihat Subbab 2.3). Kemudian, ketika mereka masuk ke dalam angkatan kerja, kemungkinan mereka untuk menganggur lebih tinggi daripada laki-laki, terlebih jika perempuan tersebut berpendidikan tinggi. Sementara itu, bagi laki-laki, tingkat pengangguran lebih tinggi justru dialami mereka yang berpendidikan rendah. Artinya, di wilayah perlakuan, lapangan pekerjaan yang ada memerlukan tenaga kerja berpendidikan tinggi, tetapi mengutamakan laki-laki, atau jenis pekerjaannya lekat dengan pekerjaan yang lazimnya dikerjakan oleh laki-laki. Oleh karena itu, perempuan yang berpendidikan tinggi ini lebih sulit mendapatkan pekerjaan. Di sisi lain, pada perempuan yang berpendidikan relatif rendah, tingkat penganggurannya justru lebih rendah. Penyebabnya bisa jadi adalah bahwa perempuan berpendidikan rendah cenderung tidak memilih-milih pekerjaan dan dapat membuka usaha di sektor ritel, perdagangan, ataupun industri rumahan yang imbal balik pendapatannya tidak sebesar sektor jasa. Selain itu, ada kemungkinan bahwa perempuan berpendidikan rendah berasal dari kelompok kesejahteraan yang lebih rendah sehingga bekerja dengan imbal balik pendapatan kecil merupakan keharusan agar bisa bertahan hidup. Bagi perempuan berpendidikan tinggi, bekerja di sektor dengan imbal balik pendapatan rendah bisa jadi merupakan hal yang tidak menarik sehingga, akhirnya, mereka justru menjadi penganggur.

¹⁵Sumber daya lokal lainnya adalah sumber daya alam dan produk lokal.

Gambar 20. Persentase Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin



Sumber: survei SMERU, 2022

Fenomena yang berbeda terjadi di wilayah pemandang. Tingkat pengangguran perempuan di wilayah pemandang justru lebih rendah daripada tingkat pengangguran laki-laki. Tingkat pengangguran perempuan berpendidikan tinggi juga lebih rendah daripada laki-laki berpendidikan tinggi. Penyebabnya adalah bahwa jenis lapangan pekerjaan yang tersedia di wilayah pemandang, misalnya di sektor pertanian, masih memerlukan tenaga kerja tanpa keharusan kualifikasi pendidikan tinggi. Sementara itu, lapangan pekerjaan yang memerlukan tenaga kerja berpendidikan tinggi, misalnya di sektor jasa, lebih mengutamakan perempuan. Penduduk laki-laki yang berpendidikan tinggi di wilayah pemandang kesulitan mencari pekerjaan karena lapangan pekerjaan yang tersedia tidak memerlukan pendidikan tinggi. Namun, perempuan dengan pendidikan tinggi masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, khususnya di sektor jasa (tersier).

3.3 Aspek Ekonomi Nontambang

Meskipun pertambangan merupakan sektor penyumbang PDRB terbesar di KSB, sektor ini tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu dicari sektor yang sifatnya lebih berkelanjutan sebagai alternatif penunjang perekonomian selain pertambangan. Dalam laporan ini, pengembangan ekonomi sektor nontambang yang dibahas adalah pengembangan sektor pariwisata dan pemberdayaan UMKM sebagai sumber ekonomi potensial di KSB.

3.3.1 Sektor Pariwisata

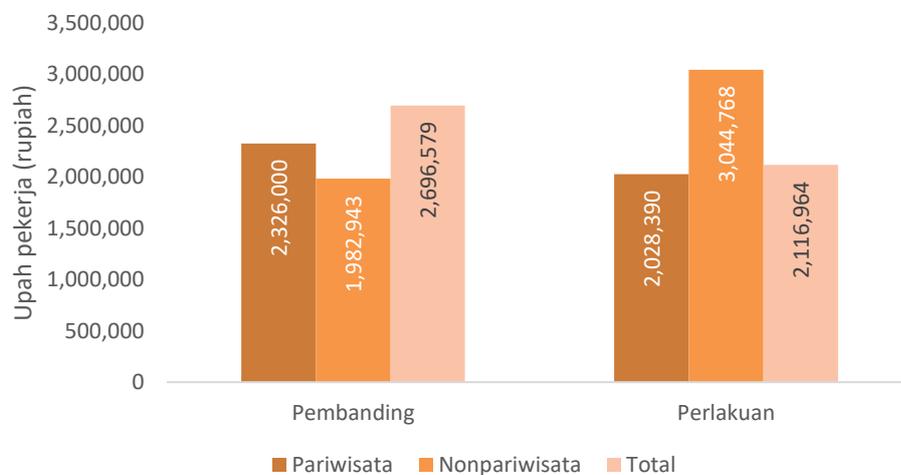
Sektor pariwisata mulai menjadi perhatian Pemda KSB karena potensinya yang besar untuk menunjang perekonomian daerah. Perhatian ini tertuang dalam sejumlah perda yang menaungi pengembangan potensi wisata di kabupaten ini. Pada 3 Agustus 2020, Pemda KSB telah menetapkan Perda No. 8 Tahun 2020 tentang Desa Wisata. Ditetapkannya perda ini menunjukkan adanya kepastian hukum bagi pengembangan desa

wisata di KSB. Untuk mengoptimalkan upaya pengembangan wisata yang terintegrasi, pada 22 Desember 2020 Pemda KSB menetapkan Perda No. 12 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata KSB 2020–2025. Arah kebijakan pembangunan pariwisata dilakukan melalui empat pilar, yakni pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, pembangunan industri pariwisata, dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan. Dengan adanya perda tersebut, pemerintah memiliki iktikad baik untuk mengembangkan potensi pariwisatanya dan sekaligus membangun SDM yang terlibat dalam sektor pariwisata.

Mulai diperhatikannya sektor pariwisata di KSB merupakan sinyal positif bagi pengembangan wisata yang saat ini belum optimal. Hal ini tecermin dari temuan kuantitatif yang mengungkap bahwa keterlibatan penduduk wilayah studi dalam industri pariwisata¹⁶ masih sangat rendah. Sebagai contoh, terdapat setidaknya 82 orang (8,42%) di wilayah perlakuan dan 28 orang (4,59%) di wilayah pembanding yang bekerja di industri pariwisata. Apabila dilihat dari jenis kelamin, persentase perempuan masih lebih besar.

Jika dilihat dari keseluruhan orang yang bekerja di industri pariwisata, tenaga kerja di sektor ini didominasi perempuan, dengan proporsi pendidikan paling banyak SMP ke bawah. Selain itu, sebagian besar pekerja industri pariwisata di kedua wilayah adalah penduduk dewasa; hal ini dibuktikan dengan usia rata-rata pekerja yang berada pada kisaran 40 tahun.

Gambar 21. Upah Pekerja Industri Pariwisata dan Nonpariwisata



Sumber: survei SMERU, 2022

Selanjutnya, berdasarkan asal wilayah, temuan kualitatif menunjukkan bahwa pekerja di sektor pariwisata masih didominasi penduduk dari luar KSB, misalnya dari Lombok dan Bali. Penduduk lokal kurang tertarik bekerja di bidang pariwisata karena, dari sisi upah dan kebanggaan diri (*pride*), pekerjaan di sektor tambang lebih menarik. Pemuda belum mampu melihat manfaat jangka panjang dari pengembangan pariwisata sehingga sektor

¹⁶Industri pariwisata dalam studi ini berfokus pada tenaga kerja atau usaha yang terkait langsung dengan kegiatan pariwisata; hal ini mengikuti klasifikasi industri pariwisata yang disusun BPS dalam laporan *Tourism Satellite Account (TSA) 2016–2019*.

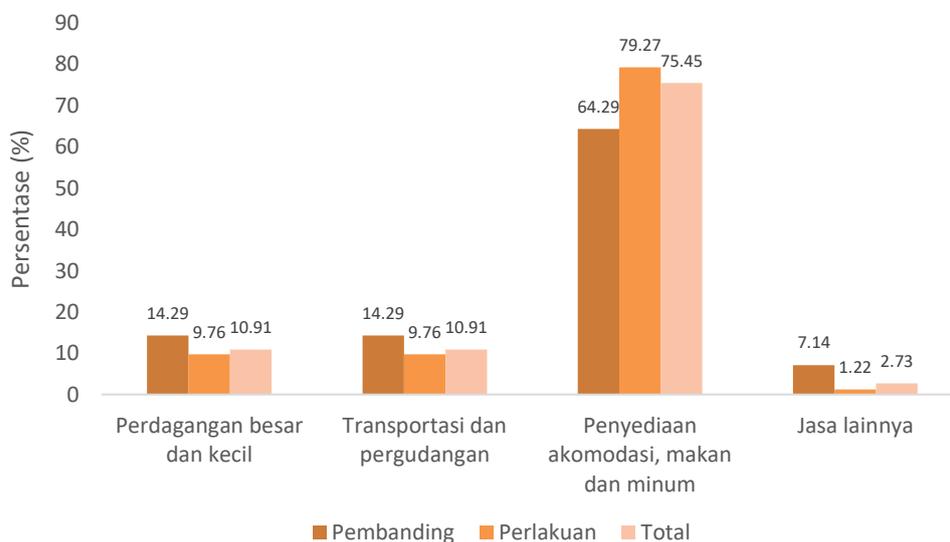
ini dianggap kurang menjanjikan. Hanya ada beberapa orang pemuda yang tertarik untuk terjun di bidang pariwisata. Namun, berdasarkan wawancara mendalam, kapasitas mereka dalam keterampilan bahasa, pelayanan tamu, dan pengolahan makanan di restoran masih lebih rendah daripada pekerja pendatang.

Dari sisi pendapatan/upah per bulan, pekerja industri pariwisata di wilayah perlakuan terlihat mendapatkan pendapatan yang lebih kecil daripada pekerja industri pariwisata di wilayah perbandingan (Gambar 21). Tidak hanya itu, pendapatan mereka juga lebih kecil daripada pendapatan pekerja industri nonpariwisata di wilayah yang sama.

Pendapatan/upah yang kecil merupakan faktor utama yang menyebabkan rendahnya minat penduduk, termasuk pemuda, untuk bekerja di sektor pariwisata, selain faktor kebanggaan diri. Hal ini sejalan dengan keterangan informan kualitatif yang menekankan persoalan upah di sektor pariwisata. Isu ini perlu menjadi perhatian, khususnya dalam hal bagaimana meningkatkan nilai tambah bidang pariwisata agar penduduk bisa memiliki orientasi pekerjaan selain di sektor pertambangan.

Pemuda di sini jika tidak bekerja di dalam [perusahaan tambang], *ndak* berminat. Ada *sih* pemuda di sini satu dua ambil jurusan perhotelan, *tapi* belum lulus kuliah. Memang *sih* bekerja di dalam [perusahaan tambang] saat ini lebih menjanjikan dari sisi *salary*. Gaji di bidang pariwisata, misalnya, 2.500.000, kalau ditambah dengan gaji *service*, naik *sih*, *tapi* naiknya sedikit, tergantung jumlah tamu. (Manajer hotel, laki-laki, Kecamatan A, KSB, 21 November 2022)

Gambar 22. Sektor Pekerjaan di Industri Pariwisata¹⁷



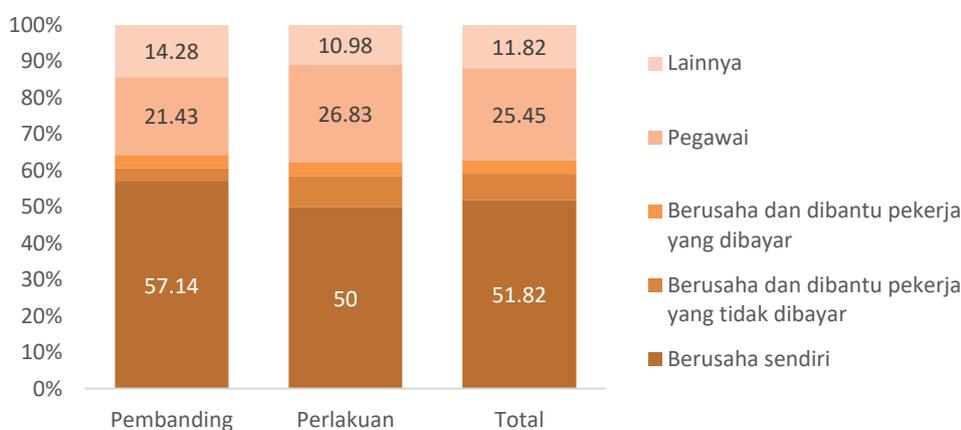
Sumber: survei SMERU, 2022

¹⁷Perdagangan besar atau grosir yang dimaksud dalam studi ini mengacu kepada kegiatan membeli barang secara langsung dari pabrik dan menjualnya kembali kepada pedagang kecil, sedangkan perdagangan kecil atau eceran mengacu kepada kegiatan membeli barang dari pedagang besar dan menjualnya secara langsung kepada konsumen. Sementara itu, jasa lainnya adalah sektor yang meliputi jasa-jasa yang tidak dapat dikelompokkan, misalnya pijat refleksi dan spa.

Baik di wilayah perlakuan maupun pembanding, bidang pekerjaan yang paling banyak digeluti dalam industri pariwisata adalah penyediaan akomodasi, makanan, dan minuman (Gambar 22). Di dalamnya, tercakup penyediaan jasa penginapan hotel, pondok wisata, vila, restoran, warung/kedai makan, kafe/bar, serta penyediaan makanan dan minuman lainnya dengan tempat yang tetap dan tidak tetap. Sementara itu, proporsi terbesar kedua adalah perdagangan besar dan kecil serta jasa transportasi.

Selain itu, karena didominasi industri makanan dan minuman, pekerja di sektor pariwisata paling banyak berstatus sebagai pengusaha—baik bekerja sendiri maupun dibantu pekerja yang dibayar/tidak dibayar (Gambar 23). Hasil survei *baseline* menunjukkan bahwa setidaknya 62% pekerja di sektor pariwisata berstatus sebagai pengusaha.

Gambar 23. Status Pekerjaan pada Industri Pariwisata



Sumber: survei SMERU, 2022

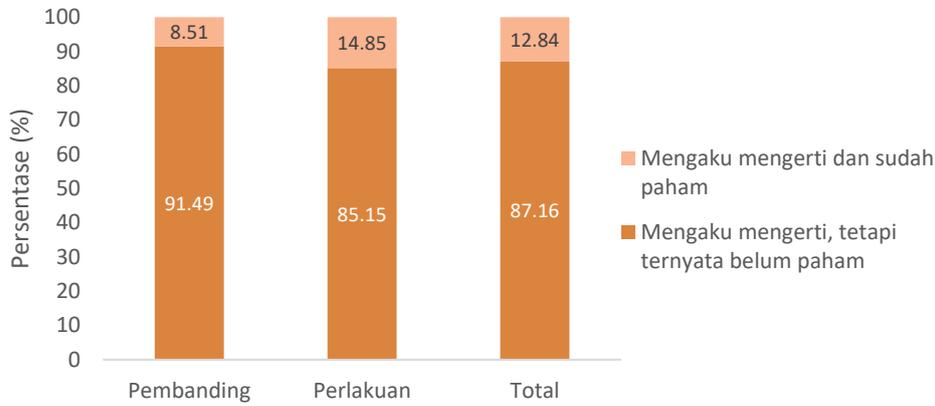
Di samping itu, data kuantitatif menunjukkan sedikitnya penduduk di kedua wilayah studi yang memahami arti kata *ekowisata*. Hanya sekitar 148 orang (6,4%) penduduk di kedua wilayah studi mengaku mengetahui atau pernah mendengar istilah ini. Namun, jumlah orang yang benar-benar memahami istilah ini hanya 19 orang. Gambar 24 memperlihatkan bahwa, dari orang-orang yang pernah mendengar atau mengaku memahami istilah *ekowisata*, proporsi yang benar-benar memahami artinya didapati lebih tinggi di wilayah perlakuan (14,8%) daripada wilayah pembanding (8,5%), tetapi dengan angka absolut yang kecil.

Masih minimnya pemahaman masyarakat akan konsep ekowisata mengindikasikan belum terarusutamakannya konsep-konsep pariwisata di benak masyarakat. Oleh karena itu, membangun kesadaran mengenai pentingnya mengembangkan pariwisata menjadi langkah awal yang perlu digencarkan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Langkah awal ini perlu dilakukan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan (*sense of belonging*) masyarakat akan potensi pariwisata di daerahnya. Jika rasa kepemilikan itu tumbuh, upaya pelibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata bisa lebih mudah.

Selain anggaran, kendala lainnya [dalam] mengembangkan wisata adalah sikap pemerintah desa atau pelaku wisata itu sendiri [belum ada inisiatif yang masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengembangkan potensi wisata dan manfaatnya bagi penduduk]. Kepala desa sebenarnya bisa saja memotivasi pemuda desa

untuk mengembangkan wisata melalui pokdarwis [kelompok sadar wisata], tetapi hal ini belum banyak digencarkan. Memang bicara pariwisata memang harus kerja “gila” dulu, tidak langsung dapat mengundang kunjungan. (Staf Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga KSB, laki-laki, 24 November 2022)

Gambar 24. Persentase Penduduk yang Memahami Konsep Ekowisata



Sumber: survei SMERU, 2022

Keterlibatan penduduk usia di atas 17 tahun dalam kegiatan pokdarwis juga terlihat masih sangat rendah (kurang dari 3%). Meski demikian, berdasarkan survei kuantitatif, ada lebih banyak penduduk yang mengikuti kegiatan pokdarwis di wilayah perlakuan (29 orang) daripada di wilayah pembanding (8 orang).

Keberadaan pokdarwis, sebagai sebuah lembaga, yang selalu digaungkan dalam pengembangan wisata pada tingkat desa bertolak belakang dengan temuan kualitatif. Para informan dari tingkat desa hingga kabupaten menyatakan bahwa keberadaan pokdarwis di KSB masih menjadi persoalan, yakni belum adanya perhatian serius terhadap keberadaan pokdarwis dan masih minimnya pengembangan kapasitas SDM pokdarwis pada tingkat desa.

Gambar 25. Penduduk Berusia di Atas 17 Tahun yang Mengikuti Kegiatan Pokdarwis

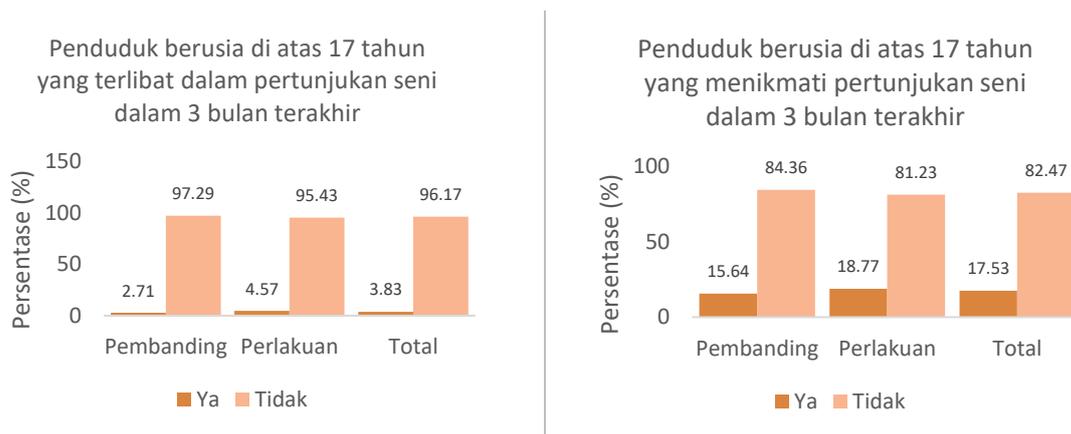


Sumber: survei SMERU, 2022

Keterlibatan penduduk usia di atas 17 tahun dalam kegiatan pertunjukan/pameran seni pada tiga bulan terakhir juga terlihat sangat rendah (4,6% di wilayah perlakuan; 2,8% di wilayah pembanding), seperti terlihat pada Gambar 26. Hal ini menunjukkan sedikitnya penduduk yang aktif dalam kegiatan kesenian. Namun, untuk penduduk yang menikmati pertunjukan seni, jumlahnya masih relatif lebih baik meski masih di bawah 20%. Penduduk di wilayah perlakuan sedikit lebih aktif daripada penduduk di wilayah pembanding dalam hal keterlibatan ataupun kegiatan menikmati pertunjukan seni (Gambar 26).

Selain itu, temuan kualitatif menunjukkan bahwa, dari tiga aspek krusial dalam pengembangan destinasi pariwisata (amenitas, aksesibilitas, dan atraksi), aspek atraksi budaya masih belum optimal. Dua faktor yang menyebabkan belum optimalnya pengembangan aspek atraksi budaya adalah kesulitan dalam promosi dan pendanaan kegiatan. Hal ini sangat disayangkan karena KSB sebenarnya memiliki banyak atraksi budaya yang merupakan ciri khas daerah; di antaranya adalah Festival Balona dan Barapan Kebo yang pelaksanaannya biasanya diorganisasi masyarakat setempat.

Gambar 26. Penduduk Usia di Atas 17 Tahun yang Terlibat dalam–dan Menikmati–Pertunjukan Seni pada Tiga Bulan Terakhir



Sumber: survei SMERU, 2022

Faktor Pendorong dan Penghambat Pengembangan Pariwisata

Berdasarkan analisis di atas, terdapat sejumlah hal yang dapat dikategorikan sebagai faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pengembangan pariwisata di wilayah perlakuan. Secara umum, keberadaan faktor-faktor penghambat masih dominan jika dibandingkan dengan faktor-faktor yang mendukung pengembangan pariwisata.

Faktor Pendorong

- a) Pemda memiliki iktikad baik untuk mengembangkan pariwisata di KSB sebagai sektor potensial selain pertambangan yang dapat mendorong perekonomian. Adanya sejumlah peraturan daerah menegaskan arah pembangunan KSB setelah tambang selesai beroperasi. Selain itu, adanya aturan tertulis tersebut juga menandakan makin terbukanya ruang gerak pemangku kepentingan terkait dan pemerintah lintas sektor dalam mengembangkan potensi pariwisata KSB. Dengan demikian, kesempatan masyarakat untuk terlibat dalam sektor ini dapat terbuka lebar.

Pengembangan pariwisata menjadi salah satu prioritas yang kini sudah pada tahapan penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata dengan penekanan pada Program Pariwisata Terintegrasi. Pengembangan pariwisata menjadi prioritas karena mengacu pada pentingnya mempersiapkan sektor nontambang. Untuk Program Pariwisata Terintegrasi, bukan hanya menjadi tanggung jawab sektoral Dinas Pariwisata semata, akan tetapi juga sektor ekonomi lainnya, seperti pengembangan dan pendampingan koperasi dan UMKM. (Staf Bappeda KSB, laki-laki, 23 November 2022)

- b) Berdasarkan temuan kualitatif, saat ini pengurusan izin usaha bidang *hospitality*, khususnya perhotelan, makin mudah, dibandingkan dengan situasi beberapa tahun yang lalu. Pemerintah pada tingkat desa hingga kabupaten tampak bersinergi untuk membuka ruang perizinan bagi pelaku usaha. Pemerintah kabupaten juga makin memudahkan akses informasi terkait perizinan. Hal ini dilakukan melalui sosialisasi perizinan usaha satu pintu kepada para pelaku bisnis perhotelan setempat. Jika dianalisis lebih lanjut, adanya kemudahan perizinan usaha ini juga merupakan sebuah langkah untuk menarik investor lokal maupun investor dari luar KSB.

Proses mengurus perizinan saat ini *semakin* mudah. Pengurusan dokumen di *level* desa *semakin* mudah tanpa dipungut biaya apa pun. Tindak lanjut dokumen perizinan di *level* kabupaten juga *semakin* cepat dan mudah. Izin usaha perhotelan akan semakin mudah jika badan usaha sudah memiliki izin Upaya Pengelolaan Lingkungan–Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).¹⁸ (Manajer hotel, laki-laki, Kecamatan A, KSB, 21 November 2022)

- c) Konsolidasi antarpelaku usaha perhotelan mulai terjadi. Di wilayah perlakuan, terdapat grup WhatsApp pelaku usaha perhotelan yang difungsikan sebagai sarana pertukaran informasi terkait usaha *hospitality*, misalnya sosialisasi pemerintah tentang pengembangan potensi pariwisata KSB, pentingnya pengelolaan lingkungan bagi pelaku usaha pariwisata, dan tata cara perizinan satu pintu untuk badan usaha yang bergerak di bidang pariwisata. Meskipun keberadaan grup konsolidasi tersebut belum terlembagakan secara formal, hal ini menunjukkan bahwa jejaring sosial antarpelaku usaha pariwisata makin berfungsi. Selain itu, keberadaan grup konsolidasi tersebut menandakan terbangunnya solidaritas antarpelaku usaha pariwisata untuk memajukan potensi sektor *hospitality* di KSB.

Faktor Penghambat

- a) Beberapa temuan studi ini menunjukkan bahwa kesadaran kolektif akan pentingnya pengembangan pariwisata di KSB belum sepenuhnya terbentuk. Pembangunan kesadaran kolektif di tingkat pemerintah hingga masyarakat ini penting untuk menggugah komitmen semua pihak agar bersinergi dalam mengembangkan pariwisata di KSB. Pada tingkat pemerintah, sudah ada Rencana Induk Pengembangan Wisata dan perda lainnya terkait pariwisata. Namun, aturan dan instruksi turunannya hingga tingkat pemerintah desa perlu dipastikan. Tujuannya adalah agar berbagai aturan ini bisa diimplementasikan hingga tingkat akar rumput. Kerja sama lintas lembaga di tingkat pemerintah juga diperlukan untuk memperjelas pembagian tugas pengembangan pariwisata. Dari sisi masyarakat, warga menyadari keberadaan tempat-

¹⁸UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan untuk proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan (Pratama, 2015).

tempat wisata, tetapi belum memahami kontribusi apa yang dapat mereka lakukan untuk mengembangkan potensi pariwisata tersebut. Pada dasarnya, kontribusi masyarakat di sektor wisata dapat dilakukan melalui berbagai saluran, misalnya dengan melibatkan karang taruna maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setempat. Namun, berdasarkan hasil wawancara, pelibatan semacam ini belum terlalu terlihat dalam masyarakat desa, padahal pelibatan masyarakat secara aktif melalui karang taruna maupun BUMDes berpotensi menambah pemasukan desa dari sektor wisata. Inisiatif seperti ini belum terlalu terlihat sehingga pengembangan potensi pariwisata masih "jalan di tempat" yang berdampak pada belum maksimalnya penciptaan lapangan kerja di sektor ini.

- b) Pembentukan lembaga pendukung pariwisata, seperti pokdarwis, di tingkat desa masih problematis. Adapun di antara desa-desa dengan pokdarwis, ada desa yang pokdarwisnya sudah mulai mengelola tempat wisata dan ada pula yang belum. Pokdarwis yang sudah berjalan pun masih menghadapi tantangan terkait tata kelola kelembagaan dan penguatan kapasitas SDM.

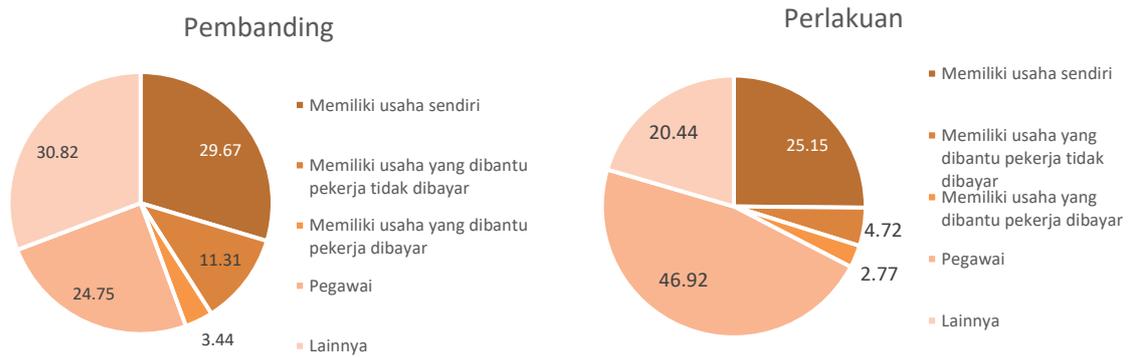
Sampai 2022, belum ada dukungan seperti pelatihan untuk mereka [anggota pokdarwis], *tapi* untuk 2023, sudah dianggarkan untuk pelatihan guna meningkatkan kapasitas, kira-kira akan melibatkan kurang lebih 40 orang. Dari data yang kami miliki, dari total 43 pokdarwis, lebih kurang 19 saja yang masih aktif, *tapi* itu data dari tahun dulu. Yang paling aktif saat ini sekitar 10 pokdarwis. *Tapi* yang lebih gencarnya saat ini adalah pokdarwis di Desa W, X, Y dan Z [nama desa disamarkan]. Dikatakan aktif standarnya berdasarkan jumlah kunjungan dan kegiatan. Ini tolak [tolok] ukur wisata kita maju atau tidak. (Staf Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga KSB, laki-laki, 24 November 2022)

- c) *Mining mindset* masih kuat di tengah masyarakat, termasuk pemuda. Pekerjaan di sektor pertambangan masih menjadi pilihan utama karena dianggap mampu memberikan keuntungan ekonomi yang besar. Masyarakat belum mampu melihat dampak jangka panjang pengembangan pariwisata.
- d) Pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata belum maksimal. Pemda sudah mengupayakan pembangunan infrastruktur penunjang, seperti perbaikan jalan, listrik, akses internet, serta sarana air bersih dan sanitasi, tetapi pembangunan ini belum maksimal. Infrastruktur jalan merupakan hal yang paling dikeluhkan pelaku usaha pariwisata, padahal jalan memiliki fungsi sangat penting untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah. Kondisi jalan yang belum baik menghambat mobilitas masyarakat, termasuk pengunjung lokasi wisata.

3.3.2 Sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Meskipun desain studi tim kuantitatif tidak secara khusus menasar usaha sebagai unit responden (melainkan rumah tangga), survei menemukan bahwa setidaknya 37,2% penduduk yang bekerja sebagai pengusaha. Sementara itu, jika dilihat dari wilayah studi, proporsi pengusaha lebih banyak ditemukan di wilayah perbandingan (44,4%) daripada di wilayah perlakuan (32,6%) (Gambar 27).

Gambar 27. Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Status Usaha



Sumber: survei SMERU, 2022

Berdasarkan definisi paling sederhana dari de Mel, McKenzie, dan Woodruff (2008) dan Djankov *et al.* (2005), ciri paling dasar untuk menilai bahwa sebuah usaha itu sukses adalah apabila usaha tersebut memiliki setidaknya satu orang pekerja yang dibayar. Dengan menggunakan definisi tersebut, dapat kita lihat bahwa jumlahnya masih kecil, yaitu sekitar 3,4% di wilayah pembanding dan 2,8% di wilayah perlakuan.

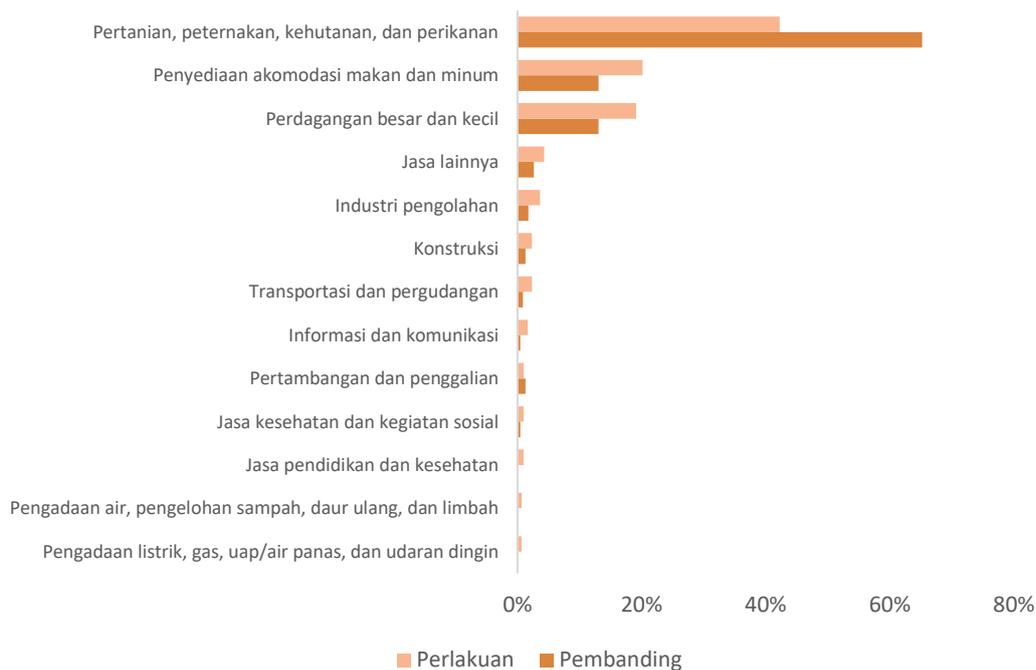
Gambar 28. Profil UMKM Wilayah Studi



Sumber: survei SMERU, 2022

Akan tetapi, tidak semua usaha dapat dikategorikan sebagai UMK. Dengan menggunakan definisi UMK paling sederhana dari BPS, kita dapat menyimpulkan bahwa UMK adalah usaha dengan jumlah pekerja yang tidak lebih dari sepuluh orang. Berdasarkan definisi tersebut, dapat kita lihat bahwa jumlah UMK ternyata tidak jauh berbeda, yakni bahwa setidaknya 90,3% usaha yang ada pada data kuantitatif merupakan UMK. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mayoritas usaha di wilayah studi merupakan usaha yang termasuk dalam kategori mikro dan kecil (Gambar 28).

Gambar 29. UMK menurut Sektor Pekerjaan



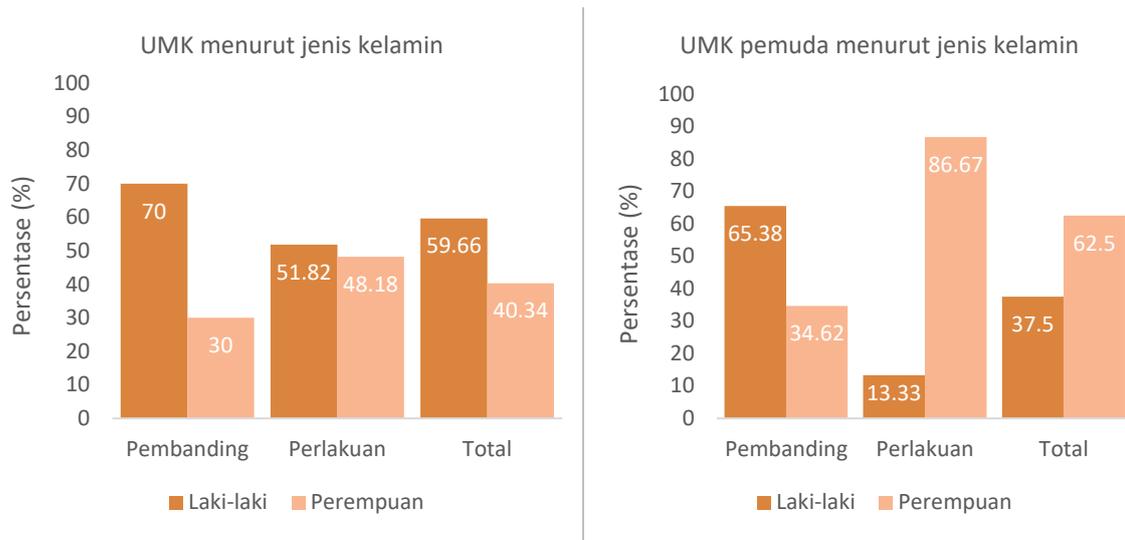
Sumber: survei SMERU, 2022

Di wilayah studi, UMK paling banyak ditemukan di sektor pertanian; mereka pada umumnya merupakan petani jagung, peternak, dan nelayan (Gambar 29). Namun, jika kita perhatikan sektor nonpertanian, kita akan menjumpai sektor lain, seperti penyediaan akomodasi, makanan, dan minuman; perdagangan besar dan kecil; jasa lain, seperti penatu, pangkas rambut, pengasuh/pembantu rumah tangga, dan jasa rias; serta industri pengolahan. Hal ini terjadi di kedua wilayah studi. Meski demikian, proporsi UMK yang berada di sektor nonpertanian terlihat lebih besar di wilayah perlakuan (57,76%) daripada di wilayah pemandangan (37,78%). Namun, industri pengolahan (dalam hal ini termasuk industri rumahan) yang memiliki peranan besar dalam perekonomian suatu wilayah (Kniivila, 2007; Rahmah dan Widodo, 2019) memiliki proporsi yang cukup kecil.

Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin, UMK di kedua wilayah studi masih didominasi UMK milik laki-laki, terutama di wilayah pemandangan. Adapun tingkat pendidikan, mayoritas pengusaha (67,6%) berada di kelompok SMP ke bawah, dengan usia rata-rata 42 tahun (89,5% pengusaha berada dalam kelompok usia dewasa). Proporsi perempuan yang menjadi pengusaha muda di wilayah perlakuan jauh lebih tinggi daripada laki-laki.

Temuan kualitatif menunjukkan bahwa bidang usaha yang pada umumnya dijalankan perempuan muda di wilayah perlakuan adalah usaha daring, seperti menjadi penjual (*reseller*) baju, kosmetik, dan peralatan rumah tangga. Sementara itu, laki-laki muda masih cenderung memiliki *mining mindset*, yakni bahwa ketertarikan mereka untuk bekerja di perusahaan tambang ataupun perusahaan subkontraktor Amman masih jauh lebih besar daripada ketertarikan untuk membangun usaha sendiri. Pemuda yang memutuskan untuk menjalankan usaha di wilayah perlakuan pun masih menghadapi kendala, khususnya dalam hal perputaran uang, karena proses pembayaran dari pembeli cukup lama. Hal ini menghambat pelaku usaha untuk melakukan pembayaran kepada petani mitra.

Gambar 30. UMK dan UMK Pemuda menurut Jenis Kelamin



Sumber: survei SMERU, 2022

Selanjutnya, sebagian besar UMK di wilayah studi tidak memiliki sertifikat untuk izin usaha. Hal ini terjadi di kedua wilayah studi dengan proporsi yang cukup besar. Hanya ada 13,04% usaha di wilayah pembanding yang memiliki sertifikat dan sekitar 21,9% di wilayah perlakuan.

Keterbatasan SDM dan modal tampaknya masih menjadi penghambat bagi pelaku UMK dalam mengurus izin usaha. Temuan kualitatif menunjukkan bahwa pelaku UMK sulit mengurus izin secara daring karena keterbatasan mereka dalam mengoperasikan perangkat elektronik berbasis teknologi digital. Alhasil, pelaku UMK lebih memilih mendatangi dinas-dinas terkait untuk mengurus perizinan secara luar jaringan (luring). Hal ini berpotensi membuat proses perizinan makin lama, padahal cara efektif dan efisien melalui sistem daring sudah disediakan pemerintah. Meskipun demikian, hal ini juga dapat diartikan bahwa pelaku UMK di KSB memerlukan pendampingan secara intensif, termasuk dalam hal penggunaan teknologi untuk menunjang berbagai hal terkait usahanya.

HAKI, [sertifikasi] halal, sampai NIB, PIRT¹⁹ itu semua prosesnya bisa *online* [daring] ... rata-rata pelaku IKM²⁰-nya ini *gaptek* [gagap teknologi] karena rata-rata pelaku sudah berumur, jadi *tetep* datang ke sini, ya tetap kita dampingi ... *ga* kita abaikan mereka. ... Saya pernah tanya *kenapa kok* mengurusnya lama, ini HP-nya begini, internetnya begini, lebih ke teknologi *klo* yang saya lihat. (Staf Diskoperindag KSB, laki-laki, 24 November 2022)

Selain persoalan SDM, kemungkinan besar ada persoalan keterbatasan modal dalam mengurus perizinan karena, berdasarkan temuan kualitatif, sejumlah sertifikasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk usaha sekelas UMKM. Hal ini mungkin memberatkan bagi pelaku UMKM sehingga tidak banyak yang mengurus berbagai perizinan yang dibutuhkan. Di sisi lain, tampak ada upaya dari pemerintah untuk

¹⁹HAKI: hak atas kekayaan intelektual; NIB: nomor induk berusaha; PIRT: pangan industri rumah tangga

²⁰industri kecil dan menengah

mengatasi persoalan ini melalui bantuan pengurusan legalitas usaha, termasuk subsidi biaya pengurusan sertifikasi usaha.

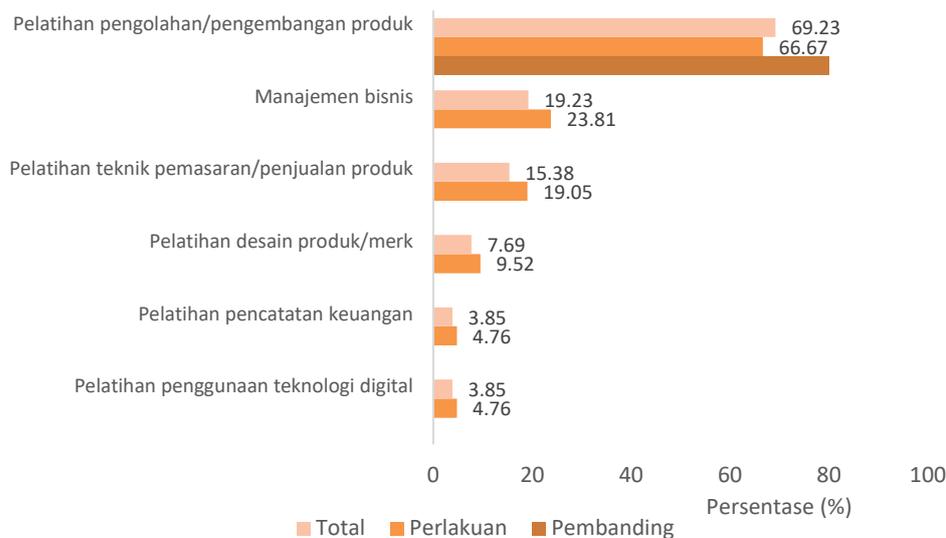
Proporsi pelaku usaha yang mendapatkan pelatihan juga relatif kecil, yakni hanya 4,9% dalam setahun terakhir. Dalam hal ini, proporsi di wilayah perlakuan masih lebih besar (7,0%) daripada di wilayah pembanding (2,2%).

Dari berbagai pelatihan yang diikuti pengusaha, pelatihan yang paling banyak tersedia adalah pelatihan pengolahan atau pengembangan produk dan manajemen bisnis. Berdasarkan wilayah, jenis pelatihan lebih banyak ditemukan di wilayah perlakuan daripada wilayah pembanding (Gambar 31). Di wilayah pembanding, satu-satunya jenis pelatihan yang ada adalah pengolahan atau pengembangan produk. Sementara itu, jenis pelatihan yang paling sedikit diikuti pengusaha adalah penggunaan teknologi digital. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa hanya sekitar 23,64% pengusaha yang memanfaatkan internet di wilayah studi, misalnya untuk kegiatan komunikasi, promosi, dan transaksi. Di sisi lain, manfaat digitalisasi bagi suatu unit usaha sangatlah banyak, termasuk mendorong inklusi, inovasi, dan efisiensi (World Bank, 2016), serta bisa menjadi cara alternatif untuk bertahan pada masa pandemi (Bachtiar, Kusumawardhani, dan Indrio, 2022). Dalam hal pemanfaatan internet untuk kegiatan usaha, wilayah perlakuan masih lebih baik (30,36%) daripada wilayah pembanding (14,74%) meski masih dibutuhkan lebih banyak pelatihan terkait penggunaan teknologi digital agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih optimal.

Sedikitnya pelaku usaha yang mengikuti pelatihan berimplikasi pada minimnya pengetahuan mereka tentang pengelolaan usaha. Hal ini tecermin dari temuan kualitatif bahwa sejumlah pelaku usaha tidak mencatat penghitungan laba-rugi dan perputaran arus kas secara terperinci. Mereka bisa melakukan penghitungan jual beli secara sederhana, tetapi belum sampai ke perencanaan dan pencatatan keuangan bisnis secara matang.

Program pengembangan wirausaha yang sebenarnya diperlukan, namun belum tersedia terkait dengan pencatatan dan pelaporan dari usaha kios. Sejauh ini saya hanya melakukan pencatatan sederhana untuk barang-barang yang dibeli, *tapi* belum pernah melakukan pembukuan/pencatatan terkait modal, keuntungan, dan pengeluaran/kebutuhan lain yang kadang diambil dari kios. (ASN dan pemilik kios sembako, laki-laki, Kecamatan H, Kabupaten Sumbawa, 25 November 2022)

Gambar 31. Pelatihan yang Diikuti UMK dalam Setahun Terakhir



Sumber: survei SMERU, 2022

Meski demikian, terkait akses UMK terhadap kredit usaha, kondisinya sudah cukup baik, yaitu bahwa lebih dari separuh pelaku usaha sudah memiliki akses terhadap pinjaman kredit untuk keperluan usaha, khususnya di wilayah perbandingan.

Temuan ini diperkuat oleh data kualitatif yang menunjukkan bahwa masyarakat yang membuka usaha sudah berani mengakses kredit usaha. Hal ini memperlihatkan adanya keinginan pelaku usaha untuk makin mengembangkan usahanya. Salah satu informan mengungkapkan bahwa kredit usaha tersebut digunakan untuk mengembangkan usahanya menjadi sebuah unit dagang (UD).

Pernah mengakses pinjaman ke BNI sebesar 200 juta [rupiah] dengan tenor pengembalian dua tahun untuk modal usaha, *tapi* ada kesulitan dalam pembayaran cicilan per bulannya. Pernah juga pada 2003 meminjam modal ke BNI yang bisa membantu untuk mengembangkan usaha jualan menjadi UD yang ada surat izinnya. Yang mengurus perizinan UD waktu itu suami. (Petani dan pedagang, perempuan, Kecamatan A, KSB, 21 November 2022)

Di sisi lain, temuan kualitatif juga menunjukkan bahwa ada sebagian masyarakat yang tidak berani meminjam dana melalui kredit usaha karena takut tidak mampu membayar cicilan bulanan. Ketakutan ini muncul karena informan menganggap bahwa perputaran uang belum tentu ada setiap hari. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaku usaha masih memerlukan peningkatan kapasitas dalam menjalankan usaha, khususnya terkait manajemen usaha, pemasaran produk, dan pengelolaan keuangan.

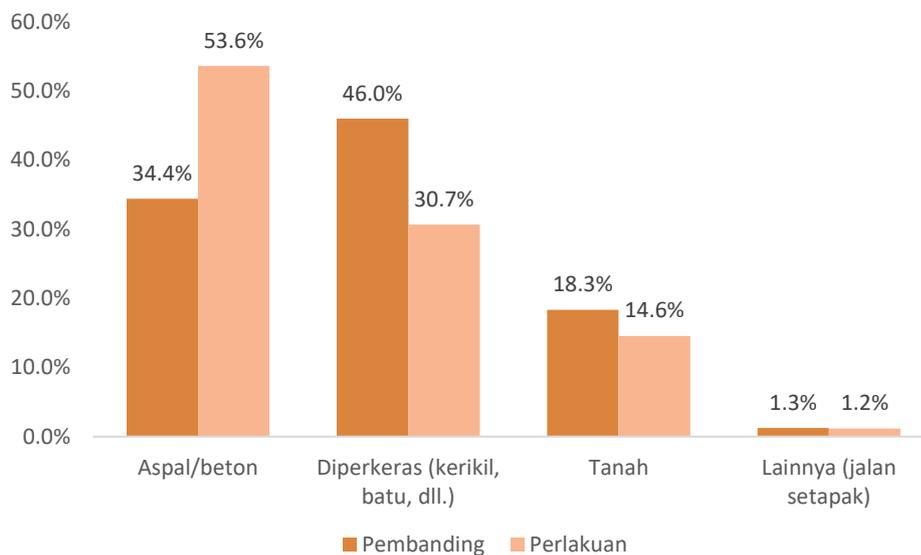
Kami *sih* butuh modal. Selain modal tidak ada. Saya butuh modal untuk usaha lain lagi. Ingin jual gado-gado lagi. Sejak korona, usaha gado-gado tutup sampai sekarang. Saya pernah pinjam modal usaha ke ipar saja. Di bank tidak pernah, kalau di bank *kan* wajib bayar bulanan, sementara kita *kan* tidak tahu apakah tiap hari ada orang belanja atau tidak (Wiraswasta, perempuan, Kecamatan H, Kabupaten Sumbawa, 25 November 2022)

3.4 Aspek Infrastruktur Ekonomi

3.4.1 Infrastruktur Jalan

Secara umum, jalan di wilayah perlakuan maupun pembanding dinilai berada dalam kondisi baik. Sebagian besar rumah tangga di wilayah perlakuan menyatakan bahwa permukaan jalan menuju tempat tinggal mereka terbuat dari aspal/beton. Sementara itu, sebagian besar jalan menuju tempat tinggal rumah tangga di wilayah pembanding adalah jalan dari kerikil dan batu yang diperkeras (Gambar 32). Dua jenis permukaan jalan ini mengindikasikan jalan yang kualitasnya sudah relatif baik, dibandingkan dengan jenis permukaan jalan lainnya.

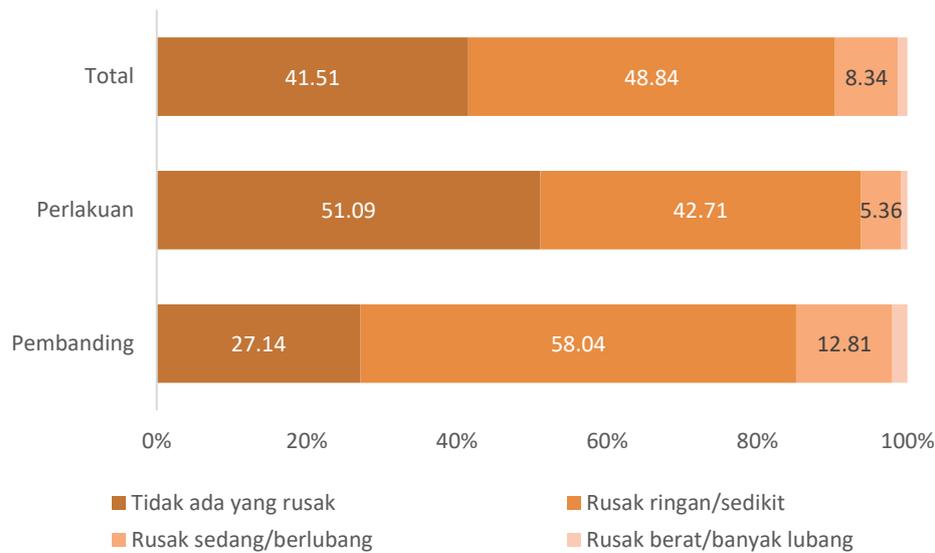
Gambar 32. Kondisi Permukaan Jalan Menuju/di Sekitar Rumah Responden



Sumber: survei SMERU, 2022

Mayoritas rumah tangga yang disurvei melaporkan kondisi jalan yang tidak rusak atau hanya mengalami kerusakan ringan/sedikit (Gambar 33). Hasil wawancara kualitatif menunjukkan bahwa pembangunan dan perbaikan jalan dilakukan tidak hanya oleh pemerintah provinsi dan kabupaten, tetapi juga oleh pemerintah desa sesuai dengan pembagian kewenangannya. Belum semua jalan di lingkungan desa diperbaiki karena keterbatasan keuangan desa. Di wilayah perlakuan, ada warga yang mengeluhkan penurunan kualitas jalan; hal tersebut mungkin disebabkan oleh penggunaan jalan untuk transportasi sektor pertambangan.

Gambar 33. Kondisi Kualitas Jalan Menuju/di Sekitar Rumah Responden



Sumber: survei SMERU, 2022

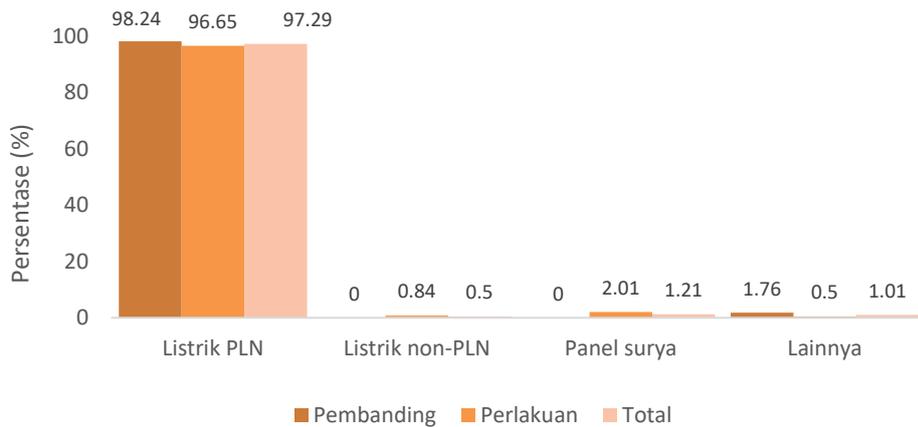
Belum meratanya kualitas jalan sebagai sarana penghubung dapat memengaruhi kelancaran kegiatan ekonomi masyarakat. Contohnya adalah pengiriman antarwilayah produk pangan mudah rusak (*perishable*), seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Produk tersebut mengandalkan penyimpanan (*storage*) yang baik dan kecepatan pengiriman untuk memastikan bahwa produk tetap layak dikonsumsi.

Kadang kalau lama di jalan *kan* [sayuran dan buah] layu, terus terlambat masuk gudang [pembeli]. Nah, kalau sudah layu atau kualitasnya kurang baik; itu bisa ditolak masuk [oleh pembeli]. Yang *kasian kan* mitra lapangan kami karena kalau [ada] pengembalian, kami tidak bisa membayar barang mereka. (Tenaga kesehatan dan pemilik usaha, laki-laki, Kecamatan A, KSB, 21 November 2022)

3.4.2 Infrastruktur Listrik

Hasil survei memperlihatkan bahwa lebih dari 95% rumah tangga di wilayah perlakuan dan pembanding memiliki akses listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Bahkan, ada rumah tangga yang telah menggunakan panel surya untuk sumber listrik utama (Gambar 34). Terkait listrik PLN, ada warga yang mengaksesnya dengan berlangganan secara langsung dan ada pula yang mengaksesnya dengan menumpang pada sambungan listrik rumah tangga lain.

Gambar 34. Sumber Listrik



Sumber: survei SMERU, 2022

Kualitas listrik yang diterima rumah tangga juga sudah lumayan baik. Berdasarkan data kuantitatif, 92,06% rumah tangga yang disurvei menyatakan mengalami pemadaman listrik 0–5 kali dalam sebulan. Adapun untuk wilayah studi, angkanya mencapai 95,98% di wilayah pembanding dan 89,45% di wilayah perlakuan (Gambar 35). Hasil survei menunjukkan bahwa frekuensi pemadaman listrik paling sering terjadi di kedua wilayah studi adalah 0–2 kali dalam sebulan. Tantangan dalam penggunaan listrik yang ditemukan pada wawancara kualitatif adalah adanya pemadaman listrik tanpa pemberitahuan sebelumnya; sebagai akibatnya, aktivitas warga terganggu karena tidak ada antisipasi.

Gambar 35. Frekuensi Pemadaman Listrik

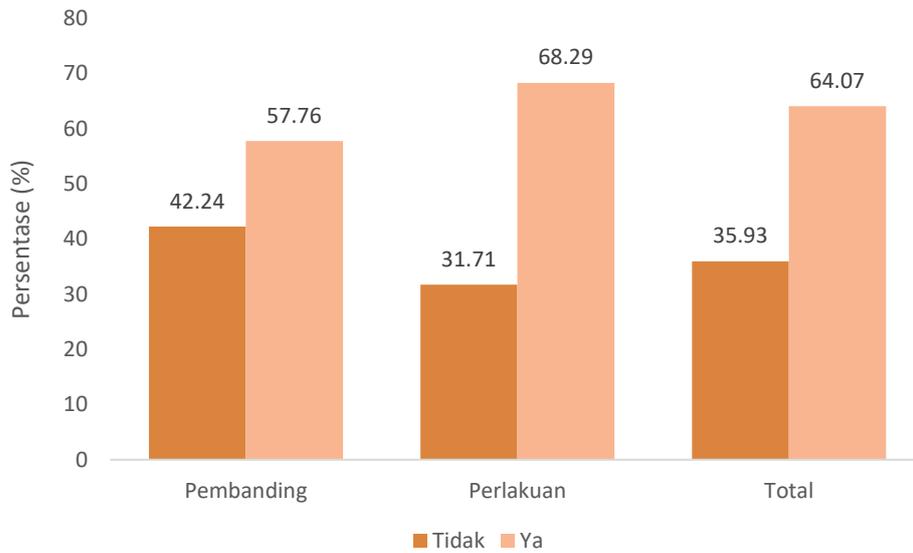


Sumber: survei SMERU, 2022

3.4.3 Infrastruktur Internet

Terdapat sekitar 68,3% penduduk berusia di atas 15 tahun di wilayah perlakuan yang menyatakan telah mengakses internet setidaknya dalam 3 bulan terakhir, sementara di wilayah pembanding angkanya mencapai 57,76% (Gambar 36). Angka ini relatif lebih tinggi daripada angka rata-rata penduduk yang mengakses internet di tingkat Provinsi NTB (52,27%) walaupun belum melampaui angka rata-rata nasional (62,14%) berdasarkan Survei Sosial-Ekonomi Nasional (Susenas) 2021.

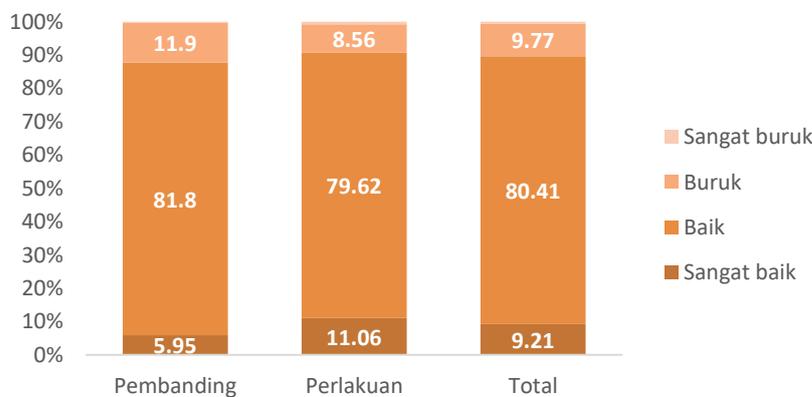
Gambar 36. Penduduk Berusia di Atas 15 Tahun yang Menggunakan Internet dalam 3 Bulan Terakhir



Sumber: survei SMERU, 2022

Sementara itu, kualitas internet di wilayah studi berada dalam kategori baik menurut sebagian besar penduduk yang mengaksesnya. Terdapat sekitar 81,8% penduduk di wilayah pembanding dan 79,62% di wilayah perlakuan yang menyatakan bahwa internet yang mereka akses berkualitas baik (Gambar 37). Meski demikian, masih ada penduduk yang menyatakan bahwa akses internet yang mereka peroleh berkualitas buruk dan bahkan sangat buruk. Internet telah digunakan oleh penduduk di wilayah perlakuan dan pembanding untuk kegiatan ekonomi, seperti penjualan dan pemasaran produk melalui media sosial serta berkomunikasi dengan pembeli/pemasok/mitra usaha baik di dalam maupun luar kabupaten.

Gambar 37. Kualitas Internet menurut Penduduk Berusia di Atas 15 Tahun yang Menggunakan Internet dalam 3 Bulan Terakhir

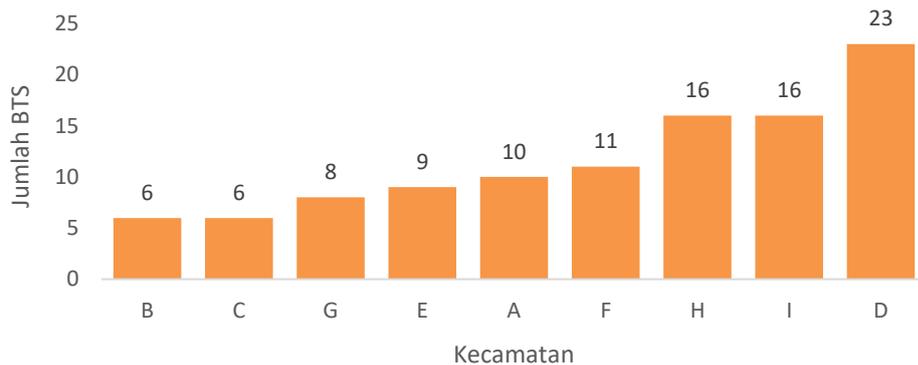


Sumber: survei SMERU, 2022

Kualitas internet yang baik didukung oleh infrastruktur yang memadai. Data Podes 2021 yang dikeluarkan BPS memperlihatkan bahwa di hampir setiap kecamatan di wilayah

perlakuan dan perbandingan telah tersedia menara stasiun pemancar (*base transceiver station/BTS*) (Gambar 38). BTS merupakan bentuk infrastruktur telekomunikasi yang berperan penting dalam mewujudkan komunikasi nirkabel antara jaringan operator dan perangkat telekomunikasi. Kecamatan dengan jumlah menara BTS terbanyak adalah kecamatan D (23 menara), sedangkan kecamatan dengan jumlah menara BTS paling sedikit adalah kecamatan B dan C (masing-masing 6 menara). Ketiganya berada di wilayah perlakuan.

Gambar 38. Jumlah BTS

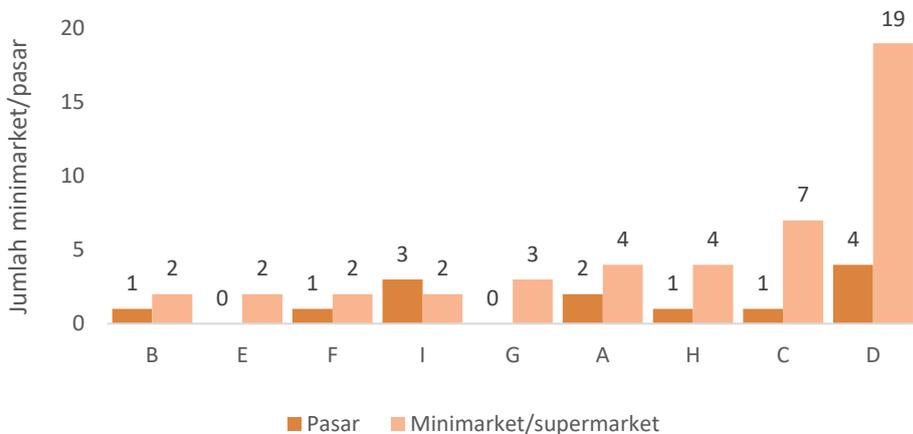


Sumber: Podes 2021

3.4.4 Infrastruktur Pasar

Data Podes 2021 memperlihatkan bahwa masih terdapat kecamatan di wilayah perlakuan yang belum memiliki pasar, yaitu Kecamatan E dan Kecamatan G (Gambar 39). Di sisi lain, di setiap kecamatan justru telah terdapat minimarket/supermarket. Jumlah minimarket/supermarket paling besar berada di Kecamatan D yang secara relatif memiliki ciri perkotaan dibandingkan dengan kecamatan lain di wilayah perlakuan.

Gambar 39. Jumlah Pasar dan Minimarket/Supermarket



Sumber: Data Podes 2021

Wawancara kualitatif dengan masyarakat yang memanfaatkan pasar mengungkapkan bahwa ada pasar yang kondisi fasilitasnya kurang memadai. Di sebuah pasar di Kecamatan

C²¹, misalnya, saluran pembuangan air limbahnya kurang lancar, belum semua bagian pasar tertutup atap, dan layanan pengangkutan sampahnya belum memadai. Temuan kualitatif di wilayah perlakuan dan pembanding juga mengungkapkan bahwa kehadiran minimarket/supermarket dinilai sebagai pesaing yang sangat memengaruhi usaha pedagang kelontong tradisional.

Dulu keuntungan masih bagus, tapi sekarang setelah ada Minimarket A dan Minimarket B, *down* sekali kita. Dulu bisa dua sampai tiga juta. Tapi sekarang 500 ribu saja sehari sudah syukur. 500 ribu ini pun belum bersih. (Petani dan pedagang, perempuan, Kecamatan A, KSB, 20 November 2022)

Sejak ada Minimarket B dan Minimarket A, pemasukan kios berkurang, pembeli tertarik dengan promo yang diberikan, termasuk membandingkan harga. Saya berusaha [menyasati] dengan menjual barang eceran seperti gula ukuran setengah atau seperempat kilo atau mengizinkan pembeli yang dipercaya untuk berutang ... tapi [saya] membatasi jumlah dan lama waktu berutang sebab [bisa] kekurangan modal. (Pedagang, perempuan, Kecamatan H, Kabupaten Sumbawa, 24 November 2022)

3.4.5 Infrastruktur Lembaga Keuangan

Pertumbuhan ekonomi masyarakat diharapkan dapat diikuti dengan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan produk dan/atau jasa layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Terkait dengan hal itu, pemerintah melakukan upaya meningkatkan literasi keuangan²² yang diimbangi dengan upaya meningkatkan inklusi keuangan²³. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 76/POJK.07/2016, peningkatan literasi keuangan dilakukan melalui edukasi keuangan. Sementara itu, inklusi keuangan dilakukan dengan (i) memastikan ketersediaan akses masyarakat terhadap lembaga, produk, dan/atau layanan jasa keuangan, serta (ii) memastikan ketersediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen dan/atau masyarakat.

Dalam studi ini, ketersediaan lembaga, produk, dan/atau layanan jasa keuangan tampaknya sudah diupayakan di wilayah studi. Berdasarkan data Podes 2021, terdapat berbagai lembaga keuangan, baik bank maupun nonbank, di wilayah studi. Lembaga keuangan berupa *baitul maal wa tamwil* (BMT) atau koperasi syariah dan lembaga pegadaian merupakan lembaga yang paling banyak tersedia. Namun, lembaga keuangan berupa bank (bank swasta, bank pemerintah, atau bank perkreditan rakyat [BPR]) tidak ditemukan sama sekali di Kecamatan E dan Kecamatan F (perlakuan). Selain itu, apabila

²¹Pasar di Kecamatan C diakses oleh masyarakat dari wilayah Kecamatan C dan kecamatan sekitarnya. Pasar dikelola oleh BUMDes setempat sejak 2016. Pedagang pasar perlu membayar sejumlah iuran untuk kebersihan, keamanan, internet, listrik, dan retribusi harian kepada pengelola pasar.

²²Menurut POJK No. 76/POJK.07/2016, literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.

²³Menurut POJK No. 76/POJK.07/2016, inklusi keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

dilihat secara keseluruhan, terdapat dua kecamatan, yaitu Kecamatan B dan Kecamatan G (perlakuan), dengan jumlah bank paling kecil (Tabel 13).

Tabel 13. Keberadaan Lembaga Keuangan

Kecamatan	Bank		Koperasi				Lembaga Lain		Jumlah
	Bank Pemerintah	Bank Swasta	BPR	KUD ^a	Kopinkra ^b	Kospin ^c	BMT	Pegadaian	
A	1	1	0	0	0	1	16	16	35
B	1	0	0	1	0	1	8	7	18
C	4	0	0	0	0	1	10	9	24
D	5	2	2	1	0	4	30	29	73
E	0	0	0	1	1	1	18	17	38
F	0	0	0	1	0	0	15	16	32
G	1	0	0	1	1	0	8	7	18
H	2	0	2	2	0	1	20	18	45
I	1	0	2	1	0	3	20	19	46

Sumber: Podes 2021

^akoperasi unit desa

^bkoperasi industri dan kerajinan rakyat

^ckoperasi simpan pinjam

Terkait produk dari lembaga keuangan, tabungan merupakan produk keuangan yang paling banyak diketahui masyarakat berdasarkan temuan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2013, 2016, dan 2019 (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Hal ini juga tecermin dari hasil survei. Sekitar separuh penduduk (52%) di wilayah perlakuan menyatakan telah memiliki rekening tabungan. Sebaliknya, di wilayah pembanding, lebih dari separuh penduduk (58%) menyatakan tidak memiliki rekening tabungan (Gambar 40). Proporsi tersebut setara dengan 799 orang di wilayah perlakuan dan 422 orang di wilayah pembanding atau 1.221 orang penduduk secara keseluruhan.

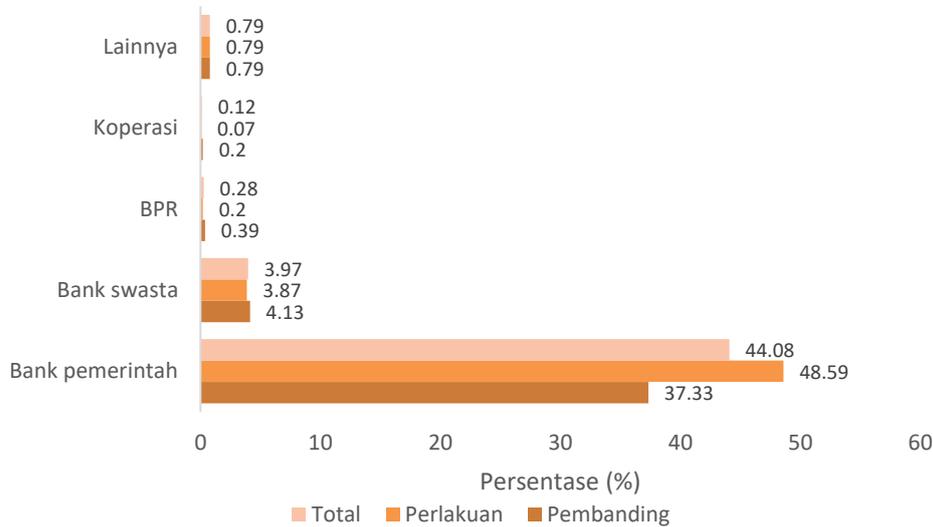
Gambar 40. Kepemilikan Rekening Tabungan di Bank



Sumber: survei SMERU, 2022

Sebagian besar rekening yang dimiliki ternyata merupakan rekening bank milik pemerintah (Gambar 41). Hal ini menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank milik pemerintah dibandingkan dengan lembaga keuangan lain.

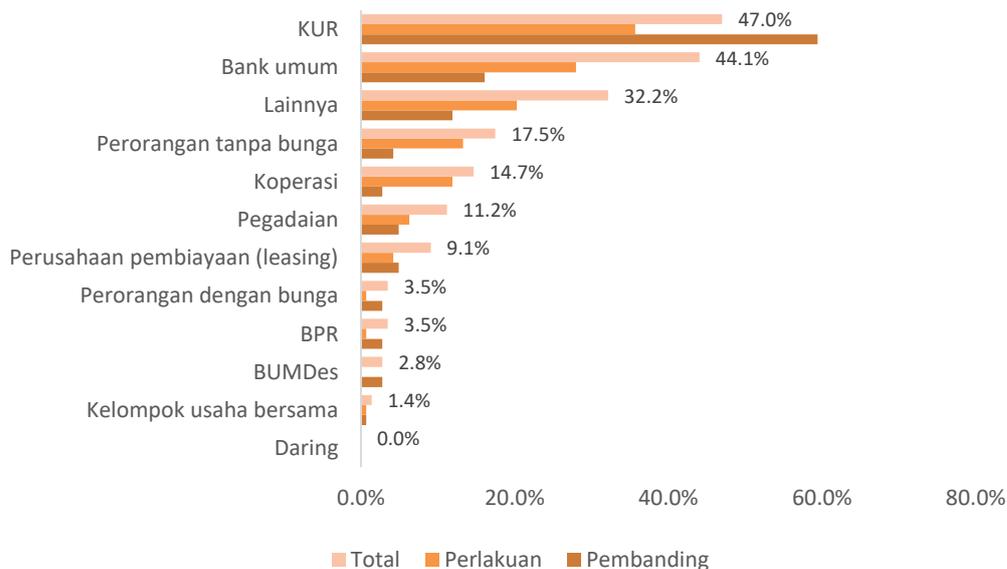
Gambar 41. Lembaga Keuangan Tempat Memiliki Rekening atau Menjadi Anggota



Sumber: survei SMERU, 2022

Literasi keuangan juga dapat dilihat dari bagaimana masyarakat memilih sumber pinjaman ketika mereka memerlukannya. Temuan survei memperlihatkan bahwa sebagian besar pelaku usaha baik di wilayah perlakuan maupun pembandingan telah memanfaatkan kredit usaha rakyat (KUR) untuk keperluan usaha. Meskipun jumlahnya tidak besar, masih ada masyarakat yang memanfaatkan pinjaman perorangan dengan bunga untuk keperluan usaha (Gambar 42).

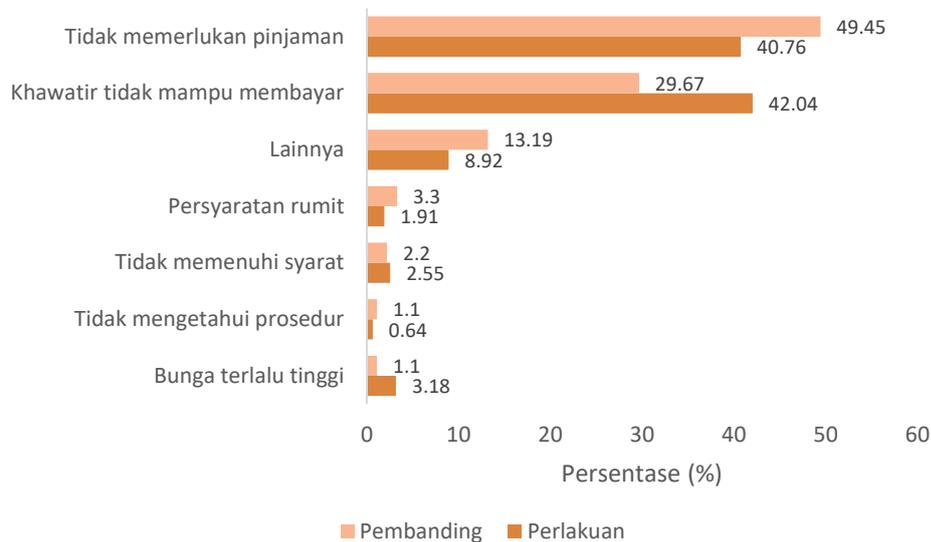
Gambar 42. Sumber Pinjaman untuk Keperluan Usaha



Sumber: survei SMERU, 2022

Namun, masih ditemukan beberapa pelaku usaha yang tidak/belum mengakses kredit usaha pada setahun terakhir. Sebagian besar pelaku usaha tidak berani mengambil pinjaman untuk keperluan usaha karena mereka merasa tidak memerlukan pinjaman dan khawatir tidak mampu membayarnya (Gambar 43).

Gambar 43. Alasan Pelaku Usaha Tidak Mengakses Kredit Usaha



Sumber: survei SMERU, 2022

Saya pernah pinjam modal usaha ke ipar saja. Di bank tidak pernah. Kalau di bank *kan* wajib bayar bulanan, sementara kita *kan* tidak tahu apakah tiap hari ada orang belanja atau tidak. (Pedagang, perempuan, Kecamatan H, Kabupaten Sumbawa, 24 November 2022)

Berbagai data yang telah dipaparkan sebelumnya memperlihatkan (i) masih besarnya proporsi masyarakat yang tidak memiliki rekening tabungan, padahal telah tersedia berbagai lembaga keuangan; (ii) keberadaan sumber pinjaman dari nonlembaga keuangan; serta (iii) adanya pelaku usaha yang tidak mengakses kredit usaha, padahal mereka mungkin memerlukannya. Keseluruhan data ini mengindikasikan masih perlunya peningkatan literasi keuangan masyarakat di wilayah studi.

Kesimpulan tersebut diperkuat oleh temuan kualitatif yang memperlihatkan adanya keragaman tujuan keuangan masyarakat. Terdapat anggota masyarakat yang memiliki tujuan keuangan jangka panjang, seperti membayar biaya pendidikan ataupun modal usaha. Akan tetapi, masih ada anggota masyarakat yang tujuannya bersifat jangka pendek, yaitu memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk gaya hidup.

Saya menabung di BNI Tapenas untuk pendidikan anak dengan jangka waktu 10 tahun. Setoran tiap bulannya sebesar [Rp]300.000. (Perangkat desa dan ibu dari anak balita, perempuan, Kecamatan A, KSB, 20 November 2022)

Untuk pedagang seperti saya, sangat penting menyimpan uang tunai di rekening, sehingga sewaktu-waktu jika ada barang-barang [yang potensial] diminati pembeli, saya segera dapat menyediakan di toko. (Pemilik toko perlengkapan rumah tangga, perempuan, Kecamatan A, KSB, 20 November 2022)

Saya nabung [Rp]50.000 per hari, dengan celengan di rumah. Untuk anak sekolah. Saat ini saya menabung sekitar [Rp]30.000 per hari dan ada tabungan lain juga [Rp]20.000 per hari. Jadinya, 1,5 juta [rupiah] per bulan untuk keperluan anak sekolah. (Pedagang dan ibu tiga anak usia sekolah, Kecamatan H, Kabupaten Sumbawa, 24 November 2022)

Kehidupannya gaya. Besar gayanya ... harus dilihat [seperti orang makmur] sama orang tua, padahal *nggak* punya. Makan saja susah sebenarnya. Tapi *bela-belain* utang. Misalnya *pas* ada acara kondangan, *nggak* punya baju ... kredit atau [bilang] 'Utang dulu, nanti ... [dilunasi]'. *Nggak* bisa apa adanya. Ya kalau pun *nggak* [dengan cara kredit], pinjam sama *temen*. Pinjam, pinjam, pinjam, ya untuk mengusahakan untuk penampilannya lebih bagus dari yang lain. (Ibu rumah tangga dan pengusaha mebel keluarga, perempuan, Kecamatan H, Kabupaten Sumbawa, 24 November 2022)

Peningkatan literasi keuangan merupakan hal penting. Apabila literasi keuangan masyarakat meningkat, mereka akan dapat membuat keputusan keuangan keluarga dan pribadi lebih optimal sehingga kesejahteraannya dapat meningkat. Keterampilan keuangan dapat membantu seseorang untuk memahami dunia ekonomi, mengambil keputusan keuangan, mempromosikan usaha, dan pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Kotak 1

Koperasi *Syariah* sebagai Lembaga Keuangan Alternatif bagi Masyarakat

Temuan studi ini menggarisbawahi keberadaan masyarakat yang mengakses pinjaman dari rentenir yang oleh masyarakat disebut *bank rontok* atau *bank subuh*. Sebagian rentenir merupakan individu dan sebagian lain merupakan lembaga semacam koperasi. Peminjaman kepada bank rontok/bank subuh dilakukan terutama karena prosesnya cepat dan prasyaratnya sederhana meskipun bunga yang dikenakan relatif tinggi. Hal ini berbeda dengan peminjaman kepada lembaga keuangan formal yang biasanya mengharuskan calon debitur untuk memenuhi syarat agar bisa mengakses produk perbankan (*bankable*) serta memerlukan proses tertentu.

Sebagai lembaga keuangan nonbank, koperasi sebenarnya bisa menjadi sumber pinjaman alternatif bagi kelompok masyarakat yang tidak memenuhi syarat untuk mengakses produk perbankan. Namun, ada banyak koperasi yang kondisinya saat ini sudah mulai melemah.

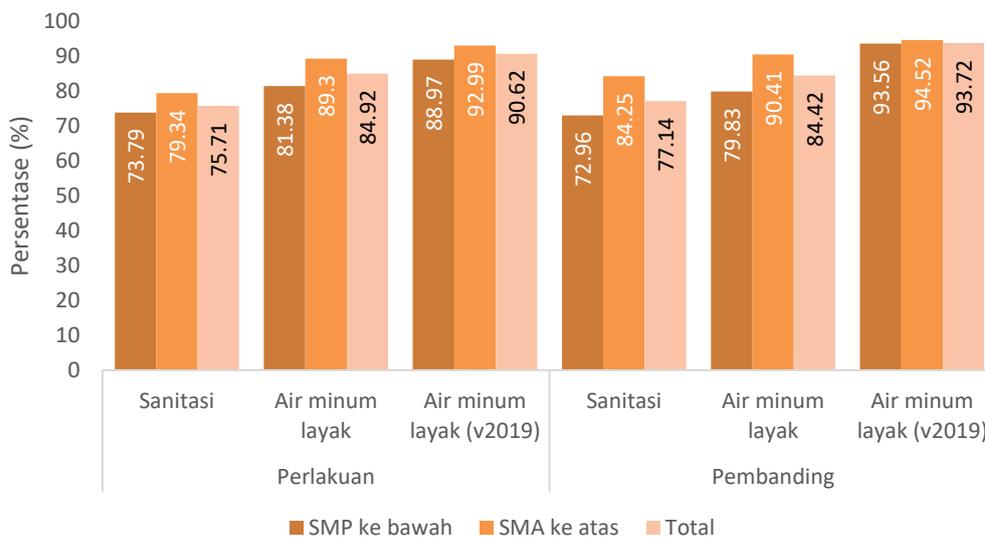
Kondisi koperasi di KSB boleh dibilang pergerakannya sudah tidak seperti dulu lagi, dulu *kan* koperasi ini paling dibutuhkan karena lembaga keuangan lain belum ada, sekarang dengan munculnya berbagai lembaga keuangan dengan format dan sistem yang baru, koperasi ini kalah bersaing. (Pegawai Diskoperindag KSB, 23 November 2022)

Oleh karena itu, mulai 2021 pemda melalui Diskoperindag memfasilitasi pembentukan koperasi *syariah* yang diharapkan dapat, antara lain, menjadi lembaga keuangan alternatif dan membangun kesejahteraan masyarakat. Hal ini merupakan bagian dari program kawasan bebas riba yang telah dideklarasikan di tingkat provinsi. Sistem bagi hasil dalam konsep *syariah* diharapkan sesuai dengan kondisi serta kemampuan keuangan masyarakat. Namun, upaya pendirian koperasi *syariah* masih terkendala kurangnya kapasitas SDM pengurus koperasi. Hal lain yang mungkin akan menjadi tantangan adalah memastikan kuatnya koperasi sebagai sebuah lembaga serta komitmen pengurus dan anggotanya. Dengan demikian, kegagalan-kegagalan terkait koperasi sebelumnya tidak terulang lagi.

3.5 Aspek Infrastruktur Dasar

Hasil survei kuantitatif menunjukkan bahwa kondisi infrastruktur dasar rumah tangga di kedua wilayah studi cukup baik. Akses rumah tangga terhadap air minum sudah mencapai 84% di wilayah perlakuan dan pembanding (Gambar 44). Sementara itu, akses terhadap sanitasi layak di kedua wilayah baru mencapai 76%–77%. Sejak 2019, terdapat perubahan definisi mengenai akses terhadap air minum layak dari BPS. Sebelum tahun 2019, akses air minum layak didefinisikan oleh BPS sebagai sumber air untuk minum, mandi, dan keperluan sehari-hari yang meliputi air leding eceran/meteran, air hujan, dan pompa/sumur terlindung/mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan kotoran/tinja terdekat adalah 10 m. Sementara itu, sejak 2019, definisi yang digunakan mengacu kepada metadata TPB yang menyebutkan bahwa sebuah rumah tangga dikatakan memiliki akses terhadap air minum layak (*access to improved water*) jika sumber air minum utama yang digunakan adalah air leding, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung. Jika sebuah rumah tangga memiliki sumber air minum berupa air kemasan, rumah tangga tersebut tetap dikategorikan memiliki akses terhadap air minum layak jika sumber air untuk mandi/cucinya berasal dari leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan.

Gambar 44. Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Layak dan Sanitasi



Sumber: survei SMERU, 2022

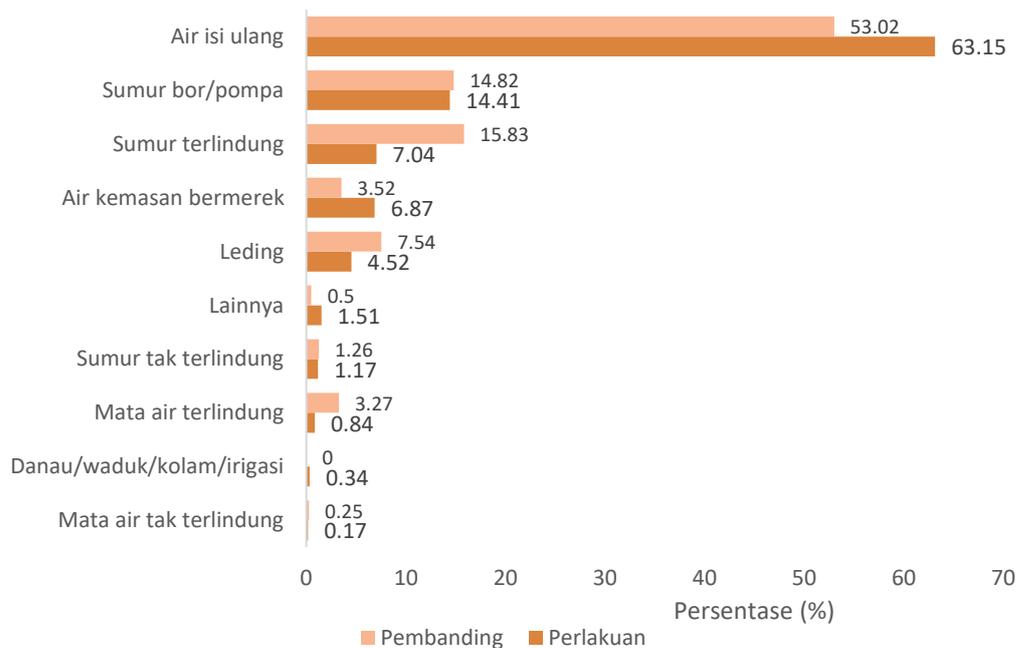
Ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara rumah tangga dengan KRT berpendidikan tinggi dan rendah terkait akses terhadap air minum layak baik menggunakan definisi akses terhadap air minum layak versi baru dan versi lama²⁴. Hal tersebut setidaknya menunjukkan bahwa salah satu determinan akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak adalah tingkat pendidikan.

²⁴kecuali untuk indikator akses terhadap air minum layak versi baru (sejak 2019) di wilayah pembanding

Meksipun kondisi infrastruktur dasar sudah baik, satu hal yang masih perlu diperhatikan adalah kualitas sumber air. Sekitar 10% rumah tangga menyebutkan bahwa air yang mereka gunakan, baik untuk minum, mandi, maupun cuci, memiliki rasa dan sekitar 5% rumah tangga mengeluhkan kondisi air yang berwarna atau berbau. Di wilayah perbandingan khususnya, sekitar 7% rumah tangga juga melaporkan air keruh dari sumber yang mereka akses.

Sumber air bersih yang diakses masyarakat baik di wilayah perlakuan maupun perbandingan terdiri atas air sumur, air kemasan isi ulang, dan air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Data kuantitatif juga memperlihatkan bahwa sebagian besar air yang digunakan berasal dari air isi ulang dan sumur (Gambar 45). Selain sumber air tersebut, masyarakat di beberapa desa/kecamatan juga mengakses air bersih melalui Program Penyediaan Air dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas). Kebutuhan air minum biasanya dipenuhi dengan menggunakan air kemasan isi ulang, sementara sumber air lainnya digunakan untuk keperluan yang lebih beragam, seperti memasak serta mandi, cuci, dan kakus (MCK).

Gambar 45. Sumber Air Utama Rumah Tangga



Sumber: survei SMERU, 2022

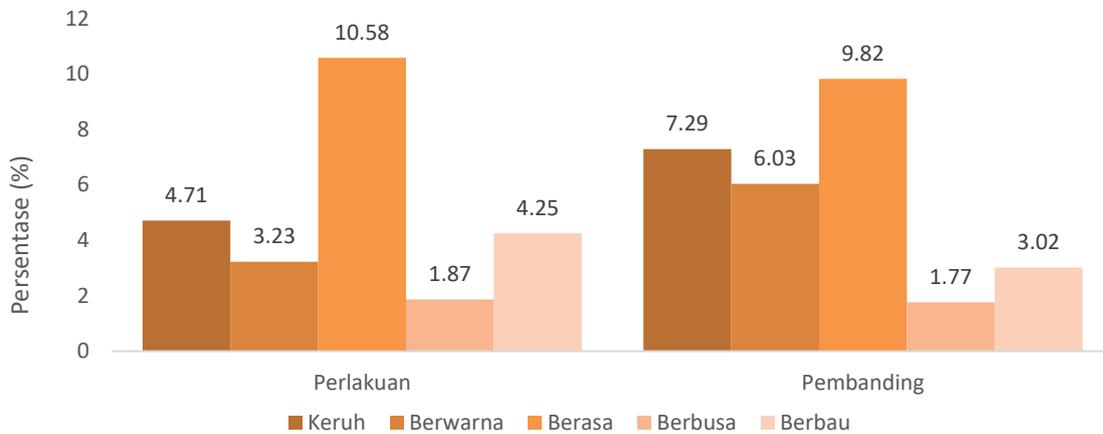
Terdapat beragam tantangan dalam mengakses berbagai sumber air bersih. Keluhan terkait air sumur adalah kualitas air (air berkapur dan air menjadi keruh saat musim hujan) dan debit air yang menurun saat musim kemarau. Permasalahan terkait kualitas air dari PDAM juga dihadapi masyarakat. Salah satu desa sampel di Kecamatan A, misalnya, mengeluhkan air PDAM yang keruh saat musim hujan. Meski kualitas air dari Pamsimas dinilai baik, distribusi pipa Pamsimas belum merata di seluruh wilayah desa. Pasokan air kemasan isi ulang mudah diperoleh karena tersedia penjual di sekitar lingkungan rumah. Namun, air kemasan isi ulang, PDAM, dan Pamsimas berbayar semua. Kondisi ekonomi keluarga pada akhirnya akan memengaruhi penggunaan sumber air tersebut.

Kalau [air dari] PDAM mahal ... kadang ada [tetangga] yang mengeluh, membayar [Rp]200.000 sampai [Rp]300.000 dalam satu bulan. ... Pernah [keluarga saya] menggunakan [air] PDAM, *tapi* airnya hitam. (Petani dan pedagang, perempuan, Kecamatan A, KSB, 20 November 2022)

Pelayanan Pamsimas belum rata ke semua dusun. ... Pamsimas bagus [kualitas] airnya. (Petani, laki-laki, Kecamatan A, KSB, 20 November 2022)

Saya pernah dulu merebus air sumur disini [Desa A3], penuh kapurnya, jadi saya dan suami memutuskan *ngga* pakai air sumur untuk masak. Kita pakai saja air galon yang [harganya] Rp5.000 itu. ... Di sini ada tiga depo [penjual] air, lain lagi ada yang masuk keliling [permukiman], jadi ada empat penjual. ... Kita [pembeli] tinggal taruh galon di depan [rumah], langsung dia [penjual] *nawarin*. kalau sudah beli dua tiga kali, nanti dia akan *nawarin*, jadi langganan. (Ibu rumah tangga dan pedagang, perempuan, Kecamatan A, KSB, 20 November 2022)

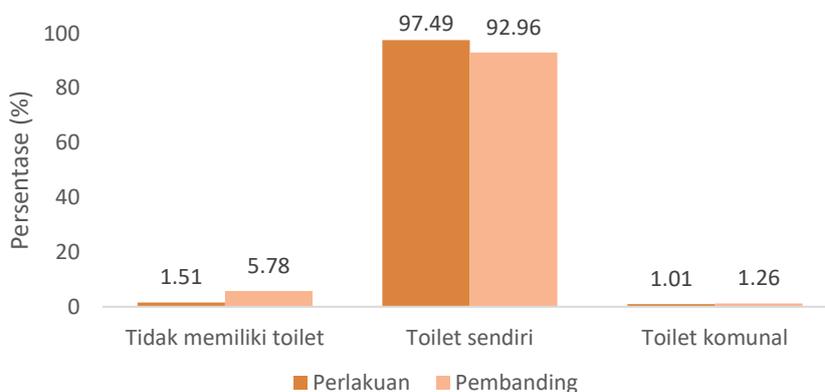
Gambar 46. Kondisi Air dari Sumber Air yang Digunakan Rumah Tangga



Sumber: survei SMERU, 2022

Pada aspek sanitasi, lebih dari 90% rumah tangga di wilayah perlakuan maupun pemandang memiliki fasilitas toilet sendiri (Gambar 47). Dengan kata lain, akses terhadap sanitasi layak di kedua wilayah studi sudah cukup tinggi meskipun belum 100%.

Gambar 47. Kepemilikan Fasilitas Toilet Rumah Tangga



Sumber: survei SMERU, 2022

Pada aspek sanitasi, wilayah perlakuan telah mendeklarasikan diri sebagai kabupaten tuntas lima pilar sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) pada 2021. Sementara itu, wilayah perbandingan telah mendeklarasikan diri sebagai kabupaten *open defecation free* (ODF) pada 2022. Pencapaian ini tecermin dari kepemilikan fasilitas sanitasi di rumah tangga. Rerata rumah tangga memiliki dan menggunakan fasilitas toilet dan tanki septik di rumahnya.

Kotak 2

Ketertinggalan dalam Pemenuhan Infrastruktur Dasar Sanitasi dan Air Bersih

Studi ini menemukan bahwa cakupan akses air bersih dan sanitasi layak telah cukup tinggi. Namun, masih ada segelintir masyarakat yang mengalami keterbatasan. Salah satunya adalah komunitas warga asal Pulau Sumba yang bermukim di salah satu dusun di Kecamatan A (KSB). Mereka pada umumnya datang untuk bekerja sebagai buruh serabutan meskipun saat ini sudah ada anggota komunitas Sumba berusia muda yang menjadi pekerja di sektor formal. Mereka mendirikan kompleks perumahan nonpermanen secara berkelompok atas izin pemilik lahan yang tanahnya belum dimanfaatkan serta sekaligus bekerja menjaga lahan tersebut. Mereka biasanya tinggal berkelompok sesuai dengan bidang lahan yang dijaganya. Ditengah-tengah kompleks, dibangun gereja nonpermanen untuk ibadah. Ibu Hermina (bukan nama sebenarnya) merupakan salah satu warga komunitas Sumba. Dia dan keluarganya tinggal berkelompok bersama beberapa rumah tangga warga Sumba lainnya di lahan yang sama. Suami Bu Hermina—bersama beberapa warga Sumba lainnya—mulai merantau ke KSB pada 2002 dan kemudian disusul oleh anggota rumah tangganya masing-masing, termasuk Ibu Hermina. Secara administratif, mereka telah ber-KTP KSB.



Menurut Ibu Hermina, kebutuhan akan air bersih untuk mencuci, memasak, dan mandi dipenuhi dari sumur galian dekat rumahnya. Sumur galian tersebut dimanfaatkan bersama-sama sejumlah rumah tangga anggota komunitas. Terkadang, Ibu Hermina harus mengantre untuk mengambil air di sumur galian. Kendati air sumur galian selalu tersedia, airnya biasanya menjadi keruh saat musim hujan. Kebutuhan akan air minum dipenuhi dari saluran pipa air bersih yang tersedia di

pintu masuk kawasan tambang. Air tersebut bisa diakses secara gratis. Karena anak Ibu Hermina bekerja di kawasan tambang, mudah baginya untuk mengangkut air sepulang bekerja. Tetangganya kadang memintanya untuk mengambil air. Anak Ibu Hermina akan menggunakan jerigen berukuran 25 liter untuk menampung air. Ibu Hermina tidak merebus air tersebut sebelum dikonsumsi karena airnya jernih sehingga menurutnya tidak perlu dimasak terlebih dahulu.

Rumah tangga Ibu Hermina menggunakan kamar mandi dan jamban komunal yang digunakannya bersama tetangga. Jamban tersebut merupakan bangunan nonpermanen yang terbuat dari seng dan kain bekas, tanpa atap. Jamban berupa toilet jongkok tanpa tangki septik berjarak 10 meter dari sumur. Menurut Ibu Hermina, ada rumah tangga yang memiliki kamar mandi/jamban pribadi, tetapi kondisinya tidak jauh berbeda—bangunan nonpermanen dan semi terbuka. Menurutnya, sampai saat ini, belum ada program air bersih dan sanitasi yang menjangkau permukiman mereka.

Sumber: wawancara SMERU, 2022

3.6 Aspek Kesehatan

3.6.1 Akses terhadap Jaminan Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan

Hasil survei kuantitatif menunjukkan bahwa kepemilikan jaminan kesehatan di wilayah perlakuan sudah sangat tinggi, yakni 83,2%. Angka ini jauh lebih tinggi daripada angka kepemilikan jaminan kesehatan di wilayah pembanding (60,1%)²⁵. Cakupan jaminan kesehatan yang luas merupakan fondasi utama untuk mewujudkan kesehatan penduduk yang lebih tangguh. Oleh karena itu, kepemilikan jaminan kesehatan yang sudah baik di wilayah perlakuan perlu diapresiasi. Penduduk di wilayah tersebut tidak perlu khawatir dengan biaya apabila ingin berobat.

Namun, berdasarkan data tim kuantitatif, baik di wilayah perlakuan maupun pembanding, hanya sekitar seperempat penduduk yang mengakses fasilitas kesehatan saat sakit. Fenomena ini terjadi di setiap kelompok masyarakat terlepas dari tingkat pendidikan, gender, usia, ataupun status bekerja. Namun, sebanyak 56,9% penduduk di wilayah perlakuan dan 41% penduduk di wilayah pembanding memanfaatkan jaminan kesehatan saat sakit dan mengakses fasilitas kesehatan.

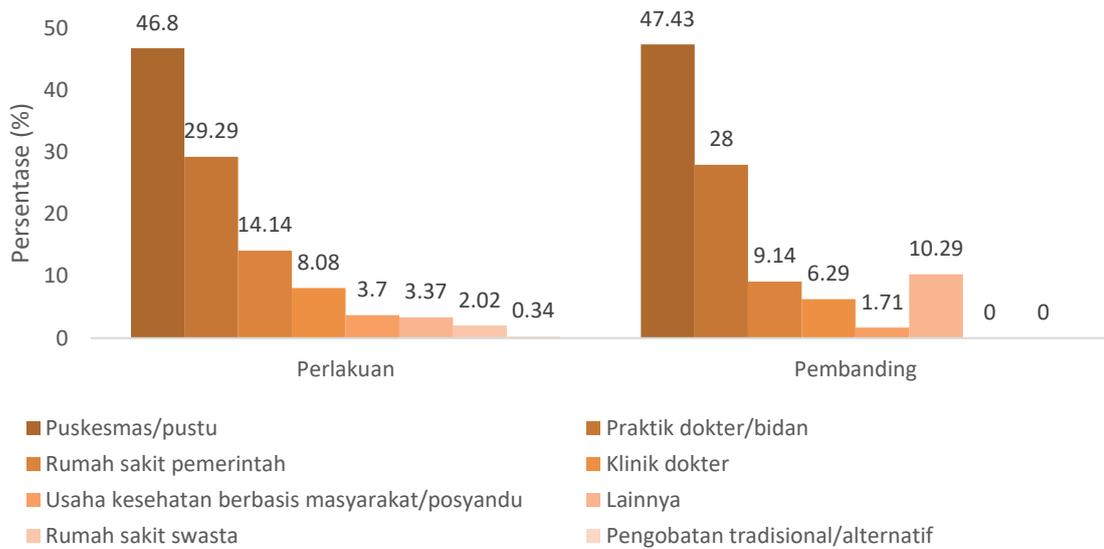
Dengan besarnya cakupan jaminan kesehatan dan pemanfaatannya, dapat dikatakan bahwa sistem layanan kesehatan di wilayah perlakuan sudah cukup inklusif. Hal ini diperkuat oleh temuan kualitatif yang secara umum memperlihatkan bahwa masyarakat sudah memiliki jaminan kesehatan, baik dengan kategori penerima bantuan iuran (PBI) maupun mandiri. Pemerintah KSB tampaknya melakukan upaya mengejar capaian Universal Health Coverage (UHC) dengan meningkatkan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang pada 2017 sudah mencapai 96,3% (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, 2017). Pemerintah KSB berkomitmen mendaftarkan kepesertaan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) yang memiliki KTP elektronik KSB yang selama ini belum terdaftar sebagai peserta JKN, serta penduduk ber-KTP KSB yang pernah terdaftar sebelumnya dengan mengalihkan kepesertaannya menjadi PBPU dan BP yang didaftarkan pemerintah²⁶. Selain itu temuan kualitatif menunjukkan bahwa, dalam praktiknya, pasien yang memiliki KTP KSB, tetapi belum menjadi peserta jaminan kesehatan, akan tetap dilayani secara gratis dan pada waktu yang sama didorong untuk mendaftar menjadi peserta program jaminan kesehatan guna mempermudah layanan kesehatan selanjutnya.

Dari sejumlah fasilitas kesehatan yang ada, puskesmas dan praktik dokter/bidan/perawat (perseorangan) masih menjadi fasilitas kesehatan utama yang diakses oleh penduduk. Temuan ini terlihat baik di wilayah perlakuan maupun wilayah pembanding (Gambar 48). Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan tingkat pertama sangat berperan penting dalam meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat.

²⁵Kepemilikan jaminan kesehatan adalah persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan, baik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)-PBI, BPJS Mandiri, Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), asuransi kesehatan swasta, maupun asuransi dari kantor/perusahaan.

²⁶Perbup KSB No. 11 Tahun 2022

Gambar 48. Jenis Fasilitas Kesehatan yang Diakses Penduduk Saat Sakit



Sumber: survei SMERU, 2022

Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, terdapat layanan kesehatan berupa puskesmas keliling dan kunjungan rumah (*home visit*). Keberadaan layanan ini mendekatkan dan memudahkan masyarakat, khususnya kelompok rentan dengan keterbatasan mobilitas (seperti orang lansia dan penyandang disabilitas), untuk mengakses fasilitas kesehatan.

Untuk mendekatkan akses pelayanan ke puskesmas, sudah ada puskesmas keliling (puskel) dan *mobile home visit* yang dilakukan khususnya untuk deteksi dan sosialisasi penyakit menular seksual [jika ada laporan dari keluarga, pemerintah desa, atau masyarakat]. Layanan keliling ini ditujukan khususnya bagi [warga] lansia dan difabel [penyandang disabilitas] yang kesulitan datang ke puskesmas. (Laki-laki, pegawai puskesmas, Kecamatan C, KSB, 22 November 2022)

Meskipun cakupan jaminan kesehatan cukup bagus, masih ditemukan tantangan dalam hal infrastruktur penunjang kesehatan. Informan kualitatif menekankan kesulitannya sebagai perangkat desa dalam menunjang mobilitas masyarakat yang memerlukan akses ke fasilitas kesehatan di kota. Masalah ini muncul karena tidak tersedianya infrastruktur penunjang, seperti mobil operasional desa.

Kotak 3

Kurangnya Fasilitas Penunjang Kesehatan di Desa

Firman (nama samaran) adalah salah satu kepala desa di wilayah studi yang sering membahas situasi sosioekonomi di desa, terutama terkait ketersediaan infrastruktur penunjang. Hal yang menjadi sorotan Firman adalah tidak tersedianya mobil operasional di desa. Ia mengungkapkan bahwa desanya sangat memerlukan mobil operasional untuk membantu masyarakat mengakses layanan kesehatan khususnya di kota. Kebiasaan masyarakat di Desa X (nama desa disamarkan) adalah meminta bantuan kepada tetangga jika sakit dan meminjam mobil karena keterbatasan yang mereka miliki. Mobil Firman sering kali dipinjam untuk keperluan pengobatan masyarakat ke kota, misalnya ke Taliwang. Selain mobilnya, mobil sekretaris desa setempat juga menjadi tumpuan masyarakat jika akan berobat ke kota. Ia mengeluhkan hal tersebut karena desa seharusnya memiliki mobil operasional yang digunakan untuk keperluan masyarakat. Firman mencontohkan salah satuarganya yang terkena kanker usus dan harus bolak-balik berobat ke Sumbawa dengan memakai mobil pribadinya.

Kayak hari ini, mobil saya masih di Taliwang dibawa oleh warga untuk berobat. Akhirnya saya tidak bisa pakai untuk kerja. Mereka isi bensin aja kalau pinjam mobil saya. Kalau misalnya ada mobil desa, kan bisa warga enak pakai. Pihak yang bisa bantu kami untuk menyediakan mobil operasional sebetulnya bisa dari pihak perusahaan [Amman] atau bisa juga dari pihak pemda. (Perangkat desa, laki-laki, kecamatan A, KSB, 21 November 2022)

Sumber: wawancara SMERU, 2022

Persoalan kesehatan lain yang dikeluhkan sejumlah informan kualitatif berkaitan dengan terbatasnya ketersediaan dokter spesialis di puskesmas. Jenis dokter yang tidak tersedia adalah, antara lain, dokter spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan (THT); spesialis mata; spesialis anak; dan spesialis bedah. Temuan ini terkonfirmasi oleh sejumlah informan di tingkat kecamatan dan kabupaten yang menyampaikan persoalan keterbatasan tenaga kesehatan, termasuk perawat dan dokter gigi. Hal ini menyebabkan terhambatnya penanganan pasien karena mereka harus mencari fasilitas kesehatan atau dokter di luar domisili yang berarti bahwa mereka harus pergi ke kota. Selain menyebabkan terhambatnya penanganan, masalah ini berimplikasi pada munculnya biaya yang harus dikeluarkan pasien untuk berobat di kota, baik di rumah sakit maupun praktik dokter pribadi.

Meskipun layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) melalui sistem rujukan bisa digunakan untuk pengobatan di kota, ada beban jarak, waktu tempuh, dan biaya yang harus dikeluarkan untuk transportasi saat berobat di kota. Masih kurangnya dokter spesialis di puskesmas tentu menjadi persoalan yang perlu ditangani agar beban yang ditanggung masyarakat lebih ringan. Beban kerja tenaga kesehatan juga bisa berkurang jika ketersediaan mereka bisa terpenuhi secara merata.

Dokter THT ada di Taliwang berupa RSUD [rumah sakit umum daerah] atau di praktik dokter. Jika butuh ke dokter spesialis, warga harus pergi ke Taliwang. Kendalanya adalah persoalan jarak dan waktu. Untuk akses transportasi, biasanya menggunakan kendaraan sendiri atau bisa menggunakan ambulans dari puskesmas. Perjalanan ke Taliwang memakan waktu sekitar satu jam. (Guru SD, laki-laki, kecamatan A, KSB, 21 November 2022)

Kondisinya saat ini untuk dokter gigi masih kurang dua orang untuk penempatan di Kecamatan D. Kurangnya ketersediaan tenaga kesehatan di Sumbawa Barat disebabkan karena adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait pelarangan pengangkatan tenaga honorer²⁷ dan belum adanya perekrutan pegawai negeri sipil [PNS] dalam beberapa waktu kebelakang. (Pegawai Dinas Kesehatan KSB, perempuan, 23 November 2022)

Untuk pemeriksaan dan biaya obat di praktik dokter, tarif sekali pemeriksaan dan obat sebesar [Rp]200.000–[Rp]250.000 tergantung jenis obat. (Pedagang, laki-laki, Kecamatan C, KSB, 23 November 2022)

Banyaknya penduduk sakit yang tidak mengakses fasilitas kesehatan terjadi terutama karena mereka merasa tidak perlu pergi ke fasilitas kesehatan dan masih bisa mengobati sendiri (Gambar 49). Masyarakat menganggap tidak ada urgensi untuk membawa anggota keluarga ke fasilitas kesehatan selama penyakit yang dideritanya bisa disembuhkan dengan perawatan pribadi menggunakan obat yang dijual secara bebas ataupun obat herbal. Masyarakat pada umumnya tidak menyadari bahwa praktik mengobati diri sendiri saat sakit sebenarnya berbahaya bagi kesehatan terutama jika konsumsi obat dilakukan tanpa pengawasan dokter.

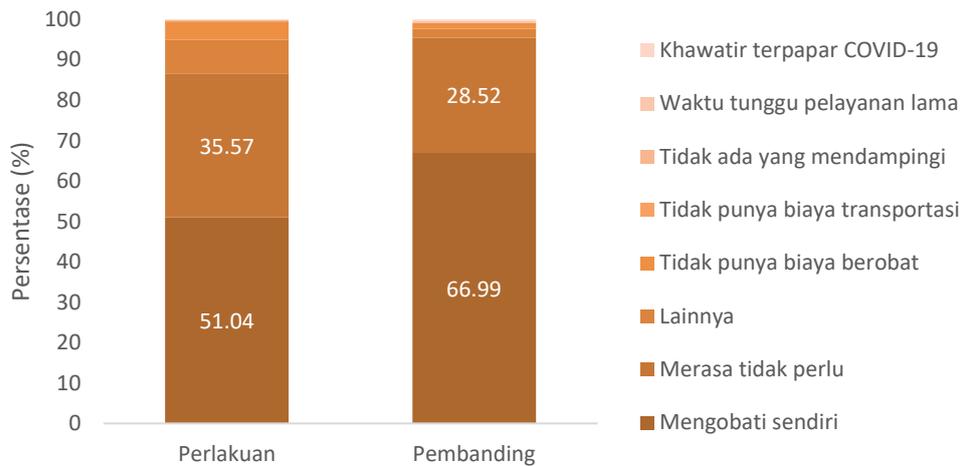
Berdasarkan temuan kualitatif, faktor yang menyebabkan masyarakat tidak pergi ke fasilitas kesehatan berkaitan dengan ketidakpercayaan mereka kepada institusi kesehatan. Informan kualitatif menyebutkan adanya ketakutan terhadap bahan kimia yang terkandung dalam obat-obatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Alasan lain yang diungkapkan informan adalah ketidakpercayaan mereka kepada diagnosis dokter sehingga lebih memilih pengobatan herbal. Upaya perawatan dan pengobatan pribadi dapat dikatakan lebih mudah, tetapi berisiko membahayakan kondisi kesehatan jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Praktik pengobatan pribadi dapat menyebabkan salah diagnosis, keterlambatan perawatan, memburuknya efek samping, terjadinya interaksi antarobat yang membahayakan, salah dosis dan terapi, serta risiko ketergantungan dan penyalahgunaan obat (Ruiz, 2010).

Saat anak sakit tidak pernah memeriksakan ke dokter, hanya memakai minyak alami, misal saat demam dioleskan minyak kutus dan bawang. Tidak mau memeriksakan anak ke dokter karena tidak suka dengan obat-obat yang mengandung bahan kimia. (Anggota BPD, perempuan, kecamatan A, KSB, 21 November 2022)

Pada 2013, pernah divonis kanker serviks tapi kemungkinan dokter yang memberikan vonis tersebut salah. Alhamdulillah, setelah *mengonsumsi* obat herbal, sampai sekarang sehat. (Petani dan pedagang, perempuan, Kecamatan A, KSB, 21 November 2022)

²⁷Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. B/185/M.SM.02.03/2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemda

Gambar 49. Alasan Tidak Berkunjung ke Fasilitas Kesehatan Saat Sakit

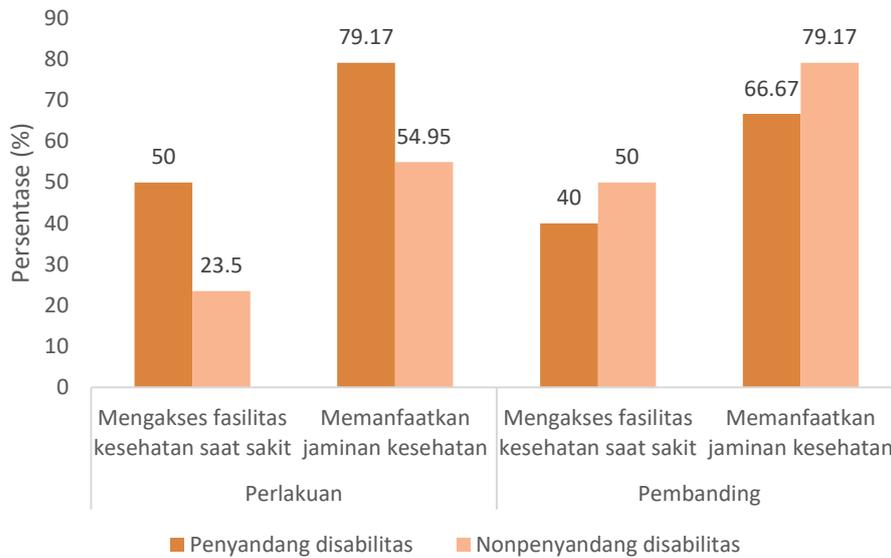


Sumber: survei SMERU, 2022

Hal menarik dapat dilihat pada akses menuju fasilitas kesehatan bagi penyandang disabilitas yang sakit di wilayah perlakuan. Dari sejumlah penyandang disabilitas yang mengalami sakit, 50% dari mereka mengakses fasilitas kesehatan dan 79% memanfaatkan jaminan kesehatan saat berobat (Gambar 50). Melalui uji signifikansi statistik, diperoleh bukti bahwa persentase penyandang disabilitas yang mengakses fasilitas kesehatan saat sakit lebih tinggi daripada persentase nonpenyandang disabilitas. Fakta tersebut menunjukkan bahwa (i) cakupan jaminan kesehatan di wilayah perlakuan memang sudah sangat inklusif terutama bagi kelompok marginal dan (ii) layanan kesehatannya sudah ramah disabilitas.

Sudah baiknya akses kesehatan bagi penyandang disabilitas menunjukkan seriusnya komitmen Pemerintah KSB dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif melalui Perda No. 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Hak atas kesehatan bagi penyandang disabilitas menjadi salah satu fokus utama perda ini yang di dalamnya disebutkan bahwa layanan kesehatan wajib menerima pasien penyandang disabilitas tanpa diskriminasi dan setiap pemberi layanan dilarang menolak pasien penyandang disabilitas yang membutuhkan layanan kesehatan. Keberadaan perda ini merupakan wujud pengakuan daerah akan keberadaan penyandang disabilitas dan sekaligus upaya menegaskan hak-hak penyandang disabilitas sebagai bentuk pembangunan yang inklusif. Mewujudkan pembangunan inklusif merupakan proses yang membutuhkan intervensi jangka panjang, baik bagi penyandang disabilitas maupun nonpenyandang disabilitas, agar tercipta lingkungan dan hubungan yang ramah disabilitas (Hastuti *et al.*, 2020). Perda ini dapat dilihat sebagai langkah awal yang cukup strategis dalam mewujudkan pembangunan inklusif sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan atas keberadaan penyandang disabilitas di KSB.

Gambar 50. Akses terhadap Fasilitas Kesehatan dan Pemanfaatan Jaminan Kesehatan oleh Penyandang Disabilitas



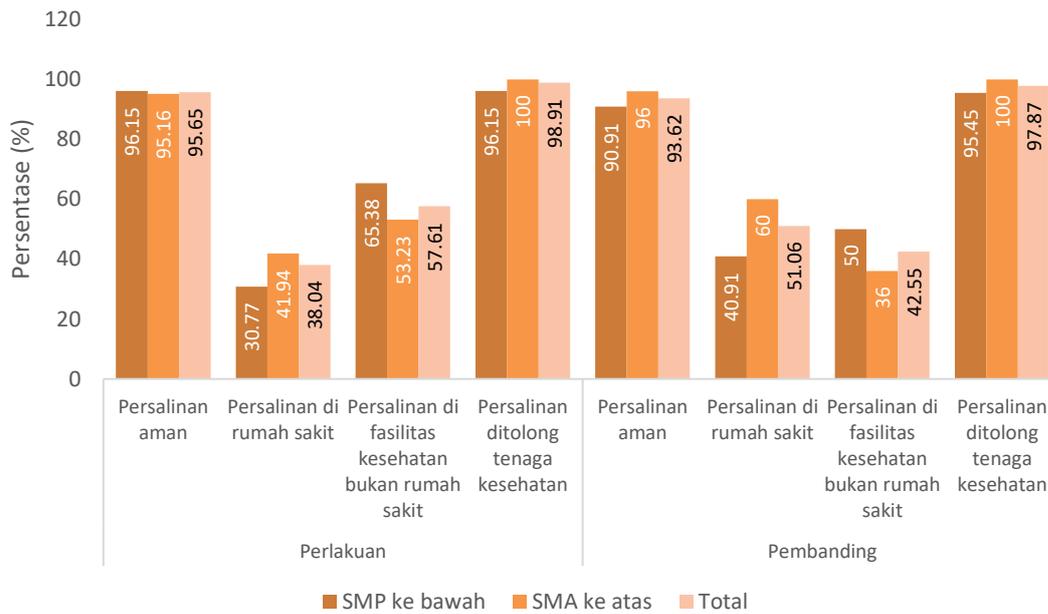
Sumber: survei SMERU, 2022

3.6.2 Persalinan Aman

Salah satu indikator untuk mengukur capaian taraf kesehatan perempuan serta ibu dan anak adalah persalinan aman. Data hasil survei kuantitatif di dua wilayah studi menunjukkan bahwa persentase persalinan aman²⁸ sudah tinggi (Gambar 51). Sebanyak 95,7% perempuan berusia 15–49 tahun di wilayah perlakuan yang dalam 2 tahun terakhir menjalani proses persalinan melakukan persalinan di fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, klinik, atau puskesmas, dan ditolong oleh tenaga kesehatan profesional atau terlatih. Di wilayah perbandingan, indikator yang sama mencapai 93,6%. Meski masih ada kecenderungan bahwa perempuan berpendidikan rendah melakukan praktik persalinan yang tidak aman, perbedaan antartingkat pendidikan dalam hal ini tidak signifikan secara statistik. Khususnya di wilayah perlakuan, perempuan berpendidikan tinggi yang melakukan praktik persalinan aman lebih sedikit. Meski persalinan tidak dilakukan di fasilitas kesehatan, prosesnya tetap ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. Persentase perempuan berpendidikan tinggi yang proses persalinannya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih sudah mencapai 100%. Sebaliknya, ada kecenderungan bahwa perempuan berpendidikan rendah melakukan proses persalinan tanpa pertolongan tenaga kesehatan profesional.

²⁸Angka persalinan aman dalam laporan ini adalah persentase perempuan berusia 15–49 tahun yang proses persalinan terakhirnya dalam 2 tahun terakhir dilakukan di fasilitas kesehatan dan ditolong oleh tenaga kesehatan profesional.

Gambar 51. Persentase Persalinan Aman



Sumber: survei SMERU, 2022

Di kedua wilayah studi, data menunjukkan bahwa sebagian besar proses persalinan dilakukan di fasilitas kesehatan selain rumah sakit, seperti puskesmas, pondok bersalin desa (polindes), puskesmas pembantu (pustu), atau praktik bidan (Gambar 51). Hal ini terjadi pada kelompok perempuan berpendidikan tinggi maupun rendah di wilayah perlakuan. Sementara itu, di wilayah pembanding, mayoritas perempuan berpendidikan tinggi melakukan proses persalinan di rumah sakit. Hal ini mengindikasikan bahwa (i) fasilitas kesehatan pratama yang bukan rumah sakit di wilayah perlakuan sudah lengkap sehingga dapat menerima pasien yang akan bersalin dan (ii) ada banyak perempuan yang sudah mengaksesnya.

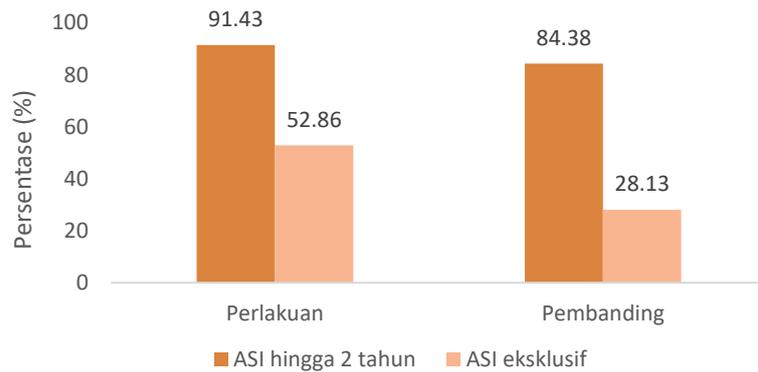
3.6.3 ASI dan Kegiatan Posyandu

Kesehatan anak berkaitan erat dengan pemberian gizi serta pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak. Pemberian ASI kepada anak hingga anak mencapai usia dua tahun merupakan salah satu upaya memberikan gizi baik yang juga merupakan bentuk pemenuhan hak anak sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Di kedua wilayah studi, capaian pemberian ASI hingga anak berusia dua tahun sudah tinggi, yakni sebesar 91,4% di wilayah perlakuan dan 84,4% di wilayah pembanding²⁹ (Gambar 52). Namun, terkait pemberian ASI eksklusif³⁰, capaiannya masih cukup rendah terutama di wilayah pembanding. Sementara itu, di wilayah perlakuan, lebih dari separuh anak bawah dua tahun (baduta) mendapatkan ASI eksklusif.

²⁹Interpretasi atas indikator yang berkaitan dengan baduta perlu lebih hati-hati mengingat jumlah sampel yang kecil (70 baduta di wilayah perlakuan dan 32 baduta di wilayah pembanding), serta kerangka sampel yang tidak mempertimbangkan kelompok baduta/balita.

³⁰ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi dari sejak lahir sampai berusia enam bulan tanpa makanan/minuman tambahan.

Gambar 52. Persentase Pemberian ASI dan ASI Eksklusif

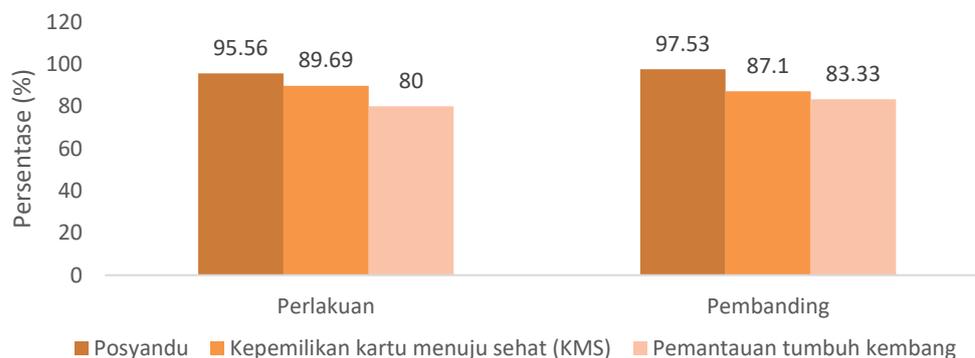


Sumber: survei SMERU, 2022

Rendahnya capaian ASI eksklusif di wilayah pembeding mengindikasikan kurangnya kesadaran ibu akan pentingnya ASI eksklusif bagi anak, padahal pemberian ASI eksklusif merupakan langkah pertama dalam upaya pemenuhan gizi anak. Kurang gizi berkaitan erat dengan lebih rendahnya capaian anak (*outcomes*), seperti tinggi badan, capaian sekolah, dan produktivitas ekonomi saat anak-anak tumbuh dewasa (Victoria *et al.*, 2008). Hasil tersebut merupakan ukuran kapasitas SDM. Oleh sebab itu, asupan gizi yang baik sangatlah penting dalam upaya meningkatkan SDM di suatu daerah.

Tidak hanya capaian pemberian ASI, persentase balita yang dibawa ke kegiatan posyandu secara rutin juga sudah sangat tinggi (Gambar 53). Kegiatan posyandu dapat menjadi titik awal upaya menanggulangi balita gizi buruk karena status gizi dan tumbuh kembang anak dapat dipantau; kegiatan posyandu juga memberikan upaya penanganan jika terjadi kasus gizi buruk. Kegiatan posyandu juga dapat berkontribusi terhadap program-program pencegahan dan mitigasi kasus *stunting*³¹. Namun, perlu dipastikan bahwa kapasitas para kader posyandu sudah sesuai dengan standar layanan kesehatan.

Gambar 53. Persentase Balita yang Dibawa ke Posyandu



Sumber: Survei SMERU, 2022

³¹*Stunting* atau kondisi pendek ditandai dengan kurangnya tinggi/panjang badan menurut umur anak. Kondisi *stunting* disebabkan masalah gizi yang berlangsung lama atau masalah gizi kronis (Kementerian Kesehatan, 2019). Nilai ukurannya biasanya dinyatakan dalam bentuk *z-score* tinggi badan per umur (*height-for-age z-score/HAZ*). Seorang anak disebut mengalami *stunting* jika standar deviasi HAZ-nya kurang dari -2 (World Health Organization, 2006).

Kotak 4

Penanganan Kasus *Stunting* Menjadi Prioritas Pemerintah KSB

Pemerintah KSB menetapkan *stunting* sebagai salah satu isu prioritas di bidang kesehatan. Persentase kasus *stunting* di KSB turun dari 15,09% pada 2019 menjadi 14,5% pada 2021 (Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat, .n.d.; *Bidikankameranews.com*, 2021). Kasus balita *stunting* merupakan permasalahan multidimensi yang upayanya juga perlu dilakukan secara multisektoral.

Menurut sejumlah informan, *stunting* disebabkan oleh kesalahan pola asuh, kurangnya asupan gizi, serta minimnya pengetahuan rumah tangga terkait kesehatan balita. Faktor-faktor yang disebutkan oleh informan sebenarnya adalah dampak dari masalah yang tidak tertangani. Kementerian Kesehatan (2018) menyebutkan bahwa masalah *stunting* dipengaruhi oleh tiga faktor, yakni (i) kapasitas finansial dan SDM yang rendah sehingga keluarga tidak mampu memberikan asupan gizi yang baik; (ii) norma sosial-budaya terkait pola asuh yang kurang tepat yang menjadi kebiasaan; dan (iii) layanan kesehatan yang kurang memadai sehingga berimplikasi pada kurang maksimalnya penanganan *stunting*. Oleh karena itu, penanganan *stunting* tidak hanya berupa mitigasi kasus, tetapi juga harus disertai dengan penyelesaian akar masalah *stunting*.

Ada orang tua yang pegawai negeri tapi anaknya *stunting*. Anaknya hampir tiga tahun *tapi tinggian* anak saya. Katanya *sih* anaknya sering makan *snack*, mungkin nutrisinya jadinya kurang. (Anggota BPD, perempuan, kecamatan A, KSB, 21 November 2022)

Stunting itu, anak yang tidak tercukupi gizinya. Informasi saya dapat dari kader-kader. Mereka biasanya bahas *stunting* di sini. Nutrisi dalam diri anak tidak lengkap, pertumbuhannya lambat, fisik mentalnya. Antisipasi dengan menjaga makanan, memberikan makanan yang bergizi dan memberikan suplemen. Saya berikan sayur bayam, telur. Makan ikan, dia kuat makan. (Staf kantor desa, perempuan, Kecamatan C, KSB, 23 November 2022)

Pemerintah KSB memiliki program yang dinamakan Program Rembuk *Stunting* sebagai upaya pencegahan dan penurunan *stunting*. Program ini merupakan wadah lintas sektor bagi dinas-dinas terkait untuk merumuskan strategi preventif (pencegahan), kuratif (pengobatan), dan promotif (langkah awal untuk pencegahan *stunting*). Di wilayah studi, juga terdapat program kelas ibu hamil yang diselenggarakan oleh puskesmas setempat sebagai wadah sosialisasi kesehatan ibu dan anak (KIA). Berbagai upaya terkait *stunting* perlu diarahkan pada penyelesaian masalah penyebab *stunting* yang bersifat multidimensi. *Stunting* tidak bisa hanya dipandang sebagai isu kesehatan, tetapi juga sebuah masalah ekonomi dan sosial.

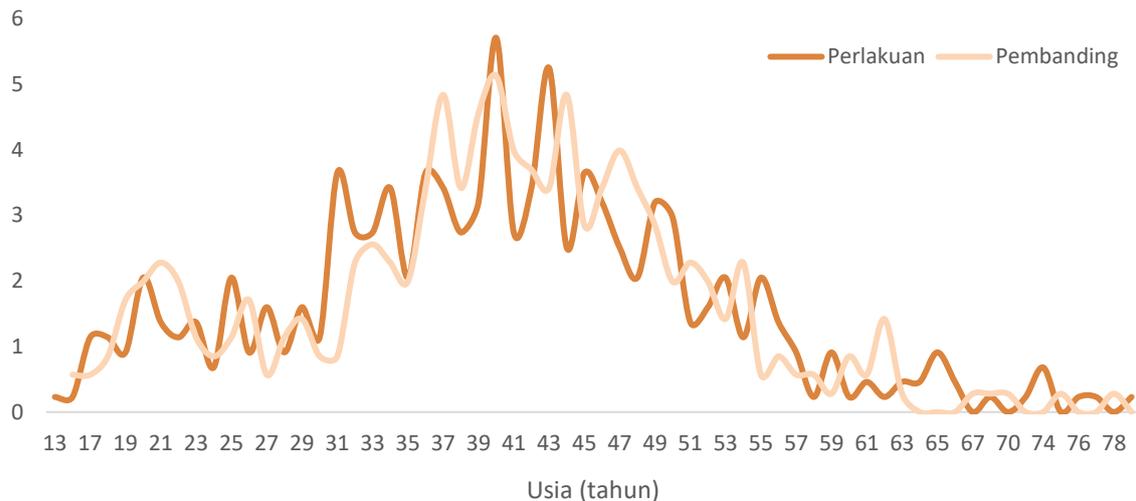
Penanganan *stunting* pada akhirnya harus berkelindan dengan program penanggulangan kemiskinan, peningkatan level pendidikan, penghapusan perkawinan anak, penguatan layanan kesehatan tingkat pertama, dan penguatan ketahanan pangan daerah. Selain itu, intervensi perilaku dan kultur masyarakat terkait pola asuh yang tepat akan menjadi kunci penanganan kasus balita *stunting*.

Sumber: wawancara SMERU, 2022

3.6.4 Kebiasaan Merokok

Sekitar 18% penduduk di wilayah perlakuan dan 23% penduduk di wilayah pembanding memiliki kebiasaan merokok. Lebih dari sepertiga penduduk berusia dewasa³² adalah perokok. Namun, proporsi penduduk berusia anak-anak (di bawah 15 tahun dan 18 tahun) yang merokok sangat kecil, yaitu kurang dari 1%. Proporsi perokok ditemukan lebih besar pada kelompok usia 31–50 tahun (usia produktif) (Gambar 54).

Gambar 54. Persentase Perokok Berdasarkan Usia



Sumber: survei SMERU, 2022

Meski persentase penduduk berusia anak-anak yang menjadi perokok kecil, ketika dewasa dan memasuki usia bekerja, mereka mulai menjadi perokok dan akan sulit untuk menghentikan kebiasaan tersebut. Dugaan ini didukung oleh data yang menunjukkan bahwa proporsi penduduk dalam angkatan kerja yang merupakan perokok lebih besar daripada proporsi penduduk yang bukan angkatan kerja (Gambar 55) dan perbedaannya signifikan secara statistik di kedua wilayah studi³³.

Tingginya persentase perokok pada usia produktif tidak terlepas dari hal-hal terkait pekerjaannya. Baik di wilayah perlakuan maupun wilayah pembanding, temuan kualitatif menunjukkan bahwa penduduk dewasa merokok untuk mengurangi stress akibat tekanan pekerjaan. Beban kerja yang makin berat berimplikasi pada bertambahnya konsumsi rokok per hari. Alasan lain juga berkaitan dengan pengaruh lingkungan kerja. Secara ilmiah, kandungan nikotin dalam rokok memang dapat menciptakan efek relaksasi yang cepat sehingga orang memilih untuk merokok guna mengurangi stres dan kecemasan meskipun sifatnya sementara (Mental Health Foundation, n.d).

Alasan merokok saat dalam kondisi banyak pekerjaan. Setiap hari biasanya bisa sampai dua bungkus rokok. (Bendahara koperasi, laki-laki, Kecamatan H, Kabupaten Sumbawa, 25 November 2022)

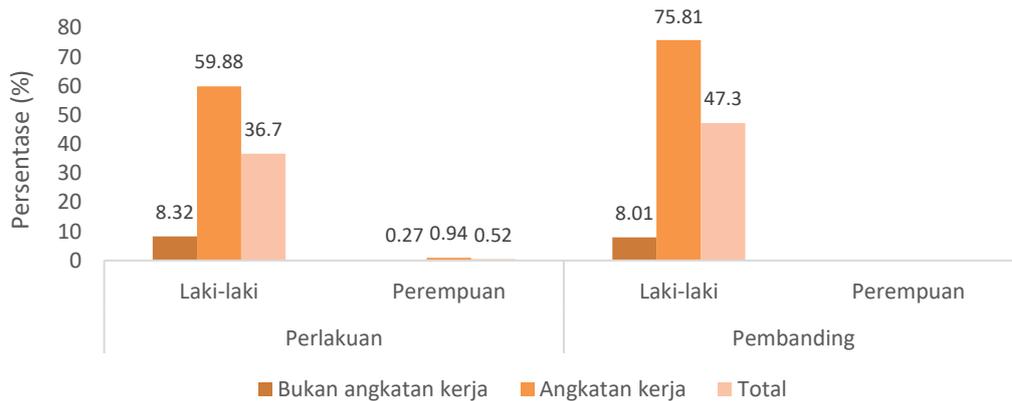
³²Penduduk usia dewasa adalah penduduk berusia 31 tahun ke atas.

³³Signifikan pada 1% melalui uji t-statistik.

Suami sudah merokok, mungkin saja pengaruh lingkungannya saat muda. Selain itu, alasan menjadi perokok adalah untuk menghilangkan rasa lelah dan stres, bahkan rokok seperti makanan yang jika tidak dikonsumsi akan menjadi hal yang cukup aneh rasanya. (Guru SD, perempuan, Kecamatan A, KSB, 21 November 2022)

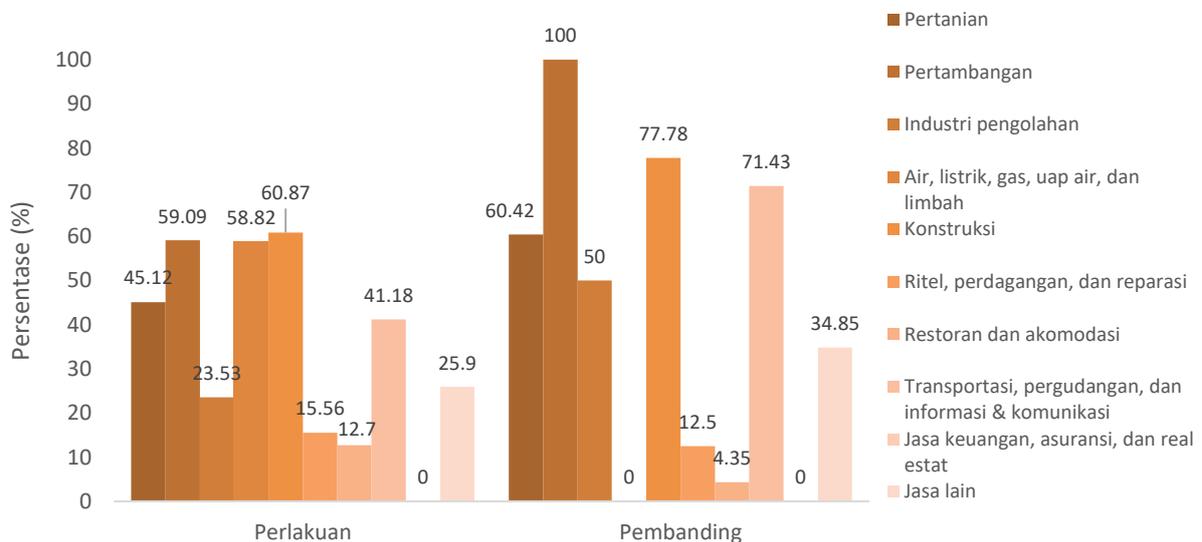
Suami bekerja di tambang sehingga kecenderungan merokok tinggi karena mengikuti lingkungannya. (Agen Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong dan penjual daring, perempuan, Kecamatan C, KSB, 22 November 2022)

Gambar 55. Persentase Penduduk yang Merokok Berdasarkan Partisipasi Angkatan Kerja



Sumber: survei SMERU, 2022

Gambar 56. Persentase Penduduk yang Merokok Berdasarkan Sektor Pekerjaan



Sumber: survei SMERU, 2022

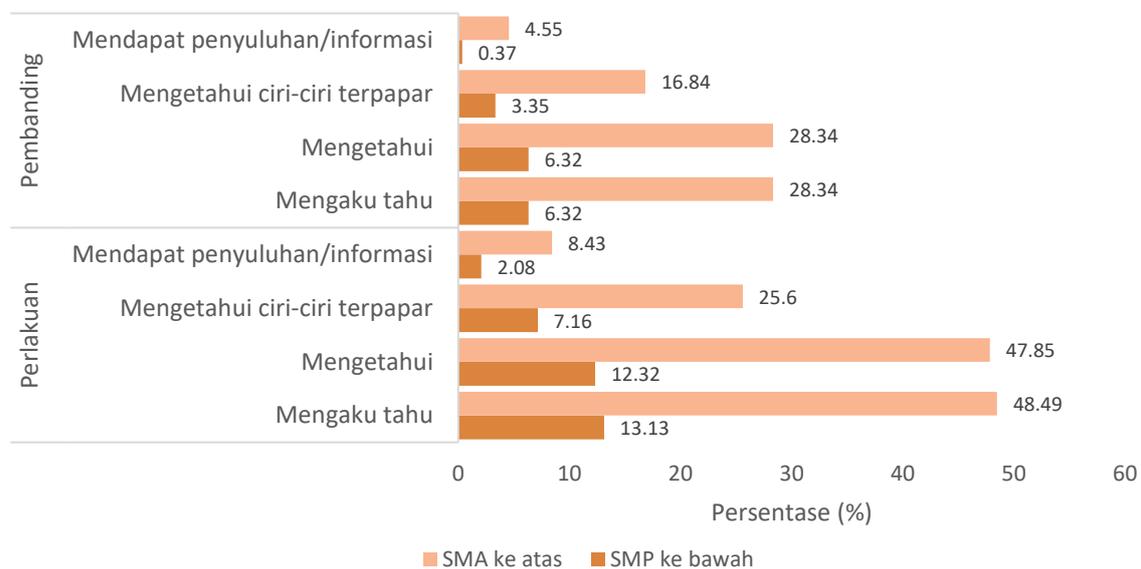
Jika dilihat dari sektor pekerjaannya, sektor pekerjaan yang didominasi oleh laki-laki, seperti pertambangan; konstruksi; transportasi, pergudangan, informasi dan komunikasi; serta pertanian, memang memiliki persentase perokok yang lebih tinggi (Gambar 56). Di sektor-sektor ini, tekanan dari teman (*peer pressure*) dan tekanan untuk terlihat lebih maskulin bisa jadi sangat tinggi. Pada beberapa kasus, perilaku merokok menjadi sebuah

bentuk maskulinitas dan kesetiakawanan sehingga beberapa orang mengalami kesulitan untuk menolaknya.

3.6.5 Bahaya Merkuri

Pada survei kuantitatif, kami juga menanyakan tentang pengetahuan penduduk mengenai bahaya merkuri³⁴. Data menunjukkan sangat kecilnya jumlah penduduk yang sadar akan bahaya merkuri dan memiliki pengetahuan yang cukup tentang merkuri. Selain itu, masih sangat sedikit penduduk mendapatkan penyuluhan ataupun informasi mengenai bahaya merkuri (Gambar 57). Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesadaran mengenai bahaya merkuri, perlu dilakukan penyuluhan secara masif dan berkala kepada seluruh masyarakat, khususnya warga yang memiliki risiko tinggi terpapar merkuri.

Gambar 57. Pengetahuan mengenai Bahaya Merkuri Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber: survei SMERU, 2022

Salah satu faktor yang memengaruhi pengetahuan dan kesadaran mengenai bahaya merkuri adalah pendidikan. Proporsi penduduk berpendidikan tinggi yang sadar akan bahaya merkuri³⁵ lebih besar daripada penduduk berpendidikan rendah dan perbedaan ini signifikan secara statistik. Selain pendidikan, gender juga memengaruhi pengetahuan dan kesadaran tentang bahaya merkuri. Proporsi perempuan yang mengetahui bahaya merkuri lebih besar. Meski demikian, bahaya merkuri yang mereka pahami adalah bahaya merkuri yang berasal dari kosmetik, bukan dari penambangan ilegal. Sebagian informan kualitatif juga mengetahui informasi mengenai merkuri dalam praktik tambang emas rakyat, tetapi tidak mengetahui dampaknya bagi kesehatan.

³⁴ditanyakan kepada responden berusia 10 tahun ke atas

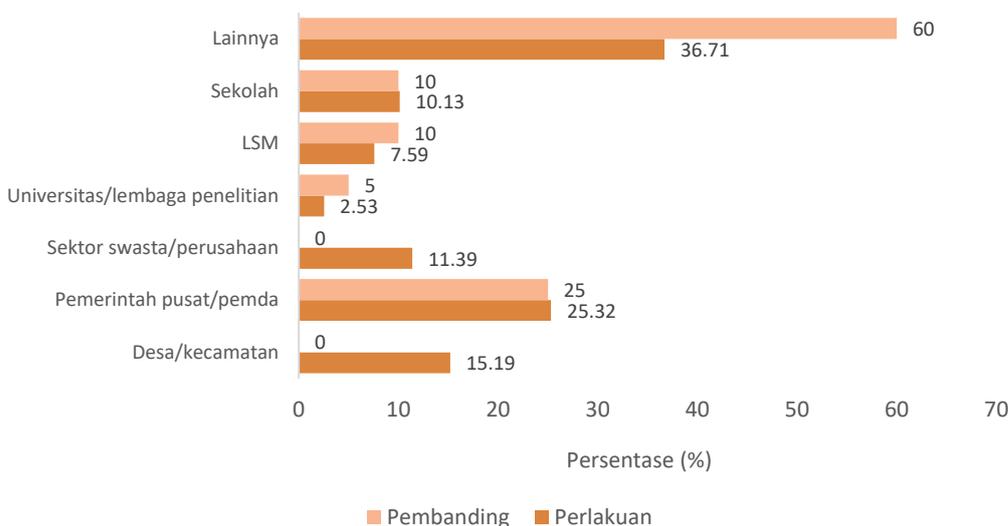
³⁵Dilihat dari berbagai indikator kesadaran akan bahaya merkuri: (i) mengaku mengetahui bahaya merkuri, (ii) mengetahui bahaya merkuri dengan benar, dan (iii) mengetahui ciri-ciri orang yang terpapar merkuri.

Saya tahu merkuri berbahaya untuk tubuh, kulit, dan lingkungan. Saya pernah dengar kata merkuri di Taliwang karena terjadi pencemaran air mengandung merkuri. Saya juga dengar merkuri berada dalam kandungan krim [untuk perawatan muka] yang bisa merusak kulit, bisa merusak muka. (Staf kantor desa, perempuan, Kecamatan C, KSB, 23 November 2022)

Merkuri racun yang biasanya ada di kosmetik dan juga tempat *gelondong* [proses emas tambang rakyat]. Di kecamatan C dulu ada *gelondong*, tapi lupa tahun berapa. Untuk dampak merkuri, saya tidak tahu. (Pedagang, laki-laki, Kecamatan C, KSB, 23 November 2022)

Sementara itu, berdasarkan hasil survei kepada 99 orang (79 di wilayah perlakuan dan 20 di wilayah pembanding) yang pernah mendapatkan penyuluhan atau informasi mengenai bahaya merkuri, sumber informasi utama mengenai merkuri adalah internet, teman/keluarga, dan lembaga-lembaga lain yang tidak secara khusus ditujukan untuk melakukan penyuluhan tentang bahaya merkuri (Gambar 58).

Gambar 58. Sumber Informasi mengenai Bahaya Merkuri yang Didapatkan Penduduk



Sumber: survei SMERU, 2022

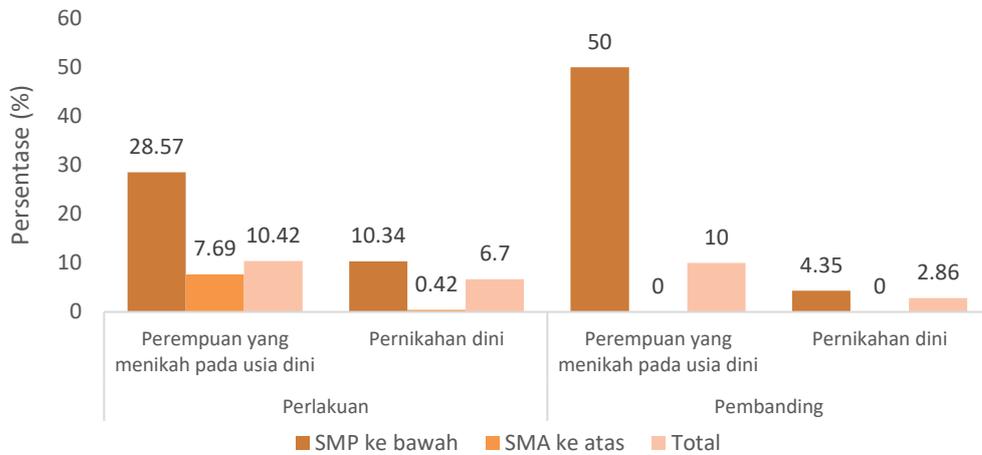
3.7 Aspek Kerentanan Sosial dan Lingkungan

3.7.1 Pernikahan Anak

Pernikahan anak merupakan salah satu sumber kerentanan sosial dan ekonomi, khususnya bagi perempuan.³⁶ Perempuan yang menikah terlalu dini biasanya memiliki kemungkinan lebih kecil untuk mengenyam/menyelesaikan pendidikan tinggi. Dengan pendidikan yang rendah, perempuan pada akhirnya akan mendapatkan imbal hasil atas pekerjaan yang lebih rendah.

³⁶Pernikahan anak yang dimaksud dalam laporan ini terdiri atas dua indikator: perempuan menikah pada usia dini dan pernikahan dini. Pernikahan anak dan pernikahan dini dalam laporan ini dipakai secara bergantian dengan maksud yang sama.

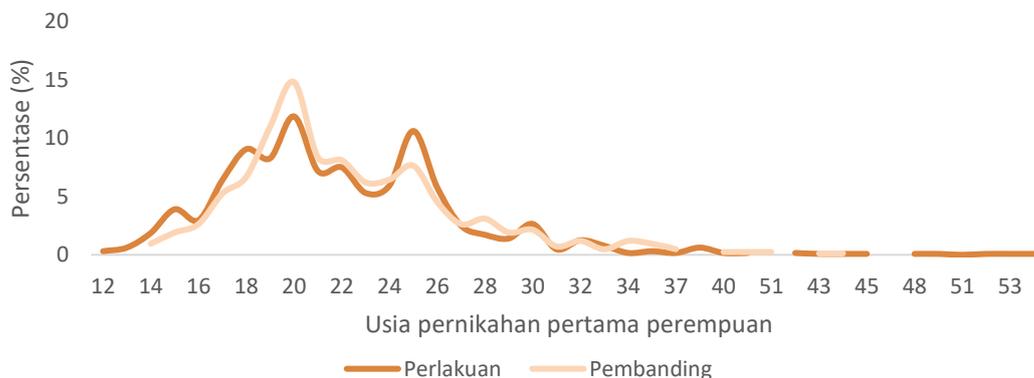
Gambar 59. Persentase Perempuan yang Menikah pada Usia Dini dan Persentase Pernikahan Dini



Sumber: survei SMERU, 2022

Hasil survei menunjukkan bahwa masih ada perempuan yang menikah pada usia dini di wilayah studi.³⁷ Persentase perempuan berusia 20–24 tahun yang menikah sebelum menginjak usia 18 tahun adalah 10,4% di wilayah perlakuan dan 10% di wilayah pembandingan (Gambar 59). Mayoritas praktik pernikahan dini dilakukan oleh perempuan dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah. Dengan melihat indikator perkawinan dini³⁸ yang lain, persentase perempuan yang melakukan praktik perkawinan dini adalah 6,7% di wilayah perlakuan dan 2,9% di wilayah pembandingan. Sama dengan indikator sebelumnya, persentase praktik pernikahan dini lebih besar pada perempuan berpendidikan relatif rendah. Hampir tidak ada perempuan berpendidikan tinggi yang melakukan praktik pernikahan dini. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kunci untuk menghapus praktik pernikahan dini adalah peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan tinggi.

Gambar 60. Usia Pernikahan Pertama Perempuan



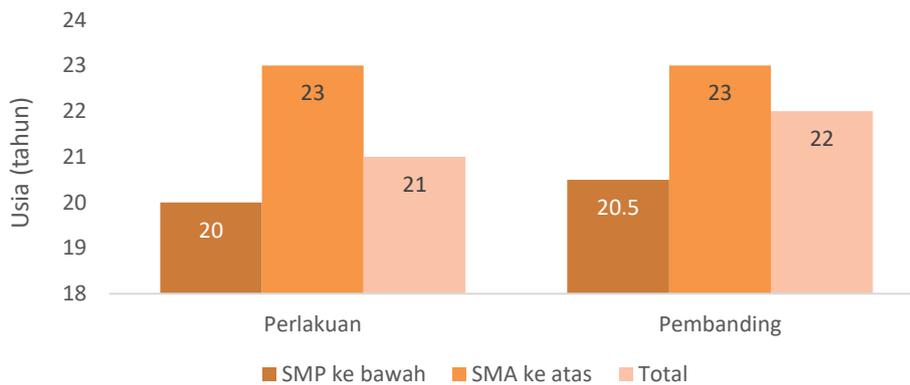
Sumber: survei SMERU, 2022

³⁷Perempuan yang menikah pada usia dini: perempuan berusia 20–24 tahun pernah menikah yang usianya saat menikah pertama kali di bawah 18 tahun (sesuai dengan indikator 5.3.1* TPB)

³⁸Pernikahan dini: proporsi perempuan berusia 10 tahun ke atas yang usianya saat menikah pertama kali di bawah 16 tahun (indikator BPS)

Hasil survei menunjukkan bahwa pernikahan paling muda terjadi pada usia 12 tahun di wilayah perlakuan dan usia 14 tahun di wilayah pembanding (Gambar 60). Sebagian besar perempuan menikah pada usia 18–26 tahun. Adapun median usia kawin pertama perempuan³⁹ sebenarnya sudah berada di atas 18 tahun, yakni 21 tahun di wilayah perlakuan dan 22 tahun di wilayah pembanding (Gambar 61). Hal ini menunjukkan sebuah progres di wilayah studi meskipun pada rentang usia tersebut sebenarnya perempuan masih bisa mengenyam pendidikan tinggi (18–24 tahun masih termasuk dalam kelompok usia sekolah). Makin rendah tingkat pendidikan seseorang, makin besar pula kemungkinan ia menikah pada usia muda.

Gambar 61. Median Usia Menikah Perempuan



Sumber: survei SMERU, 2022

Temuan kuantitatif tersebut sejalan dan diperkuat oleh data-data dari informan (data kualitatif) yang menegaskan kejadian pernikahan dini di lingkungan sekitar mereka. Pernikahan dini—yang terjadi akibat kehamilan takterduga—merupakan salah satu sumber kerentanan masyarakat di wilayah perlakuan. Berdasarkan temuan kualitatif, sebagian besar anak-anak yang mengalami kejadian ini masih duduk di bangku SMP dan SMA. Di antara berbagai faktor yang disebutkan oleh informan, pergaulan bebas dan penyalahgunaan media sosial merupakan faktor utama yang mendorong terjadinya kehamilan tidak terduga.

Banyak sekali [kejadian pernikahan dini]. Kadang ada yang karena kecelakaan [kehamilan takterduga]. Itu SMP sekarang. Kasihan mereka putus sekolah. Sekarang kejadian masih tinggi. Terjadinya hal seperti ini, karena pergaulan bebas, kurang bimbingan orang tua. Anak-anak bebas berkomunikasi dengan HP. Mereka bebas mengakses konten-konten negatif. (Staf kantor desa, perempuan, Kecamatan C, KSB, 23 November 2022)

Pernikahan usia dini—yang berdasarkan data kualitatif banyak terjadi akibat kehamilan tidak terduga—merupakan hal yang berisiko baik bagi kesehatan fisik dan mental perempuan, serta tumbuh kembang anaknya pada kemudian hari. Perempuan yang melahirkan pada usia dini lebih berisiko untuk mengalami kematian ataupun keguguran saat persalinan yang berdampak buruk pada kesehatan reproduksinya. Sementara itu, dari aspek ekonomi dan sosial, perempuan yang menikah pada usia dini memiliki kesempatan

³⁹Median usia kawin pertama perempuan: median usia kawin pertama bagi perempuan usia 25–49 tahun yang pernah menikah/tinggal bersama (sesuai dengan indikator 5.3.1.(a) TPB).

lebih kecil untuk menyelesaikan tingkat pendidikan tinggi karena mereka akan sibuk untuk mengurus anak dan rumah tangganya. Sebagai akibatnya, kontribusi perempuan secara ekonomi juga lebih rendah daripada laki-laki, sebagaimana dibahas pada Subbab 3.2. Dalam jangka panjang, pernikahan dini akan menyebabkan rendahnya taraf kesehatan anak dan tingkat pendidikan anak. Pada akhirnya, unit keluarga penduduk yang menikah pada usia terlalu dini akan lebih rentan secara sosial dan ekonomi. Risiko kesehatan yang dihadapi perempuan dengan kehamilan dini terkonfirmasi oleh temuan kualitatif. Pada kehamilan yang sangat rentan, ada risiko persalinan yang membahayakan ibu dan bayi yang baru lahir. Adanya risiko ringan ataupun berat yang mengarah pada kematian ibu dan bayi perlu ditangani secara serius. Pada saat yang sama, upaya pencegahan sangat perlu digalakkan untuk menyelesaikan akar masalah pernikahan dini.

Beberapa kasus yang menjadi dampak dari pernikahan dini kami tangani, seperti melahirkan partus, kehamilan berisiko tinggi karena usia muda, keguguran, dan bayi lahir kurang berat badan. (Pegawai puskesmas, laki-laki, Kecamatan C, KSB, 22 November 2022)

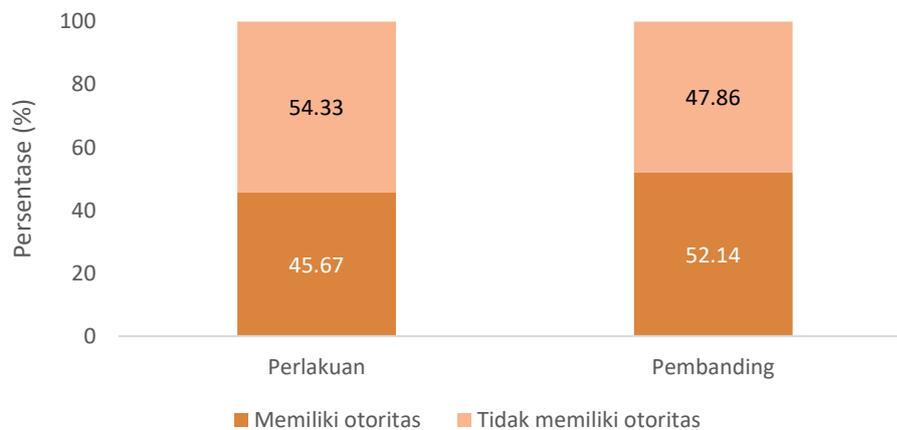
Upaya pencegahan pernikahan dini sudah menjadi perhatian khususnya bagi pihak sekolah, tenaga kesehatan, dan tokoh masyarakat setempat. Di tingkat sekolah, tenaga pendidik berkontribusi dalam memberikan wawasan mengenai pernikahan dini dan mengimbau agar peserta didiknya tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri. Tokoh masyarakat setempat juga melakukan upaya serupa melalui pendekatan dengan orang tua tentang bahaya pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap kondisi sosial-ekonomi ke depan. Upaya serius juga dilakukan oleh puskesmas setempat melalui penyuluhan kesehatan reproduksi serta sosialisasi tentang bahaya pergaulan bebas dan penyebaran penyakit infeksi menular seksual (IMS) melalui Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di sekolah dan posyandu remaja.

3.7.2 Suara Perempuan dalam Pengambilan Keputusan

Isu kesetaraan gender memiliki aspek yang luas baik dari sudut pandang ekonomi maupun sosial. Dalam laporan ini, aspek kesetaraan gender diletakkan di bawah payung kerentanan sosial karena perempuan yang mengalami diskriminasi atau tidak memiliki otoritas atas dirinya sendiri termasuk dalam kelompok yang rentan secara sosial. Pada bagian ini, pembahasan mengenai isu kesetaraan gender hanya memasukkan indikator proporsi perempuan yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan.⁴⁰

⁴⁰Indikator ini sesuai dengan indikator TPB 5.6.1*, yaitu proporsi perempuan usia reproduksi (15–49 tahun) yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan alat kontrasepsi, dan layanan Kesehatan reproduksi.

Gambar 62. Persentase Perempuan yang Memiliki Otoritas atas Kesehatan dan Urusan Reproduksi



Sumber: survei SMERU, 2022

Berdasarkan hasil survei rumah tangga, otoritas yang dimiliki perempuan dalam menentukan hal pribadi yang berhubungan dengan dirinya masih cukup rendah (Gambar 62). Di wilayah perlakuan, lebih dari separuh perempuan tidak memiliki otoritas atau keleluasaan untuk menentukan urusan reproduksi dan kesehatannya sendiri. Angka yang lebih tinggi justru ditemukan di wilayah pemandang. Melalui indikator ini, perempuan dinyatakan memiliki otoritas jika memenuhi tiga indikator: (i) mampu mengatakan *tidak* kepada pasangan saat tidak ingin berhubungan seksual, (ii) memutuskan penggunaan alat kontrasepsi oleh diri sendiri atau bersama pasangan, dan (iii) memutuskan layanan kesehatan untuk diri sendiri oleh diri sendiri atau bersama-sama dengan pasangan/kerabat. Dari ketiga indikator, mayoritas perempuan berandil dalam memutuskan penggunaan alat kontrasepsi dan layanan kesehatan yang diinginkan (seperti proses melahirkan, penggunaan obat-obatan, dan sebagainya). Namun, masih ada cukup banyak perempuan yang tidak mampu mengatakan *tidak* kepada pasangannya saat tidak ingin berhubungan seksual.

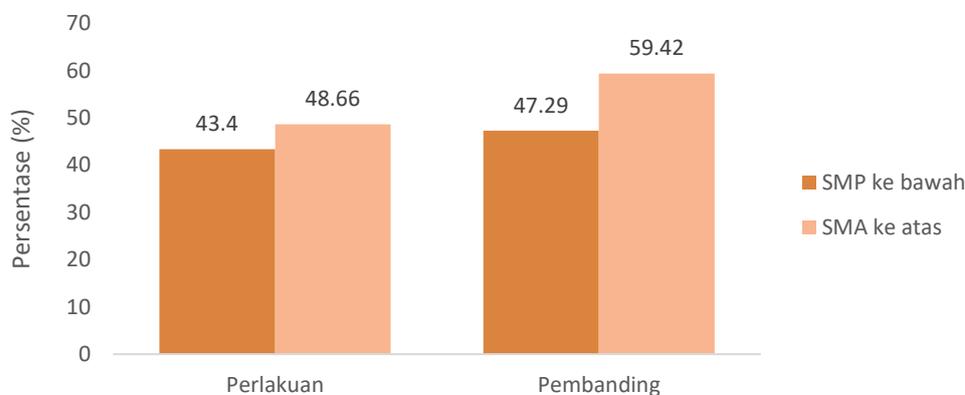
Keputusan terkait penggunaan kontrasepsi ditetapkan secara bersama melalui komunikasi dua arah antara suami dan istri. Hal ini menunjukkan makin setaranya posisi suami dan istri dalam menentukan keputusan penting. Temuan kualitatif menunjukkan bahwa suami dan istri menentukan penggunaan kontrasepsi melalui diskusi terbuka; dalam diskusi ini, istri biasanya lebih menguasai topik diskusi dengan cara memaparkan kelebihan dan kekurangan penggunaan alat kontrasepsi. Pada beberapa kasus, perempuan menjadi pengambil keputusan final mengenai penggunaan alat kontrasepsi. Jika dilihat lebih jauh, penggunaan alat kontrasepsi tidak semata-mata bertujuan mengendalikan kehamilan, tetapi juga memperkuat hak perempuan dalam menentukan waktu dan sekaligus kesiapan kehamilan.

Memakai kontrasepsi untuk membatasi jarak kelahiran anak. Keputusan ditentukan istri saya. (Pedagang, laki-laki, Kecamatan C, KSB, 23 November 2022)

Meskipun sudah banyak perempuan yang mampu menyuarakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan alat kontrasepsi dan layanan kesehatan bagi

dirinya, mayoritas perempuan masih belum mampu mengatakan *tidak* pada ajakan suami untuk berhubungan seksual saat mereka tidak menginginkannya. Hal ini mungkin masih berkaitan erat dengan kuatnya kultur patriarki khususnya terkait hubungan seksual antara suami dan istri. Dalam kultur patriarki yang kuat, tidak lazim bagi seorang istri untuk menolak ajakan suami untuk hubungan seksual. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara kelompok perempuan berpendidikan tinggi dan perempuan berpendidikan relatif rendah atas otoritas tersebut.⁴¹ Makin tinggi tingkat pendidikan seorang perempuan, makin besar kemungkinan mereka untuk menolak ajakan hubungan seksual ketika mereka tidak menginginkannya dan mengambil keputusan dalam urusan kesehatan reproduksinya (Gambar 63).

Gambar 63. Persentase Perempuan yang Memiliki Otoritas Berdasarkan Tingkat Pendidikan



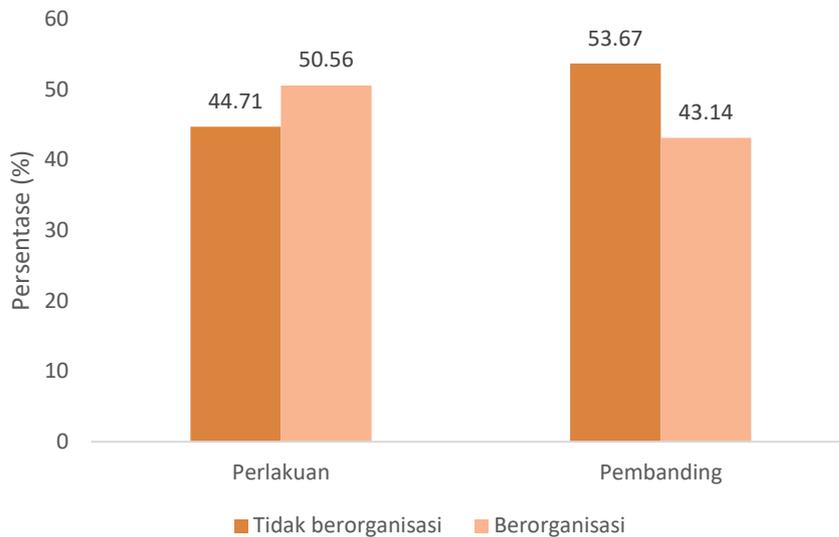
Sumber: survei SMERU, 2022

Isu otoritas setidaknya terdiri atas dua hal, yaitu kemampuan bersuara atau mengeluarkan pendapat dan kemampuan mengambil keputusan. Pada praktiknya, isu kepemilikan otoritas perempuan, khususnya perempuan yang sudah berusia paruh baya, tidak cukup hanya diselesaikan dengan peningkatan pendidikan perempuan. Otoritas perempuan berkaitan erat dengan isu pemberdayaan. Langkah awal untuk membuat perempuan berdaya adalah memberikan ruang kepada perempuan untuk dapat bersuara dan mengeluarkan pendapat. Misalnya, mereka dapat berpartisipasi dalam sebuah organisasi yang dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka. Saat mereka sudah mampu menyuarakan pendapat, langkah selanjutnya adalah memberikan mereka ruang dan kesempatan untuk mengambil keputusan. Studi Migunani (2017) menunjukkan bahwa aksi kolektif perempuan dapat menjadi gerbang utama bagi tercapainya pemberdayaan perempuan. Aksi kolektif tersebut dapat berupa perkumpulan baik formal maupun nonformal yang berasal dari kegiatan sosial yang dilakukan masyarakat setempat. Dalam wadah tersebut, perempuan berkesempatan untuk menyampaikan pendapat, mengembangkan keterampilan berorganisasi, serta meningkatkan relasi interpersonalnya. Aksi kolektif tersebut akan memberikan pengaruh pada peningkatan kualitas SDM

⁴¹Uji t-statistik dilakukan di wilayah perlakuan dan pemanding untuk menguji perbedaan kepemilikan otoritas perempuan berdasarkan tingkat pendidikan dan hasil yang signifikan (signifikan pada 5%) ditemukan di wilayah pemanding. Tidak ditemukan perbedaan antartingkat pendidikan pada indikator otoritas perempuan yang signifikan secara statistik di wilayah perlakuan.

perempuan, aset sosial, dan aset finansial yang pada akhirnya akan membuat perempuan mampu berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan. Di wilayah studi, kepemilikan otoritas atas diri sendiri terlihat lebih tinggi pada kelompok perempuan yang menjadi anggota organisasi tertentu (Gambar 64).

Gambar 64. Otoritas Perempuan Berdasarkan Keikutsertaannya dalam Organisasi



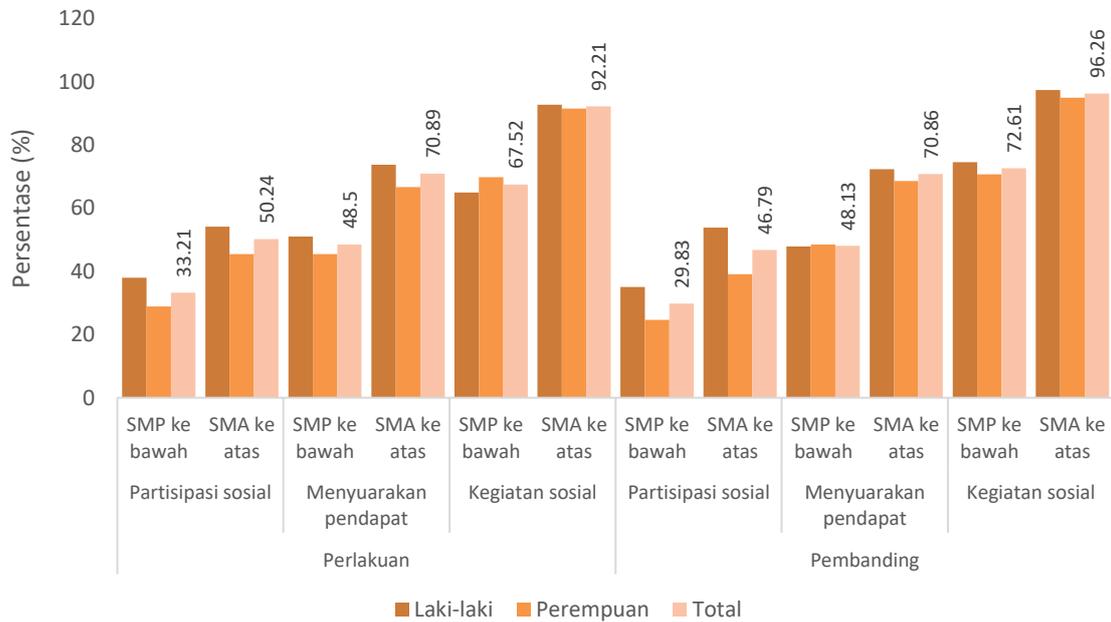
Sumber: survei SMERU, 2022

3.7.3 Partisipasi Sosial

Partisipasi sosial, termasuk keikutsertaan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan ataupun organisasi, merupakan salah satu bentuk terlaksananya fungsi sosial seorang individu. Partisipasi sosial secara aktif tersebut dapat menggambarkan sebuah upaya kolektif individu sebagai makhluk sosial untuk menyelesaikan permasalahan di sekitarnya agar terbebas dari kerentanan sosial maupun ekonomi.

Studi ini menemukan bahwa tingkat partisipasi sosial di wilayah studi masih terbilang rendah. Namun, tingkat partisipasi dalam menyuarakan pendapat secara aktif sudah cukup tinggi. Dalam hal keikutsertaan dalam rapat warga, keterlibatan laki-laki lebih tinggi baik di wilayah perlakuan maupun di wilayah pemandang. Hal yang sama ditemukan pada partisipasi sosial berupa kemampuan mengeluarkan pendapat dalam rapat; persentase laki-laki yang berani menyuarakan pendapatnya lebih tinggi daripada persentase perempuan. Namun, dalam hal aktivitas sosial kemasyarakatan, seperti kegiatan keagamaan, gotong royong, arisan, atau upacara kematian, keterlibatan perempuan lebih tinggi khususnya di wilayah perlakuan (Gambar 65).

Gambar 65. Partisipasi Sosial dan Kegiatan Masyarakat Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin



Sumber: survei SMERU, 2022

Selain perbedaan terkait gender, tingkat partisipasi sosial masyarakat juga dapat berbeda antartingkat pendidikan dan antarkelompok usia. Makin tinggi tingkat pendidikan seseorang, makin besar pula kecenderungan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial baik secara pasif maupun aktif. Hipotesis ini terbukti secara statistik, yaitu bahwa penduduk dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan usia yang lebih dewasa memiliki tingkat partisipasi sosial, kemampuan menyuarakan pendapat, dan keikutsertaan dalam kegiatan sosial yang lebih tinggi baik di wilayah perlakuan maupun pembanding (Tabel 14). Tingginya tingkat pendidikan membuat kesadaran seseorang akan isu sosial dan kepercayaan dirinya untuk terlibat dalam kegiatan sosial lebih tinggi. Hal ini memungkinkan mereka untuk terlibat secara aktif dalam rapat dan aktivitas sosial lain. Terkait usia, penduduk usia muda yang bekerja biasanya tidak begitu tertarik untuk terlibat dalam rapat atau kegiatan sosial karena mungkin kesibukannya bekerja. Sementara itu, penduduk berusia lebih tua bisa jadi memiliki waktu luang yang lebih banyak sehingga dapat berpartisipasi sosial secara lebih aktif daripada penduduk usia muda.

Tabel 14. Hasil Uji Signifikansi Statistik Aspek Partisipasi Sosial (T-Statistik)

	Indikator	Kelompok	Jumlah Penduduk yang Diobservasi	Selisih (Difference)	Galat Baku	t	Pr (T > t)
Perlakuan	Partisipasi sosial	Jenis kelamin	1.839	10,66	2,27	4,70	0,000*
		Pendidikan	1.734	-17,03	2,41	-7,07	0,000*
		Usia	1.839	-39,00	2,12	-18,41	0,000*
	Menyuarakan pendapat	Jenis kelamin	728	7,20	3,69	1,95	0,052***
		Pendidikan	683	-22,38	3,68	-6,08	0,000*
		Usia	728	-9,76	4,68	-2,09	0,037**
	Kegiatan sosial	Jenis kelamin	2.346	-3,04	1,91	-1,59	0,111
		Pendidikan	2.033	-24,69	2,00	-12,34	0,000*
		Usia	2.346	-46,66	1,66	-28,09	0,000*
Pembanding	Partisipasi sosial	Jenis kelamin	1.224	12,56	2,71	4,64	0,000*
		Pendidikan	1.182	-16,96	2,95	-5,75	0,000*
		Usia	1.224	-38,86	2,55	-15,23	0,000*
	Menyuarakan pendapat	Jenis kelamin	431	2,01	4,85	0,41	0,679
		Pendidikan	416	-22,72	4,79	-4,74	0,000*
		Usia	431	-11,24	6,86	-1,64	0,102
	Kegiatan sosial	Jenis kelamin	1.482	4,66	2,27	2,05	0,041**
		Pendidikan	1.338	-23,64	2,39	-9,90	0,000*
		Usia	1.482	-46,07	1,94	-23,77	0,000*

Sumber: survei SMERU, 2022

Catatan:

Difference adalah rerata perbedaan tiap-tiap variabel, yaitu (i) jenis kelamin (perbedaan angka rata-rata antara laki-laki dan perempuan); (ii) pendidikan (perbedaan angka rata-rata antara individu berpendidikan SMP ke bawah dan individu berpendidikan SMA ke atas); dan (iii) usia (perbedaan antara penduduk berusia muda/30 tahun ke bawah dan penduduk berusia lebih tua/di atas 30 tahun).

* Signifikan pada 1%.

** signifikan pada 5%.

*** signifikan pada 10%.

Jika tidak ada tanda bintang, perbedaan antarkelompok tidak signifikan.

Temuan kualitatif juga menunjukkan terdapat sejumlah kelompok berbasis kesukuan yang kegiatan-kegiatannya menjadi modal sosial bagi anggotanya untuk dapat bertahan dan beradaptasi di tempat baru. Keberadaan kelompok-kelompok ini tidak terlepas dari heterogenitas masyarakat pendatang yang mencari penghidupan di wilayah studi. Sejumlah kelompok berbasis kesukuan, seperti Ikatan Warga Sumba dan Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, cukup dikenal di kalangan informan kualitatif. Keberadaan

kelompok ini dapat dianggap bagian dari modal sosial karena di dalamnya terbentuk jejaring sumber daya, baik sumber daya yang bersifat aktual maupun potensial, yang dapat dimanfaatkan oleh anggota kelompok. Sebagian besar kegiatan yang dilakukan oleh kelompok berbasis kesukuan ini adalah kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti mengumpulkan iuran untuk membantu anggota kelompoknya yang sakit atau berada dalam kedukaan (anggota keluarganya meninggal). Strategi penghidupan, seperti informasi lowongan pekerjaan, juga merupakan hal yang secara aktif dibahas dan disebarluaskan kepada sesama anggota kelompok.

Ada pengumpulan bantuan donasi untuk sesama warga yang sakit atau meninggal. Selain itu, membahas lowongan kerja. Dalam pertemuan, biasanya berkumpul orang-orang dewasa dan pemuda-pemudi. Yang dibahas ialah masalah sosial kemasyarakatan, seperti mengumpulkan donasi untuk warga Sumba [di KSB] yang sakit. Mereka iuran sebesar Rp50.000 dan untuk warga yang meninggal ada uang kedukaan yang dipungut sebesar Rp100.000 untuk tiap rumah tangga. (Ibu rumah tangga, perempuan, Kecamatan A, KSB, 21 November 2022)

Lebih sedikitnya perempuan yang berpartisipasi dalam pertemuan warga daripada laki-laki memunculkan dugaan adanya kultur patriarki yang cukup kuat baik di wilayah perlatkuan maupun pembeding. Masyarakat yang berada dalam kultur patriarki yang kuat menyerahkan keputusan terkait ekonomi atau politik kepada laki-laki, sementara urusan terkait aktivitas sosial yang tidak memiliki dampak ekonomi atau politik secara langsung diserahkan kepada perempuan. Rapat atau pertemuan warga biasanya dilakukan untuk pengambilan keputusan terkait urusan ekonomi atau politik, misalnya izin usaha atau izin kampanye politik di desa. Sementara itu, aktivitas sosial biasanya berbentuk kegiatan keagamaan, seperti pengajian, ibadah bersama, upacara kematian, dan pernikahan, serta kegiatan yang mencerminkan kegotyuban suatu komunitas, seperti gotong royong.

Berdasarkan temuan kualitatif, perempuan lebih cenderung terlibat dalam kegiatan yang bersifat pemberdayaan, seperti menjadi pekerja sosial masyarakat, kader posyandu, dan kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Perempuan juga lebih aktif dalam perkumpulan sosial, seperti pengajian, *gawe desa* (kearifan lokal yang menggambarkan suasana dan semangat kerja yang melibatkan kolaborasi masyarakat desa), *besiru* (kegiatan saling membantu dalam kegiatan kemasyarakatan), dan upacara kematian. Keterlibatan perempuan dalam kegiatan sosial terutama didorong oleh keinginan untuk berkontribusi positif terhadap komunitas di sekitarnya (Zid, Casmana, dan Hijrawadi, 2020). Dalam studi ini, kontribusi positif yang terlihat adalah keinginan untuk membantu kelompok rentan, seperti warga lansia dan penyandang disabilitas, karena perhatian terhadap kelompok ini dianggap masih kurang. Selain itu, studi ini menemukan bahwa perkumpulan sosial menjadi saluran bagi perempuan untuk memperluas wawasannya mengenai permasalahan rumah tangga melalui ajaran agama. Temuan kualitatif menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan yang aktif dalam kegiatan sosial merupakan perempuan bekerja, baik di sektor formal maupun informal. Bagi perempuan yang bekerja, kegiatan sosial merupakan kegiatan komplementer.

Saya ikut program pekerja sosial masyarakat, bekerja secara sukarela membantu masyarakat yang lansia dan disabilitas, untuk kegiatan Dinas Sosial. Kami direkrut oleh Dinas Sosial. Di desa ini, saya sendiri. Setiap desa ada satu orang. Saya dapat uang jalan

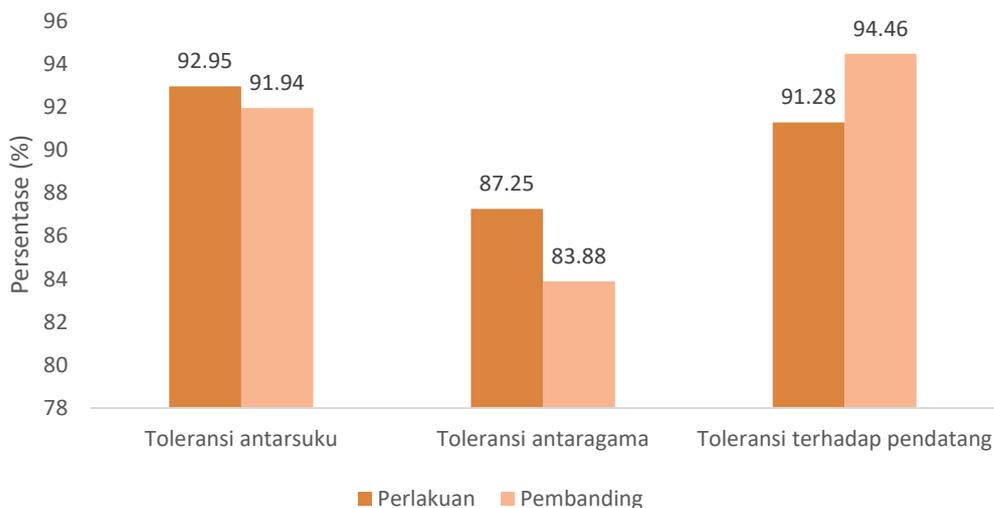
ketika akan membantu orang. (Staf kantor desa, perempuan, Kecamatan C, KSB, 23 November 2022)

Lebih banyak mengikuti pengajian yang dilaksanakan setiap sore hari Jumat [malam hari dikhususkan untuk pengajian bapak-bapak]. Kegiatan dalam pengajian biasanya [berupa] ceramah dari *ustad* seputar masalah anak, masalah suami, dan masalah rumah tangga. (Penjual bakso dan pemilik usaha kos, perempuan, Kecamatan C, KSB, 23 November 2022)

3.7.4 Toleransi

Sumber kerentanan sosial lain adalah konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat. Konflik sosial dapat berasal dari isu terkait suku/ras/agama ataupun perbedaan kondisi ekonomi. Dalam laporan ini, ada tiga isu toleransi yang akan dibahas sebagai cerminan dari rendahnya kerentanan sosial, yaitu toleransi antarsuku, toleransi antaragama, dan toleransi terhadap pendatang dari luar kabupaten tempat tinggal. Survei mengenai toleransi dilakukan di tingkat rumah tangga dan terdiri atas pertanyaan *setuju* atau *tidak setuju* jika (i) terdapat kegiatan di sekitar tempat tinggal yang dilakukan oleh warga dari suku/agama lain, (ii) terdapat anggota rumah tangga yang berteman dengan orang dari suku/agama lain, dan (iii) jika terdapat orang dari luar kabupaten tempat tinggal (pendatang) yang menetap di lingkungan tempat tinggal.

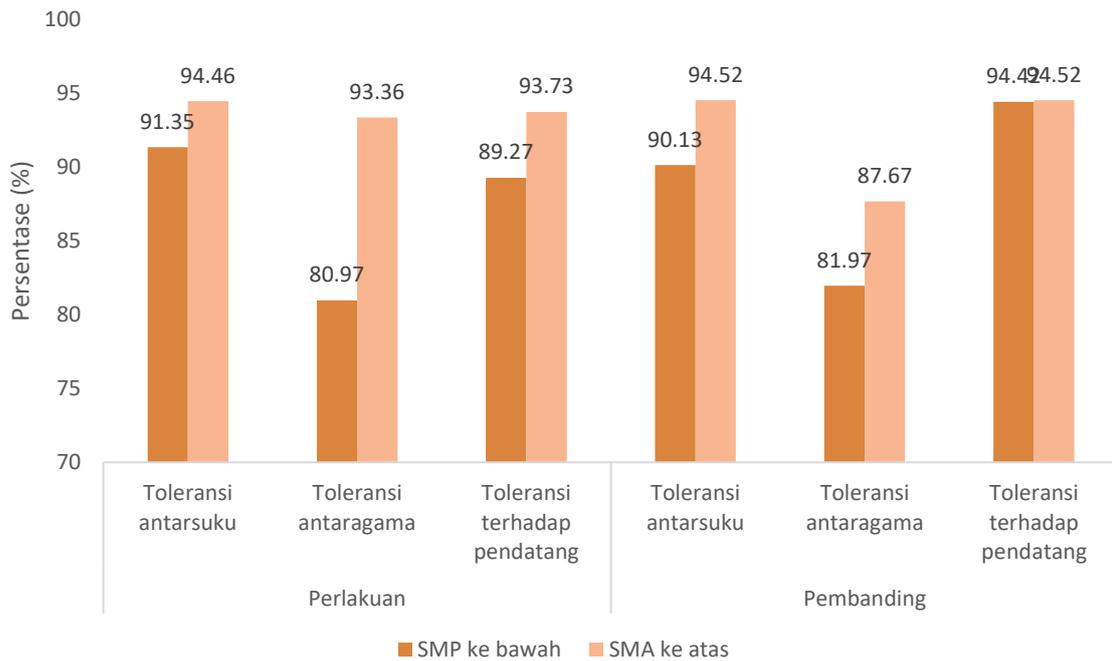
Gambar 66. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Toleransi menurut Jenis Toleransi



Sumber: survei SMERU, 2022

Temuan kuantitatif menunjukkan bahwa angka toleransi antarsuku, toleransi antaragama, dan toleransi terhadap pendatang di wilayah studi sudah sangat tinggi (Gambar 66). Hal ini menunjukkan harmonisnya hubungan sosial kemasyarakatan di wilayah studi dan kecilnya kemungkinan akan terjadinya konflik sosial akibat perbedaan ras/agama/suku ataupun status pendatang. Meskipun lebih rendah daripada persentase toleransi antarsuku dan toleransi terhadap pendatang, persentase toleransi antaragama masih cukup tinggi. Sekitar sembilan dari sepuluh orang di wilayah perlakuan dan pembanding tidak memperlakukan kegiatan warga dari agama lain ataupun pertemanan anggota keluarganya dengan orang dari agama lain.

Gambar 67. Tingkat Toleransi menurut Tingkat Pendidikan KRT



Sumber: survei SMERU, 2022

Faktor pendidikan berperan penting dalam membentuk sebuah masyarakat yang toleran. Rumah tangga yang KRT-nya berpendidikan lebih rendah cenderung intoleran terhadap suku lain, agama lain, dan pendatang dari daerah lain, dibandingkan dengan rumah tangga yang KRT-nya berpendidikan lebih tinggi dan perbedaan tersebut signifikan secara statistik (Gambar 67).⁴² Hal yang mungkin dapat menjelaskan fenomena ini adalah bahwa seseorang dengan tingkat pendidikan rendah kurang terekspos atau bersosialisasi dengan individu dari agama lain. Gedung SD dan SMP biasanya berlokasi sangat dekat dengan tempat tinggal yang lingkungannya cukup homogen, baik dari segi agama maupun budaya. Sebaliknya, pendidikan tinggi biasanya tersedia di luar daerah tempat tinggal, seperti luar kabupaten ataupun luar provinsi, sehingga seseorang akan lebih terekspos pada agama dan budaya lain. Eksposur tersebut dapat mengarah pada keterbukaan atau toleransi terhadap agama yang berbeda.

Temuan bahwa masyarakat di wilayah studi cukup toleran diperkuat oleh pernyataan informan bahwa kondisi di wilayah studi relatif aman. Tidak ada konflik terbuka yang muncul antarkelompok ataupun antarsuku. Dengan kata lain, sebagai masyarakat yang heterogen, masyarakat di wilayah studi bisa saling menerima serta menghargai perbedaan agama, suku, dan daerah asal.

⁴²Uji t-statistik dilakukan untuk wilayah perlakuan dan pemanding. Hasilnya adalah bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antarkelompok pendidikan KRT pada indikator toleransi antaragama (signifikan pada 1%) dan toleransi terhadap pendatang (signifikan pada 10%). Namun, perbedaan pada indikator toleransi antarsuku tidak signifikan. Hasil uji t-statistik di wilayah pemanding menunjukkan perbedaan yang tidak signifikan antarkelompok pendidikan pada ketiga indikator toleransi.

Desa A3 adalah wilayah yang dinilai paling aman. Di Desa A3, 99% belum ada konflik yang terkait dengan suku maupun antarkelompok. (Wiraswasta, perempuan, Kecamatan A, KSB, 21 November 2022)

Di wilayah Kecamatan C tidak pernah ada konflik antaragama, suku, atau lainnya. Yang ada paling cuma kritikan terhadap pemerintah dan itu hal yang wajar. Konflik biasanya juga antarpribadi-pribadi. (Agen Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong dan penjual daging, perempuan, Kecamatan C, KSB, 22 November 2022)

Fenomena menarik terjadi pada indikator toleransi terhadap pendatang dari luar kabupaten khususnya di wilayah perlakuan. Terdapat perbedaan tingkat toleransi terhadap pendatang yang cukup besar antara rumah tangga berpendidikan tinggi dan berpendidikan rendah⁴³. Hal ini sangat mungkin disebabkan oleh kecemburuan dan ketakutan masyarakat berpendidikan rendah bahwa pendatang akan mengambil kesempatan kerja khususnya di sektor pertambangan. Wilayah perlakuan memang menjadi tujuan bagi banyak pendatang untuk mencari mata pencaharian dan sekaligus tempat tinggal jangka panjang karena besarnya sektor pertambangan di wilayah ini. Tidak mengherankan apabila banyak orang dari luar kabupaten datang untuk mencari kerja di sana. Namun, tidak semua pendatang memenuhi kualifikasi untuk bekerja di sektor pertambangan ataupun sektor lain yang tersedia. Ketika akhirnya mereka menetap menjadi penduduk dan tidak mendapatkan kesempatan kerja, mereka khawatir terhadap pendatang dari daerah lain yang kualifikasinya mungkin lebih tinggi dan kesempatan kerja yang ada akan diambil oleh para pendatang tersebut. Hal ini tidak terjadi di wilayah perbandingan yang menjelaskan lebih tingginya angka toleransi terhadap pendatang di wilayah ini daripada di wilayah perlakuan. Banyaknya pendatang dari daerah lain (selain suku Samawa) yang menetap dalam jangka panjang di wilayah perlakuan juga menjelaskan terbentuknya masyarakat yang heterogen dan angka toleransi yang sangat tinggi.

Ketegangan Sosial dalam Masyarakat

Isu mengenai kerentanan sosial yang disampaikan sejumlah informan berkaitan dengan ketegangan yang terjadi dalam masyarakat. Ketegangan sosial memengaruhi relasi sosial antara individu, masyarakat, dan perusahaan tambang. Meskipun demikian, ketegangan sosial yang terjadi tidak sampai berujung pada konflik terbuka yang menimbulkan kekerasan.

a) Ketegangan dengan Perusahaan

Sejumlah informan menyatakan cukup mengetahui ketegangan yang terjadi antara masyarakat dan perusahaan tambang. Isu yang sering disebutkan berkaitan dengan masalah pembangunan smelter. Ada kesalahpahaman mengenai batas wilayah yang digunakan untuk pembangunan dan keinginan masyarakat yang ingin dilibatkan dalam pekerjaan pembangunan smelter. Informan menyebutkan bahwa kekesalan dan protes masyarakat terkait perusahaan biasanya disampaikan melalui pihak pemerintah desa.

⁴³Dalam laporan ini, (i) sebuah rumah tangga disebut berpendidikan tinggi jika KRT-nya berpendidikan minimal SMA ke atas dan (ii) sebuah rumah tangga disebut berpendidikan rendah jika KRT-nya berpendidikan SMP ke bawah.

Dulu pernah ada yang memblokir jalan, karena kasus smelter. Mereka tidak menerima karena mereka tidak dilibatkan dalam pekerjaan smelter. Mereka masyarakat juga ingin bekerja di sana. Mereka juga meminta tidak boleh ditutup akses ke tanah mereka di sekitar masyarakat. Ada kesalahan pematokan jalan. Di sana ada kesalahpahaman. (Staf kantor desa, perempuan, Kecamatan C, KSB, 23 November 2022)

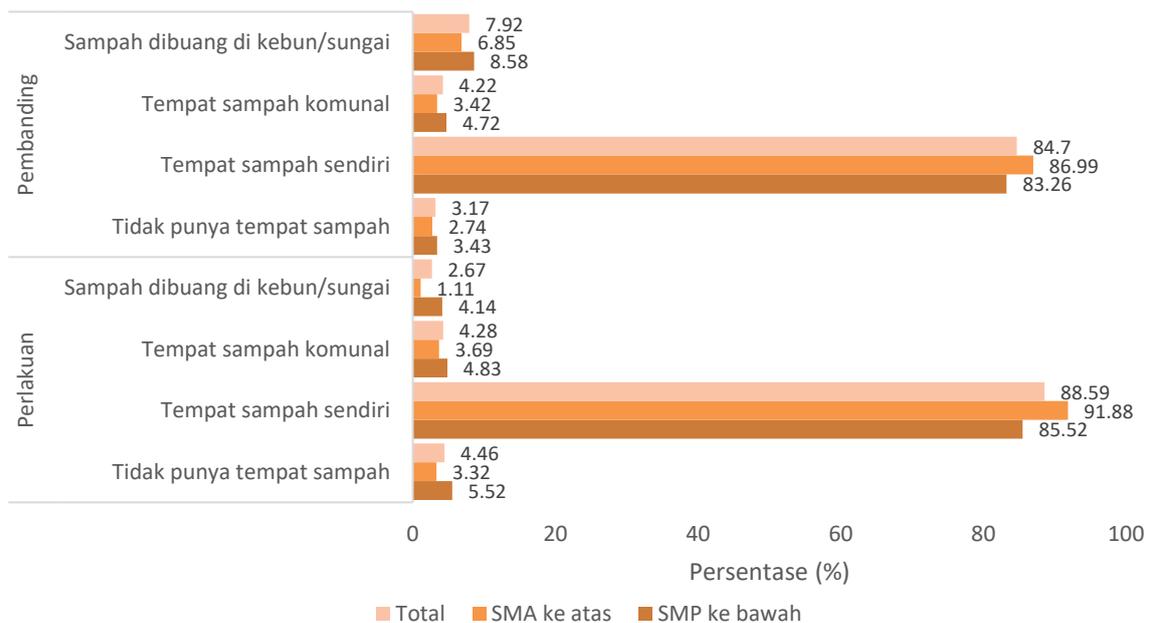
b) Ketegangan yang Disebabkan Faktor Politis (Pemilihan Kepala Desa)

Ketegangan antarpendukung calon kepala desa juga disebutkan oleh informan di Kecamatan A dan Kecamatan C. Ketegangan ini merupakan salah satu bentuk kerentanan sosial karena keberadaannya berdampak negatif pada relasi dalam keluarga dan lingkungan tetangga. Informan menyebutkan bahwa terganggunya relasi antarwarga bisa terjadi hingga berbulan-bulan pascapemilihan kepala desa. Salah satu bentuk terganggunya relasi tersebut adalah masyarakat yang tidak saling menyapa dengan anggota keluarga lain maupun tetangga yang biasanya akrab. Meskipun tidak sampai terjadi kekerasan fisik, ketegangan dalam kehidupan masyarakat perlu menjadi perhatian karena, jika tidak diselesaikan, dapat memicu konflik terbuka dalam lingkup yang lebih besar.

3.7.5 Pemeliharaan Lingkungan

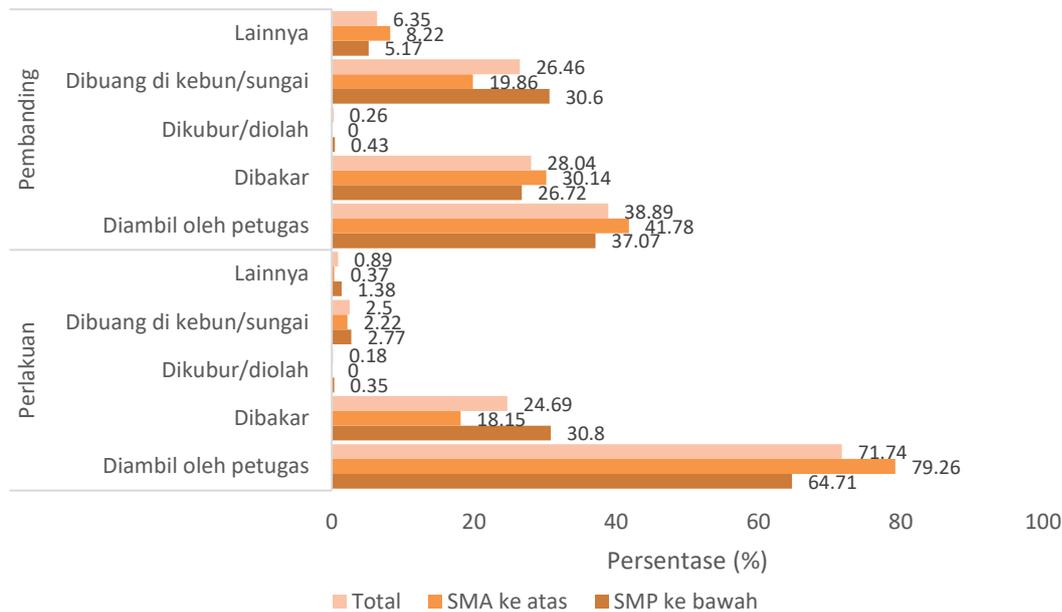
Dalam aspek pemeliharaan lingkungan, sebanyak 92% rumah tangga di wilayah perlakuan dan 86% rumah tangga di wilayah pembanding merasa bahwa lingkungannya sudah terbebas dari sampah. Mayoritas rumah tangga sudah memiliki tempat sampah sendiri meskipun masih terdapat segelintir rumah tangga yang tidak memiliki tempat sampah atau masih melakukan praktik membuang sampah di kebun atau sungai (Gambar 68). Secara umum, praktik pemeliharaan lingkungan di tingkat rumah tangga sudah cukup baik terutama di wilayah perlakuan.

Gambar 68. Kepemilikan Tempat Sampah Rumah Tangga



Sumber: survei SMERU, 2022

Gambar 69. Praktik Pengelolaan Sampah oleh Rumah Tangga menurut Tingkat Pendidikan KRT



Sumber: survei SMERU, 2022

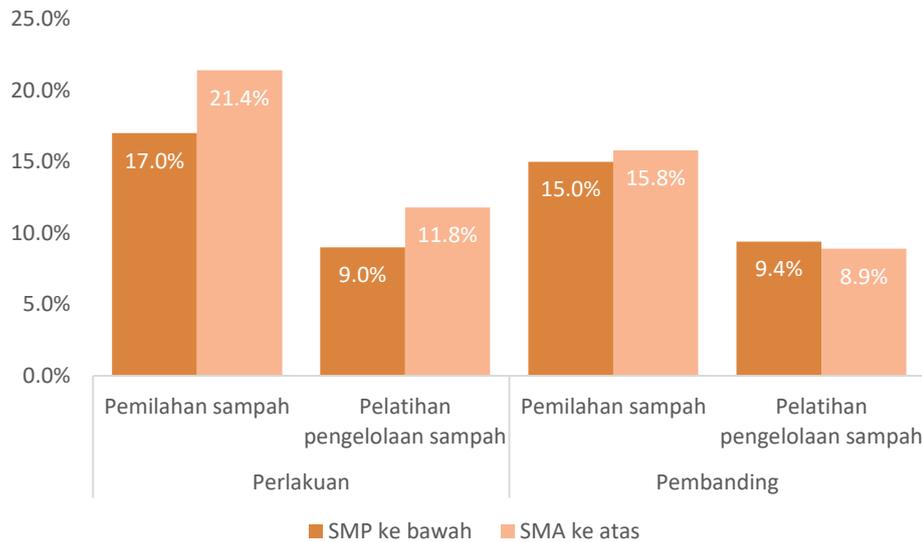
Dalam hal pengelolaan sampah, 71% rumah tangga di wilayah perlakuan memiliki fasilitas pengangkutan sampah di lingkungannya, sementara hanya 40% rumah tangga di wilayah pembanding yang memiliki fasilitas pengangkutan sampah (Gambar 69). Masih ada cukup banyak rumah tangga di wilayah pembanding yang melakukan praktik membuang sampah di kebun atau sungai dan membakar sampah. Praktik tersebut cukup berbahaya tidak hanya bagi lingkungan, tetapi juga bagi rumah tangga itu sendiri. Praktik pengelolaan sampah yang baik biasanya dilakukan oleh rumah tangga yang KRT-nya berpendidikan tinggi. Dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan faktor kunci dalam pemeliharaan lingkungan yang berkelanjutan.

Selain kepemilikan tempat sampah dan mekanisme pembuangan sampah, pengelolaan dan pendaurulangan sampah (*reduce, reuse, and recycle/3R*) merupakan upaya yang baik untuk mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan. Upaya 3R dapat dimulai dari hal paling sederhana, yaitu melakukan pemilahan sampah organik dan nonorganik. Di wilayah studi, masih sangat sedikit rumah tangga melakukan proses pemilahan sampah dan masih sangat sedikit pula rumah tangga yang pernah mendapatkan penyuluhan/kampanye/pelatihan mengenai praktik pemilahan/daur ulang sampah (Gambar 70). Dilihat dari tingkat pendidikan, ada lebih banyak rumah tangga berpendidikan tinggi yang melakukan pemilahan sampah daripada rumah tangga berpendidikan rendah. Melalui uji statistik di wilayah perlakuan⁴⁴, ada perbedaan yang signifikan antara rumah tangga yang pernah mendapatkan pelatihan pengelolaan sampah dan rumah tangga yang tidak pernah mendapatkan pelatihan pemilahan sampah. Hal ini berarti bahwa kegiatan pelatihan cukup efektif dalam menyadarkan masyarakat akan pentingnya pemeliharaan lingkungan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pelatihan

⁴⁴Signifikan pada 5%. Hasil uji t-statistik di wilayah pembanding tidak menunjukkan hasil signifikan.

mengenai pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga perlu diperluas dan diperbanyak. Untuk jangka panjang, diperlukan pelatihan pengelolaan sampah di tingkat pendidikan dasar (PAUD dan SD) secara lebih masif.

Gambar 70. Persentase Penduduk yang Melakukan Pemilahan Sampah dan Mendapatkan Pelatihan Pengelolaan Sampah



Sumber: survei SMERU, 2022

Tidak ada pengelolaan sampah berbasis komunitas di desa. Pada 2012, pernah ada kelompok/komunitas yang fokus pada pengelolaan sampah untuk kompos. Namun, setelah itu tidak pernah ada upaya pengelolaan sampah berbasis komunitas lagi hingga sekarang. Tidak adanya pengurus aktif menyebabkan aktivitas pengelolaan sampah berbasis komunal terhenti. Pengelolaan sampah untuk kompos saat ini bersifat individual, tergantung masing-masing rumah tangga. (Anggota BPD, perempuan, Kecamatan A, KSB, 21 November 2022)

Pernah mendengar tentang pelatihan pengolahan sampah, *tapi* tidak pernah ikut karena belum ada yang mengajak. Dulu pernah dengar informasi saja sekitar dua tahun lalu, *tapi* tidak mengetahui apakah sudah ada pelatihannya atau tidak. Untuk pembuangan sampah di desa, saya merasa tidak efektif sehingga membakar sampah di pekarangan rumah. Truk sampah yang dibayar desa hanya datang sekali seminggu. Beberapa minggu sudah tidak jalan sehingga sampah warga menumpuk. (Agen Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong dan penjual daging, perempuan, Kecamatan C, KSB, 22 November 2022)

IV. Penutup

4.1 Rekomendasi

Analisis sosioekonomi masyarakat berdasarkan survei rumah tangga, wawancara, serta data sekunder telah menghasilkan beberapa temuan terkait kondisi komunitas lingkaran tambang di KSB pada beberapa aspek kehidupan. Beberapa indikator menunjukkan capaian yang baik, tetapi masih terdapat isu yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas lingkaran tambang di KSB.

Rekomendasi dalam laporan ini disusun dengan target peningkatan kesejahteraan komunitas lingkaran tambang yang mencakup tujuan pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi. Dengan melihat hasil analisis sosioekonomi masyarakat serta mempertimbangkan tanggung jawab sosial Amman, disusun sejumlah strategi pada aspek kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, pariwisata, dan UMK untuk mencapai target dan tujuan tersebut (Gambar 71). Setiap strategi diturunkan menjadi sejumlah langkah praktis disertai perincian terkait pemangku kepentingan yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan langkah-langkah tersebut (Tabel 15).

Gambar 71. Struktur Rekomendasi



Tabel 15. Langkah Praktis dan Sasaran Rekomendasi

No	Langkah Praktis	Sasaran
A Penguatan sistem layanan kesehatan		
1	Mengintensifkan promosi kesehatan untuk penanganan beberapa isu spesifik (kesehatan reproduksi, KIA, <i>stunting</i> , serta kesadaran akan bahaya merkuri) agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi kesehatan meningkat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Institusi kesehatan (tenaga dan fasilitas kesehatan) ▪ Ibu dan anak ▪ Penduduk usia remaja ▪ Penduduk lingkaran tambang
2	Meningkatkan kualitas dan keragaman jenis layanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama	Institusi kesehatan (tenaga dan fasilitas kesehatan)
B Penguatan sistem layanan pendidikan formal		
1	Menyediakan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran berdasarkan kebutuhan sekolah	Institusi pendidikan (sekolah)
2	Merancang mekanisme penyediaan guru produktif yang berasal dari kalangan praktisi dalam upaya mentransfer pengetahuan kepada siswa SMK	Sekolah vokasi (SMK)
C Peningkatan kualitas SDM		
1	Meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat	Penduduk usia produktif
2	Mendukung keterlibatan perempuan untuk berkumpul dan berorganisasi sebagai sarana untuk meningkatkan kapasitas diri	Perempuan usia produktif
D Pengembangan potensi industri pariwisata		
1	Meningkatkan kapasitas calon pekerja dan pekerja yang sudah ada di industri pariwisata melalui pelatihan di bidang keramahtamahan (<i>hospitality</i>) yang tersertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Calon pekerja industri pariwisata ▪ Pekerja industri pariwisata
2	Menguatkan kapasitas pokdarwis sebagai institusi pengelola pariwisata tingkat desa di desa wisata	Penduduk desa wisata
3	Meningkatkan citra pariwisata KSB serta melakukan promosi objek dan atraksi wisata yang menjadi ciri khas KSB	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Calon pekerja industri pariwisata ▪ Pekerja industri pariwisata
4	Menguatkan kapasitas asosiasi pelaku usaha di sektor pariwisata	Asosiasi pelaku usaha di sektor pariwisata
5	Mendorong pelaku usaha wisata untuk melengkapi berbagai sertifikasi dalam rangka menunjang usahanya	Pelaku usaha di sektor pariwisata

No	Langkah Praktis	Sasaran
E Penyediaan dukungan untuk pengembangan UMK		
1	Meningkatkan literasi dan keterampilan digital para pelaku UMK melalui pelatihan dan pendampingan	Pelaku UMK
2	Memfasilitasi saluran yang menghubungkan pelaku UMK dengan konsumen potensial	Pelaku UMK

4.2 Masukan bagi Studi Selanjutnya

4.2.1 Masukan Teknis: Waktu Pelaksanaan Studi

Studi selanjutnya perlu memperhatikan waktu pelaksanaan agar tidak mengganggu proses pengumpulan data di lapangan. Peneliti menyarankan agar studi selanjutnya dilakukan pada bulan selain November dan Desember. November merupakan bulan dirayakannya ulang tahun KSB sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan terkait akan sibuk selama perayaan hari besar tersebut. Selain itu, pelaksanaan studi pada Desember juga perlu dihindari karena banyaknya hari libur (termasuk libur akhir tahun) yang akan mempersulit proses pengumpulan data khususnya di tingkat pemerintah. Pelaksanakan studi pada bulan selain November dan Desember bersifat krusial karena pengumpulan data berkaitan erat dengan keberadaan informan/responden di lapangan. Perlu dipastikan juga agar pelaksanaan studi tidak bersamaan dengan penelitian/survei yang dilakukan lembaga lain, baik pemerintah maupun pihak swasta, agar responden/informan tidak jenuh dengan proses penggalan data yang melibatkan masyarakat secara langsung. Hal ini perlu diperhatikan untuk menjaga kualitas data yang didapatkan. Cara yang bisa dilakukan adalah berkonsultasi dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) terkait waktu pelaksanaan studi.

4.2.2 Masukan Substantif

Berikut adalah masukan substantif untuk pelaksanaan studi selanjutnya. Secara umum, masukan substantif mencakup isu-isu yang perlu didalami dan aspek-aspek yang perlu menjadi fokus studi (Tabel 16).

Tabel 16. Masukan Substantif

No	Isu	Fokus Studi
1	Pengembangan sektor pariwisata	Fokus studi pengembangan sektor pariwisata perlu mencakup analisis suplai dan permintaan (<i>demand</i>) di sektor pariwisata di KSB. Analisis pada kedua aspek sangatlah penting untuk mendapatkan gambaran situasi yang holistik di sektor pariwisata sehingga penyusunan program pengembangan sektor pariwisata di KSB bisa dilakukan dengan tepat dan integratif.
2	Pengembangan UMK	Diperlukan studi komprehensif mengenai pengembangan UMK sebagai bekal bagi pemangku kepentingan terkait dalam

No	Isu	Fokus Studi
		menentukan arah kebijakan/program yang tepat untuk pengembangan UMK. Fokus studi terkait pengembangan UMK harus bersifat holistik dengan memperhatikan analisis pada sejumlah aspek, seperti kesiapan SDM, akses pembiayaan, pemanfaatan teknologi, dan infrastruktur penunjang lainnya, yang dapat menaikkan kelas UMK, termasuk industri berskala rumahan.
3	Pendidikan	<p>Perlu dilakukan studi tentang kualitas pembelajaran yang menganalisis beberapa aspek kunci dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses pendidikan anak, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kepemimpinan, manajemen, dan pengelolaan sekolah (asesmen terhadap kepala sekolah), 2. peningkatan kapasitas guru dalam pengajaran dan penilaian (asesmen terhadap guru), 3. asesmen pembelajaran siswa (asesmen terhadap siswa), dan 4. keterlibatan orang tua dalam pembelajaran (asesmen terhadap orang tua).
4	Kesehatan	<p>Studi pemetaan status gizi balita di tingkat desa dan kecamatan dapat dilakukan dengan menggunakan metode estimasi wilayah kecil (<i>small area estimation/SAE</i>) ataupun memanfaatkan data, seperti data pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat secara elektronik (e-PPBGM), dari Dinas Kesehatan setempat. Metode SAE dan data e-PPBGM akan menghasilkan angka estimasi untuk beberapa indikator gizi, seperti <i>stunting</i>, <i>wasting</i>, atau gizi buruk, di tingkat desa atau kecamatan yang dapat dijadikan angka acuan bagi pengembangan atau evaluasi program yang lebih akurat.</p>
5	Pembangunan daerah	<p>Studi asesmen indikator pembangunan daerah di Provinsi NTB dapat dilakukan dengan KSB sebagai fokus utamanya. Tujuan studi tersebut adalah menganalisis kondisi makroekonomi di tingkat daerah serta kondisi sosioekonomi rumah tangga atau penduduk serta membandingkan capaian pembangunan antardaerah di NTB. Analisis komparasi ini akan menghasilkan sebuah gambaran makro kondisi sosioekonomi tiap-tiap daerah di NTB. Hasil studi ini dapat menjadi asesmen di tingkat kabupaten untuk menentukan prioritas pembangunan tiap-tiap daerah secara makro.</p>
6	Terkait studi <i>endline</i>	<p>Jika nantinya Amman melakukan studi <i>endline</i> terkait kondisi sosioekonomi masyarakat di sekitar tambang, peneliti menyarankan agar studi tersebut menggunakan responden yang sama dengan studi <i>baseline</i>. Peneliti juga menyarankan penggunaan instrumen survei yang sama/mirip dengan studi <i>baseline</i>. Hal ini dilakukan agar kondisi sosioekonomi masyarakat bisa dibandingkan dan dampak berbagai program pengembangan masyarakat bisa terlihat pada studi <i>endline</i>.</p>

Daftar Acuan

- Adanza, Estela G. (1962) *Principles and Applications*. United Kingdom: Verlag Nicht Ermittlbar.
- Bachtiar, Permata, Niken Kusumawardhani, and Veto Indrio (2022) 'Supporting Digital Transformation of Micro and Small Enterprises in the Special Region of Yogyakarta during COVID-19 Pandemic.' Report. Jakarta: The SMERU Research Institute <<https://smeru.or.id/en/publication/supporting-digital-transformation-micro-small-enterprises-special-region-yogyakarta>> [26 January 2023].
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (2017) *Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Mendeklarasikan Cakupan Peserta Pertama di Provinsi Nusa Tenggara Barat* <<https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/post/read/2017/431/Pemerintah-Kabupaten-Sumbawa-Barat-Mendeklarasikan-Cakupan-Peserta-Pertama-di-Provinsi-Nusa-Tenggara-Barat/berita-umum>> [25 Desember 2022].
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2020) *Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah di Indonesia* <www.bappenas.go.id> [23 Desember 2022].
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa (2022) *Kabupaten Sumbawa dalam Angka 2022* <<https://sumbawakab.bps.go.id/publication/2022/02/25/e13ea9e26c3b32e724ec2b85/kabupaten-sumbawa-dalam-angka-2022.html>> [21 Desember 2022].
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat (2022) *Kabupaten Sumbawa Barat dalam Angka 2022* <<https://sumbawabaratkab.bps.go.id/publication/2022/02/25/bc49739e710b3e7b5394cd7d/kabupaten-sumbawa-barat-dalam-angka-2022.html>> [21 Desember 2022].
- Bidikankameranews.com (2021) 'Kasus Stunting di KSB Tahun 2021 Mengalami Penurunan.' *Bidikankameranews.com* 19 Oktober <<https://bidikankameranews.com/2021/10/19/kasus-stunting-di-ksb-tahun-2021-mengalami-penurunan/>> [10 Januari 2023].
- de Mel, Suresh, David McKenzie, dan Christopher Woodruff (2008) 'Who Are the Microenterprise Owners? Evidence from Sri Lanka on Tokman v. de Soto.' Policy Research Working Paper. Washington, DC.: World Bank <<https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/6696>> [20 Desember 2022].
- Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat (n.d.) *Hasil Analisa Data Pengukuran Stunting di Kabupaten Sumbawa Barat* <<https://dikes.sumbawabaratkab.go.id/hasil-analisa-data-pengukuran-stunting-di-kabupaten-sumbawa-barat/>> [26 Desember 2022].

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat (2020) *Jumlah Sekolah (SMA dan SMK) menurut Akreditasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Ajaran 2019–2020* <<https://data.ntbprov.go.id/dataset/jumlah-sekolah-sma-dan-smk-menurut-akreditasi-provinsi-nusa-tenggara-barat-tahun-ajaran-2019>> [17 Januari 2023].
- Djankov, Simeon, Edward Miguel, Yingyi Qian, Gérard Roland, dan Ekaterina Zhuravskaya (2005) 'Who Are Russia's Entrepreneurs?' *Journal of the European Economic Association* 3 (2–3): 587–597.
- Hastuti, Rika Kumala Dewi, Rezanti Putri Pramana, dan Hariyanti Sadaly (2020) 'Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas.' Kertas Kerja. Jakarta: The SMERU Research Institute <https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/wp_disabilitas_in_0.pdf> [26 Desember 2022].
- Kementerian Kesehatan (2019) *Kamus* <<http://www.depkes.go.id/folder/view/full-content/structure-kamus.html>> [25 Juli 2019].
- . (2018) 'Situasi Balita Pendek (*Stunting*) di Indonesia.' *Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan.
- . (2016) *PHBS [Clean and Healthy Lifestyle]* <<https://promkes.kemkes.go.id/phbs>> [26 Desember 2022].
- Kniivila, Matleena (2007) 'Industrial Development and Economic Growth: Implications for Poverty Reduction and Income Inequality.' Dalam *Industrial Development for the 21st Century: Sustainable Development Perspectives*. New York: United Nations.
- Mankiw, N. Gregory (2016) *Principle of Economics*. 8th ed. Stamford: Cengage Learning.
- Mental Health Foundation (n.d.) *Smoking and Mental Health* <<https://www.mentalhealth.org.uk/explore-mental-health/a-z-topics/smoking-and-mental-health>> [26 Desember 2022].
- Migunani (2017) 'Women's Collective Action for Empowerment in Indonesia: A Study of Collective Action Initiated by Partners of the MAMPU Program.' Yogyakarta: Migunani dan MAMPU.
- Narayan, Deepa (2002) *Empowerment and Poverty Reduction: A Sourcebook*. Washington DC: World Bank <<https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/15239>> [25 Desember 2022].
- Otoritas Jasa Keuangan (2021) 'Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021–2025.' Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan <<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Keuangan-Indonesia-2021-2025/Strategi-Nasional-Literasi-Keuangan-Indonesia-2021-2025.pdf>> [17 Januari 2023].

- Pratama, Yoga (2015) *Apa itu Amdal, UKL-UPL, dan SPPL* [What is Environmental Impact Analysis, Environment Management Effort-Environment Monitoring Effort, and Environment Management Statement Letter]. Jakarta: Indonesia Environment & Energy Center <<https://environment-indonesia.com/apa-itu-amdal-ukl-upl-dan-sppl/>> [1 December 2022].
- Rahmah, A. N. and Widodo, S. (2019) 'The Role of Manufacturing Industry Sector in Indonesia's Economy Using the Input-Output Approach Year 2010–2016.' *Economie*, 1.
- Ruiz, Maria Esperanza (2010) 'Risks of Self-Medication Practices.' *Current Drug Safety* 5 (4): 315–323. DOI:10.2174/157488610792245966.
- Sen, Amartya (1983) 'Development: Which Way Now?' *The Economic Journal* 93 (372): 745. DOI:10.2307/2232744.
- SMERU, Digital Pathways, dan ESCAP (2022) 'Digital Skills Landscape in Indonesia.' Diagnostic Report. Jakarta: The SMERU Research Institute <https://pathwayscommission.bsg.ox.ac.uk/sites/default/files/2022-03/FINAL_Diagnostic%20Report_Accessible.pdf> [23 Desember 2022].
- Victoria, Linda Adair, Caroline Fall, Pedro C Hallal, Reynaldo Martorell, Linda Richter, and Harshpal Singh Sachdev (2008) 'Maternal and Child Undernutrition: Consequences for Adult Health and Human Capital.' *The Lancet* 371 (9609): 340–357. DOI: 10.1016/S0140-6736(07)61692-4.
- World Bank (2016) 'World Development Report 2016: Digital Dividends.' Washington DC: World Bank <<https://documents1.worldbank.org/curated/en/896971468194972881/pdf/102725-PUB-Replacement-PUBLIC.pdf>> [26 January 2023].
- World Health Organization (2006) 'WHO Child Growth Standards' <https://www.who.int/childgrowth/standards/Technical_report.pdf> [1 Desember 2018].
- Zid, Muhammad, Asep Rudi Casmana, dan Sony Nugratama Hijrawadi (2020) The 'Development of International Education towards Migration Abroad by Indonesian Women.' *Universal Journal of Educational Research* 8 (5): 1953–1963. DOI:10.13189/ujer.2020.080532.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat No. 11 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Didaftarkan Pemerintah Daerah sebagai Peserta Jaminan Kesehatan.

Peraturan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat No. 15 Tahun 2022 tentang Penggunaan Sumber Daya Lokal.

Peraturan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat No. 61 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pariri Cerdas bagi Peserta Didik Tidak Mampu Jenjang Pendidikan Dasar.

Peraturan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat No. 45 Tahun 2020 tentang Wajib Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Prasekolah Dasar.

Peraturan Bupati Kabupaten Sumbawa No. 96 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Prasekolah Dasar di Kabupaten Sumbawa.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat No. 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat No. 8 Tahun 2020 tentang Desa Wisata di Kabupaten Sumbawa Barat.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat No. 12 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sumbawa Barat 2020–2025.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat No. 23 Tahun 2008 tentang Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Kabupaten Sumbawa Barat.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat.

Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Agustus 2022.

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia B/185/M.SM.02.03/2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 14 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Lampiran

Lampiran 1

Daftar Indikator, Definisi, dan Nilainya

No	Aspek	Indikator	Definisi	Pembanding	Perlakuan
1	Infrastruktur dasar	Persentase rumah tangga yang mengakses air minum layak	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak	84,92	84,42
2	Infrastruktur dasar	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	75,71	77,14
3	Infrastruktur ekonomi	Persentase penduduk yang mengakses internet	Persentase penduduk berusia ≥ 15 tahun yang mengakses internet selama 3 bulan terakhir	57,76	68,29
4	Infrastruktur ekonomi	Kualitas sinyal internet baik dan sangat baik	Persentase penduduk berusia ≥ 15 tahun yang menggunakan internet dan merasa memiliki kualitas sinyal baik dan sangat baik	87,75	90,68
5	Infrastruktur ekonomi	Jenis permukaan jalan sekitar rumah terbuat dari aspal/beton	Persentase rumah tangga yang memiliki jenis permukaan jalan yang terbuat dari aspal/beton di sekitar rumahnya	34,42	53,60
6	Infrastruktur ekonomi	Kondisi jalan di sekitar rumah tidak ada yang rusak/rusak ringan	Persentase rumah tangga dengan kualitas jalan rusak/rusak ringan di sekitar rumahnya	85,18	93,8
7	Infrastruktur ekonomi	Persentase penduduk dengan akses terhadap listrik PLN	Persentase rumah tangga dengan akses terhadap listrik PLN	98,24	96,65
8	Infrastruktur ekonomi	Kualitas listrik	Persentase rumah tangga yang mengalami pemadaman listrik 0–5 kali dalam seminggu	95,98	89,45
9	Infrastruktur ekonomi	Persentase penduduk yang memanfaatkan internet dalam pekerjaannya	Persentase pekerja berusia ≥ 15 tahun yang menggunakan internet dalam pekerjaan utamanya	19,18	39,73

No	Aspek	Indikator	Definisi	Pembandingan	Perlakuan
10	Infrastruktur ekonomi	Persentase penduduk yang memiliki rekening tabungan di lembaga keuangan	Persentase penduduk berusia ≥ 15 tahun yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan	41,55	52,07
11	Infrastruktur ekonomi	Persentase penduduk yang memiliki/menjalankan usaha yang mengakses pinjaman usaha dari lembaga keuangan	Persentase pengusaha berusia ≥ 15 tahun yang pernah mengakses pinjaman (kredit usaha)	62,17	52,16
12	Infrastruktur ekonomi	Persentase penduduk yang memanfaatkan internet untuk transaksi keuangan	Persentase penduduk berusia ≥ 15 tahun yang mengakses internet selama 3 bulan terakhir untuk kegiatan perbankan (transaksi keuangan)	15,87	30,2
13	Infrastruktur ekonomi	Persentase penduduk yang menjadi anggota koperasi/lembaga keuangan desa	Persentase penduduk berusia ≥ 15 tahun yang tergabung dalam koperasi/lembaga keuangan desa	2,45	2,36
14	Infrastruktur ekonomi	Persentase pengusaha yang tergabung dalam asosiasi/perkumpulan usaha baik daring maupun luring	Persentase pengusaha berusia ≥ 15 tahun yang tergabung dalam asosiasi usaha	11,74	12,29
15	Kerentanan sosial dan lingkungan	Proporsi perempuan usia 20–24 tahun yang berstatus kawin/hidup bersama sebelum usia 18 tahun	Persentase perempuan berusia 20–24 tahun yang pernah kawin atau hidup bersama sebelum berusia 18 tahun terhadap total perempuan usia 20–24 tahun	10,00	10,42
16	Kerentanan sosial dan lingkungan	Median usia kawin pertama perempuan usia 25–49 tahun	Median usia kawin pertama perempuan berusia 25–49 tahun (dalam tahun)	22	21

No	Aspek	Indikator	Definisi	Pembandingan	Perlakuan
17	Kerentanan sosial dan lingkungan	Proporsi perempuan usia reproduksi 15–49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan	Persentase perempuan pernah kawin berusia 15–49 tahun yang memiliki suara dalam pengambilan keputusan, yaitu mereka yang (i) memiliki suara dalam keputusan penggunaan alat kontrasepsi, (ii) memiliki suara dalam keputusan layanan kesehatan, dan (iii) mampu mengatakan tidak kepada pasangan saat tidak ingin berhubungan seksual	52,14	45,67
18	Kerentanan sosial dan lingkungan	Partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan	Persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang ikut berpartisipasi dalam pertemuan/rapat warga terhadap seluruh penduduk berusia 10 tahun ke atas	0,35	0,40
19	Kerentanan sosial dan lingkungan	Kemampuan mengeluarkan pendapat dalam kegiatan kemasyarakatan	Persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang mengeluarkan pendapat dalam pertemuan warga terhadap seluruh penduduk yang ikut pertemuan tersebut	0,58	0,58
20	Kerentanan sosial dan lingkungan	Keikutsertaan dalam organisasi di luar sekolah/kerja	Persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang ikut serta dalam sebuah organisasi/komunitas di luar tempat kerja/sekolah	0,14	0,19
21a	Kerentanan sosial dan lingkungan	Toleransi antaragama	Persentase rumah tangga yang setuju atau sangat setuju jika ada kegiatan yang dilakukan oleh penduduk dari agama yang berbeda dengan dirinya atau salah satu anggota rumah tangganya berteman dengan penduduk dari agama yang berbeda	83,92	87,27
21b	Kerentanan sosial dan lingkungan	Toleransi antarsuku	Persentase rumah tangga yang setuju atau sangat setuju jika ada kegiatan yang dilakukan oleh penduduk dari suku yang berbeda dengan dirinya atau salah satu anggota rumah tangganya berteman dengan penduduk dari suku yang berbeda	91,96	92,96

No	Aspek	Indikator	Definisi	Pembanding	Perlakuan
21c	Kerentanan sosial dan lingkungan	Toleransi terhadap pendatang	Persentase rumah tangga yang setuju atau sangat setuju jika ada penduduk dari luar kabupaten tempat tinggal mereka yang menetap di lingkungan tempat mereka tinggal	94,47	91,29
22	Kerentanan sosial dan lingkungan	Persentase rumah tangga yang membuang sampah pada tempatnya	Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas pembuangan sampah (sendiri/komunal) dan sampahnya diambil oleh petugas atau diolah/dikubur (daur ulang) sendiri dalam sebulan terakhir	40,40	70,76
23	Kerentanan sosial dan lingkungan	Persentase rumah tangga yang sudah melakukan pemilahan sampah organik dan nonorganik	Persentase rumah tangga yang melakukan pemilahan sampah organik dan nonorganik dalam sebulan terakhir	0,15	0,19
24	Kerentanan sosial dan lingkungan	Persentase penduduk yang berpartisipasi dalam kegiatan seni/budaya	Persentase penduduk yang pernah terlibat menjadi pelaku ataupun panitia dalam kegiatan seni, seperti film, musik, seni rupa, sastra, seni tari, seni teater/pewayangan, serta seni lainnya seperti kuda lumping, reog, barongsai, dsb.	5,98	7,71
25	Kerentanan sosial dan lingkungan	Persentase penduduk yang pernah mengikuti pelatihan tentang pemilahan/pengolahan sampah	Persentase rumah tangga yang anggota rumah tangganya pernah mendapatkan pelatihan pemilahan sampah atau pengelolaan sampah	0,09	0,10
26	Kerentanan sosial dan lingkungan	Persentase penduduk yang berpartisipasi dalam kegiatan olah raga	Persentase masyarakat yang melakukan olah raga dalam seminggu terakhir	52,41	55,02
27	Kesehatan	Persentase masyarakat mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	Persentase rumah tangga yang menerapkan PHBS. PHBS yang dimaksud di sini adalah PHBS yang sesuai dengan anjuran Kementerian Kesehatan, yaitu (i) persalinan ditolong tenaga Kesehatan, (ii) pemberian ASI eksklusif, (iii) mengunjungi posyandu, (iv) akses terhadap air minum layak, (v) akses terhadap sanitasi layak, (vi) memberantas	91,30	88,75

No	Aspek	Indikator	Definisi	Pembandingan	Perlakuan
			jentik nyamuk, (vii) konsumsi buah sayur setiap hari, (viii) melakukan aktivitas fisik setiap hari, dan (ix) tidak merokok (Kementerian Kesehatan, 2016).		
28	Kesehatan	Persentase penduduk yang rawat jalan dan berkunjung ke fasilitas kesehatan dalam sebulan terakhir	Persentase penduduk yang sakit dan berobat ke fasilitas kesehatan (bukan dukun atau pengobatan tradisional) dalam 3 bulan terakhir	22,85	24,59
29	Kesehatan	Persentase penduduk yang rawat inap di fasilitas kesehatan dalam setahun terakhir	Persentase penduduk yang pernah menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan selama setahun terakhir	96,67	99,16
30a	Kesehatan	Jenis penyakit yang pernah dialami	Hasil diagnosis dari dokter/tenaga kesehatan dari sejumlah penduduk yang menjalani rawat jalan di fasilitas kesehatan		
30b	Kesehatan	Batuk pilek	Persentase penduduk yang pernah sakit batuk	66,27	54,45
30c	Kesehatan	TB paru	Persentase penduduk yang pernah sakit TB Paru	1,9	0,35
30d	Kesehatan	Pneumonia	Persentase penduduk yang pernah sakit pneumonia	1,27	0,7
30e	Kesehatan	Kusta	Persentase penduduk yang pernah sakit kusta	0,64	0
30f	Kesehatan	Tetanus	Persentase penduduk yang pernah sakit tetanus	0	0
30g	Kesehatan	Campak	Persentase penduduk yang pernah sakit campak	1,91	0,7
30h	Kesehatan	Diare	Persentase penduduk yang pernah sakit diare	2,55	2,1
30i	Kesehatan	DBD	Persentase penduduk yang pernah sakit DBD	0	1,05
30j	Kesehatan	Malaria	Persentase penduduk yang pernah sakit malaria	0	0,7
30k	Kesehatan	HIV AIDS	Persentase penduduk yang pernah sakit HIV/AIDS	0	0
30l	Kesehatan	IMS	Persentase penduduk yang pernah sakit infeksi menular seksual	0	0

No	Aspek	Indikator	Definisi	Pembandingan	Perlakuan
30m	Kesehatan	COVID	Persentase penduduk yang pernah sakit COVID	0	0,35
30n	Kesehatan	Lainnya	Persentase penduduk yang pernah sakit lainnya	39,63	28,37
31	Kesehatan	Persentase kepemilikan jaminan kesehatan	Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan dari kantor atau mandiri)	0,60	0,83
32	Kesehatan	Persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan	Persentase perempuan pernah kawin berusia 15–49 tahun yang pernah melahirkan dalam 2 tahun terakhir yang persalinannya ditolong oleh tenaga kesehatan profesional terlatih	97,87	98,91
33	Kesehatan	Persentase persalinan di fasilitas kesehatan	Persentase perempuan pernah kawin berusia 15–49 tahun yang pernah melahirkan dalam 2 tahun terakhir yang persalinannya dilakukan di fasilitas kesehatan (bukan rumah atau pengobatan tradisional)	93,62	95,65
34	Kesehatan	Persentase kunjungan posyandu	Persentase balita yang dibawa ke posyandu saat ada kegiatan posyandu terhadap total balita	97,53	95,56
35	Kesehatan	Persentase penduduk usia \leq 18 tahun yang merokok	Persentase penduduk berusia 18 tahun ke bawah yang merokok terhadap total penduduk berusia 18 tahun ke bawah	1,21	1,23
36	Kesehatan	Persentase penduduk usia \leq 15 tahun yang merokok	Persentase penduduk berusia 15 tahun ke bawah yang merokok terhadap total penduduk berusia 15 tahun ke bawah	0,40	0,23
37	Kesehatan	Persentase ASI eksklusif	Persentase bayi kurang dari dua tahun yang mendapatkan ASI eksklusif dalam 6 bulan pertama kelahirannya	28,13	52,86

No	Aspek	Indikator	Definisi	Pembanding	Perlakuan
38	Kesehatan	Persentase anak (usia 5–17 tahun) yang rawat jalan dan berkunjung ke fasilitas kesehatan dalam sebulan terakhir	Persentase anak (usia 5–17 tahun) yang sakit dan berobat ke fasilitas kesehatan (bukan dukun atau pengobatan tradisional) dalam 3 bulan terakhir	21,83	22,39
39	Kesehatan	Persentase anak (usia 5–17 tahun) yang rawat inap di fasilitas kesehatan dalam setahun terakhir	Persentase anak (usia 5–17 tahun) yang pernah menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan selama setahun terakhir	100,00	100,00
40	Kesehatan	Persentase penduduk dengan kesadaran tentang bahaya merkuri	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang benar-benar mengetahui (dapat menjelaskan) bahaya paparan merkuri (baik yang berasal dari kosmetik maupun akibat tambang ilegal)	13,25	24,81
41	Ketenagakerjaan	Tingkat pengangguran pemuda	Persentase penduduk berusia 16–30 tahun (pemuda) yang tidak bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan terhadap total pemuda yang masuk ke dalam angkatan kerja	13,91	14,61
42	Ketenagakerjaan	Tingkat pengangguran	Persentase angkatan kerja yang tidak bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan terhadap total angkatan kerja	5,05	6,32
43	Ketenagakerjaan	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persentase penduduk yang masuk ke dalam angkatan kerja, yakni yang sedang bekerja atau tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan, terhadap seluruh penduduk	44,26	45,74
44	Ketenagakerjaan	Tingkat setengah pengangguran	Persentase penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu terhadap seluruh penduduk bekerja	32,26	34,04
45	Ketenagakerjaan	Tenaga kerja berpendidikan SMA ke atas	Persentase penduduk yang bekerja dengan pendidikan minimal SMA atau lebih tinggi terhadap seluruh penduduk bekerja	42,71	49,68

No	Aspek	Indikator	Definisi	Pembanding	Perlakuan
46	Ketenagakerjaan	Pegawai/karyawan/buruh/pekerja yang memiliki kontrak kerja	Persentase tenaga kerja dengan status pegawai/karyawan/buruh atau pekerja lepas yang dibayar yang memiliki kontrak kerja	38,15	60,92
47	Ketenagakerjaan	Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	Persentase penduduk yang bekerja yang pernah mendapatkan pelatihan yang bersertifikat	19,68	32,12
48	Ketenagakerjaan	Rata-rata upah per bulan	Rata-rata upah yang diterima oleh tenaga kerja dengan status pegawai/karyawan/buruh selama sebulan (rupiah)	Rp1.868.355	Rp3.332.635
49	Ketenagakerjaan	Rata-rata penghasilan/omzet per bulan	Rata-rata penghasilan/omzet/pendapatan yang diterima oleh tenaga kerja dengan status berusaha sendiri atau berusaha dibantu buruh dibayar maupun tidak dibayar selama sebulan (rupiah)	Rp6.570.690	Rp11.188.800
50	Ketenagakerjaan	Rata-rata jam kerja seminggu	Rata-rata jumlah jam kerja penduduk yang bekerja selama satu minggu	44,08	42,05
51	Ketenagakerjaan	Kepemilikan jaminan perlindungan sosial tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang memiliki jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan, seperti BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Pensiun, atau Jaminan Hari Tua.	92,58	78,45
52	Pendidikan	APM tingkat PAUD	Proporsi penduduk berusia 5–6 tahun yang sedang bersekolah di TK/PAUD terhadap penduduk kelompok usia 5–6 tahun	93,75	96,59
53	Pendidikan	APM tingkat SD/ sederajat	Proporsi penduduk berusia 7–12 tahun yang sedang bersekolah di SD/ sederajat terhadap penduduk kelompok usia 7–12 tahun	100,00	99,17
54	Pendidikan	APM tingkat SMP/ sederajat	Proporsi penduduk berusia 13–15 tahun yang sedang bersekolah di SMP/ sederajat terhadap penduduk kelompok usia 13–15 tahun	93,10	99,21

No	Aspek	Indikator	Definisi	Pembandingan	Perlakuan
55	Pendidikan	APM tingkat SMA/ sederajat	Proporsi penduduk berusia 16–18 tahun yang sedang bersekolah di SMA/ sederajat terhadap penduduk kelompok usia 16–18 tahun	86,84	86,24
56	Pendidikan	APM tingkat pendidikan tinggi	Proporsi penduduk berusia 19–24 tahun yang sedang bersekolah di perguruan tinggi terhadap penduduk kelompok usia 19–24 tahun	8,05	3,51
57	Pendidikan	Rata-rata nilai kognitif penduduk usia 7–24 tahun	Rata-rata nilai tes kognitif penduduk berusia 7–24 tahun	60,88	56,67
58	Pendidikan	Rata-rata lama sekolah penduduk usia ≥ 24 tahun	Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia ≥ 24 tahun untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani	9,42	9,39
59	Pendidikan	Rasio APK perempuan terhadap laki-laki tingkat SMA/ sederajat	Merupakan nilai APK SMA/ sederajat perempuan dibagi dengan nilai APK SMA/ sederajat laki-laki	1,08	1,03
60	Pendidikan	Rasio APK perempuan terhadap laki-laki tingkat pendidikan tinggi	Merupakan nilai APK universitas perempuan dibagi dengan nilai APK universitas laki-laki	2,98	1,33
61	Pengembangan ekonomi sektor nontambang	Persentase penduduk yang bekerja di industri pariwisata	Persentase penduduk berusia ≥ 15 tahun yang bekerja di industri pariwisata	4,59	8,42
62	Pengembangan ekonomi sektor nontambang	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata dengan pendidikan minimal SMA	Persentase tenaga kerja industri pariwisata yang berusia ≥ 15 tahun dan memiliki tingkat pendidikan minimal SMA/ sederajat	42,31	48,72
63	Pengembangan ekonomi sektor nontambang	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang pernah mendapatkan pelatihan keterampilan	Persentase tenaga kerja industri pariwisata yang berusia ≥ 15 tahun dan pernah mendapatkan pelatihan keterampilan	10,71	15,85

No	Aspek	Indikator	Definisi	Pembandingan	Perlakuan
64	Pengembangan ekonomi sektor nontambang	Rata-rata penghasilan pekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh di sektor pariwisata	Rata-rata penghasilan pengusaha berusia ≥ 15 tahun yang bekerja di industri pariwisata	Rp3.231.250	Rp1.803.378
65	Pengembangan ekonomi sektor nontambang	Rata-rata upah pekerja dengan status buruh/pekerja/pegawai di sektor pariwisata	Rata-rata penghasilan pekerja berusia ≥ 15 tahun yang bekerja di industri pariwisata	Rp716.666	Rp2.406.818
66	Pengembangan ekonomi sektor nontambang	Persentase penduduk dengan kesadaran tentang ekowisata	Persentase penduduk berusia ≥ 15 tahun yang mengetahui konsep ekowisata	0.41	1.01
67	Pengembangan ekonomi sektor nontambang	Persentase tenaga kerja muda yang pernah mendapatkan pelatihan keterampilan	Persentase penduduk berusia 16–30 tahun yang bekerja dan pernah mendapatkan pelatihan dalam satu tahun terakhir	22.22	36.36
68	Pengembangan ekonomi sektor nontambang	Persentase tenaga kerja muda yang memiliki/menjalankan usaha (berstatus berusaha sendiri atau berusaha dibantu buruh)	Persentase penduduk berusia 16–30 tahun yang berusaha terhadap total penduduk berusia 16–30 tahun yang bekerja	29.29	17.1
69	Pengembangan ekonomi sektor nontambang	Rata-rata penghasilan pekerja muda dengan status berusaha sendiri atau berusaha dibantu buruh	Rata-rata penghasilan penduduk berusia 16–30 tahun yang berusaha	Rp1.012.857	Rp1.129.130
70	Pengembangan ekonomi sektor nontambang	Persentase usaha yang memiliki sertifikat izin usaha/produk	Persentase penduduk berusia ≥ 15 tahun yang berusaha serta memiliki sertifikat izin usaha/produk	13,04	21,93



 Jl. Cikini Raya No. 10A
Jakarta 10330 Indonesia

 +62 21 3193 6336

 +62 21 3193 0850

 smeru@smeru.or.id

 smeru.or.id

   The SMERU Research Institute

 @SMERUInstitute

 @smeru.institute